

@KEMENKESRI



@KEMENKES_RI



KEMENTERIAN KESEHATAN RI



SEHATNEGERIKU.KEMKES.GO.ID



KEMENTERIAN KESEHATAN RI



RADIOKESEHATAN.KEMKES.GO.ID



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

**BIRO KOMUNIKASI DAN
PELAYANAN PUBLIK**

Kementerian Kesehatan RI
Tahun 2024

2024



KATA PENGANTAR

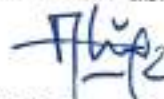
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya sehingga Biro Komunikasi dan Informasi Publik dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024. Penyusunan laporan ini merupakan wujud implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dengan tujuan untuk mencerminkan komitmen Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dalam mewujudkan akuntabilitas yang merupakan salah satu pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui laporan ini, diharapkan dapat menggambarkan sejauh mana kinerja yang telah dicapai selama tahun berjalan. Hal ini menjadi bukti pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian hasil yang optimal sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi acuan bagi semua pihak dalam memahami proses dan capaian yang telah diraih serta sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dan penciptaan inovasi yang berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan.

Jakarta, Januari 2025

✓ Kepala Biro Komunikasi dan
Informasi Publik



Aji Muhawarman, ST, MKM
NIP. 197712122002121004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik berada di bawah tanggung jawab Unit Eselon I Sekretariat Jenderal dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mendukung Program Dukungan Manajemen pada Sekretariat Jenderal.

Dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021, Kementerian Kesehatan menata atau menyesuaikan nomenklatur organisasi, tugas dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 5 Tahun 2022 tanggal 7 Februari 2022 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan pada pasal 10 menyebutkan eksistensi Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik yang bernaung di dalam struktur Sekretariat Jenderal.

Berdasarkan nomenklatur tersebut, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik memiliki tugas melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi layanan publik, dengan menyelenggarakan fungsi; a) pengelolaan manajemen isu, strategi komunikasi dan komunikasi risiko; b) pengelolaan publikasi di media konvensional/modern/digital; c) pengelolaan layanan informasi, pengaduan masyarakat, dan peliputan informasi publik; d) pelaksanaan hubungan media; e) pelaksanaan koordinasi, komunikasi dan sinergi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah; f) pengelolaan komunikasi internal dan perpustakaan; g) pemantauan, evaluasi dan pelaporan; h) pelaksanaan urusan administrasi Biro. Peraturan Menteri Kesehatan tersebut juga mengatur bahwa Organisasi Tata Kerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik (Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik) terdiri dari; a) Kepala Unit Kerja; b) Subbagian Administrasi Biro dan c) Kelompok Jabatan Fungsional.

Ringkasan Tingkat Pencapaian Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Perjanjian Kinerja antara Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2024 berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan ditetapkan 2 (dua) target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: (1) Indeks kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan berita dan publikasi; (2) Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan. Adapun tingkat pencapaian output Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik pada semester I tahun 2024 sebagai berikut:

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TA 2023		TA 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Program Dukungan Manajemen pada Sekretariat Jenderal	Meningkatnya pengelolaan komunikasi dan pelayanan Publik					
Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Berita dan Publikasi	83	89,36	83	90,17
		Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan	37 UPT	46 UPT	40 UPT	44 UPT

***data realisasi Bulan Januari s.d. Desember 2024**

Di sisi lain, peningkatan kualitas kinerja unit kerja dapat dilihat dari berbagai apresiasi yang diterima dalam bidang kehumasan yang mana hal tersebut merupakan salah satu Indikator Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan yang menjadi tanggungjawab Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik yaitu “Award Kehumasan Kementerian Kesehatan”. Adapun apresiasi yang diterima oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penghargaan *Silver Winner* PR Indonesia Award 2024 Kategori Media Sosial TikTok

Dalam penghargaan PR Indonesia Award (PRIA) 2024, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik meraih *Silver Winner* dalam rangka pengelolaan media sosial TikTok Kementerian Kesehatan.



b. Penghargaan *Silver Winner* PR Indonesia Award 2024 Kategori Media Sosial Instagram

Dalam pengelolaan akun media sosial resmi Kementerian Kesehatan pada *platform* Instagram, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik juga mendapatkan penghargaan *Silver Winner* di ajang PR Indonesia Award 2024.



c. Penghargaan *Bronze Winner* PR Indonesia Award 2024 Kategori Media Sosial YouTube

Selain TikTok dan Instagram, media sosial YouTube Kementerian Kesehatan juga meraih *Bronze Winner* pada PR Indonesia Award 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 7 Maret 2024.



d. Penghargaan *Gold Winner* pada Indonesia *Inhouse Magazine Award* (INMA) 2024

Majalah Mediakom Kementerian Kesehatan Edisi Februari 2024 meraih penghargaan *Gold Winner* pada Indonesia *Inhouse Magazine Award* (INMA) 2024 yang diselenggarakan Serikat Perusahaan Pers (SPS).



e. Penghargaan Badan Publik dengan Kualifikasi "Informatif" dari Komisi Informasi Pusat RI

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) berhasil meraih predikat Badan Publik dengan kualifikasi "Informatif" dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Predikat ini diberikan berdasarkan penilaian terhadap keterbukaan, akurasi, serta aksesibilitas informasi yang disediakan oleh Kemenkes kepada masyarakat.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	2
DAFTAR ISI.....	7
BAB I: PENDAHULUAN.....	8
A. Latar Belakang.....	8
B. Tugas, Fungsi dan Struktur.....	9
C. Struktur Organisasi.....	9
D. Sistematika Laporan.....	15
BAB II: PERENCANAAN KINERJA.....	17
A. Perencanaan Kinerja.....	17
B. Perjanjian Kinerja 2024.....	24
BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
A. Capaian Kinerja (3 Tahun Terakhir).....	25
1. Definisi Operasional Indikator.....	26
2. Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Indikator.....	39
B. Analisis Capaian Kinerja.....	163
1. Hal-hal yang memengaruhi pencapaian target.....	163
2. Permasalahan.....	163
3. Pemecahan Masalah.....	164
4. Rencana Tindak Lanjut.....	164
C. Inovasi Kinerja.....	166
D. Sumber Daya/Realisasi Anggaran.....	168
1. Sumber Daya Manusia.....	168
2. Sumber Daya Anggaran.....	174
3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana.....	176
E. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	182
BAB IV: KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT.....	188
A. Kesimpulan.....	188
B. Tindak Lanjut.....	189

BAB I

PENDAHULUAN

A) Latar Belakang

Dewasa ini, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi elemen krusial dalam meraih tujuan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang terus digalakkan di berbagai sektor pemerintahan. Sistem ini mengedepankan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*performance-based management*) yang menekankan pada hasil yang dapat diukur dan berorientasi pada manfaat bagi masyarakat, sehingga penerapan sistem ini tidak hanya berguna untuk pengukuran kinerja tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah dapat menjalankan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya. Pendekatan ini mengharuskan instansi untuk menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur, yang nantinya akan menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi aspek efektivitas dan efisiensi kegiatan.

Di era digital dan keterbukaan informasi ini, kebutuhan akan transparansi kinerja sangat mendesak. Masyarakat berekspektasi agar setiap instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Masyarakat menginginkan adanya bukti nyata mengenai efektivitas penggunaan anggaran negara serta dampak positif yang dihasilkan dari setiap kebijakan atau program yang dilaksanakan pemerintah. Tanpa transparansi, ketidakpercayaan terhadap lembaga pemerintahan akan terus berkembang, sehingga dapat berimbas pada penurunan partisipasi publik.

Berdasarkan hal tersebut telah dikembangkan media pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2416/MENKES/PER/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan RI dan berdasarkan Permenpan & RB Nomor 88 tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Rencana Strategis tahun 2020-2024 telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan strategi baru yang didasarkan pada perubahan struktur organisasi, fokus pada sasaran prioritas nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan Tujuan Pembangunan Milenium/*Millenium Development Goals* (MDG's). Salah satu program generik yang mewadahi kegiatan di lingkup Sekretariat Jenderal adalah Program Dukungan Manajemen. Sasaran program ini adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan. Pada bulan April tahun 2022, Kementerian Kesehatan telah melakukan revisi

yang tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022, perubahan pada Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik mempunyai dua indikator yaitu: (1) Indeks kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan berita dan publikasi; (2) Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan.

B) Tugas, Fungsi dan Struktur

Sebagai Tindak Lanjut Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan, yang pada pasal 4 disebutkan bahwa tugas Kementerian Kesehatan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di kesehatan untuk membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara. Adanya peraturan tersebut, Kementerian Kesehatan selanjutnya menata atau menyesuaikan nomenklatur organisasi, tugas, dan fungsinya.

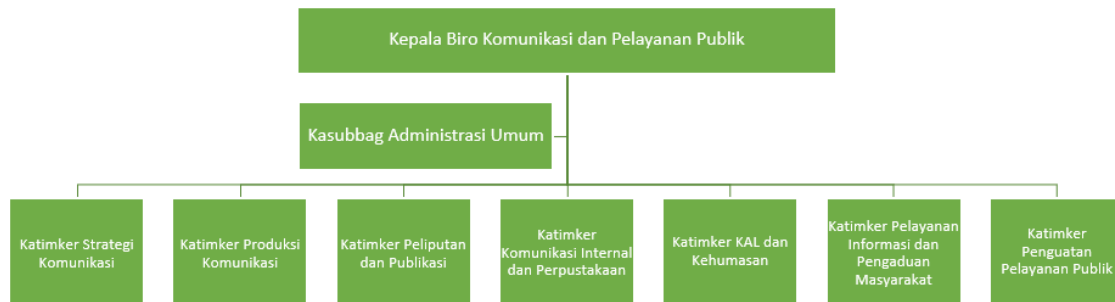
Dengan nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik pada pasal 27 disebutkan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi layanan publik, dengan menyelenggarakan fungsi: a) pengelolaan manajemen isu, strategi komunikasi dan komunikasi risiko; b) pengelolaan publikasi di media konvensional/ modern/digital; c) pengelolaan layanan informasi, pengaduan masyarakat, dan peliputan informasi publik; d) pelaksanaan hubungan media; e) pelaksanaan koordinasi, komunikasi dan sinergi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah; f) pengelolaan komunikasi internal dan pengelolaan perpustakaan; g) pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan h) pelaksanaan urusan administrasi Biro. Peraturan ini juga mengatur mengenai Organisasi Tata Kerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik terdiri dari: a) Kepala Unit Kerja; b) Subbagian Administrasi Biro; dan c) Kelompok Jabatan Fungsional.

C) Struktur Organisasi

Merujuk pada peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan rentang kendali dalam operasional pelaksanaan kegiatan, maka dibentuklah tim kerja pada setiap unit kerja. Setiap tim kerja dipimpin oleh seorang ketua, sedangkan untuk jumlah anggota tidak ada pembatasan. Tim kerja yang dibentuk mempunyai tugas yaitu: 1) Menyusun perencanaan Tim kerja; 2) Melaksanakan tugas sesuai substansi tim kerja; 3) Melakukan pemantauan dan

evaluasi terhadap pelaksanaan tugas tim; 4) Menyusun laporan kegiatan Tim; dan 5) Melakukan koordinasi antar tim kerja dalam pekerjaan insidentil/penugasan

Struktur Organisasi Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Tahun 2024



Di lingkungan Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik ditetapkan 7 (tujuh) Tim Kerja dengan lingkup tugas sebagai berikut:

1. TIM KERJA STRATEGI KOMUNIKASI

LINGKUP TUGAS

Penyusunan strategi komunikasi kebijakan/program kesehatan, pengelolaan isu publik dengan melakukan media monitoring baik media massa maupun media sosial secara berkala, *agenda setting*, penyelenggaraan *media coaching* bagi pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan, penguatan kapasitas komunikasi risiko pada krisis kesehatan, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan berita dan publikasi Kementerian Kesehatan.

2. TIM KERJA PELIPUTAN DAN PUBLIKASI

LINGKUP TUGAS

Peliputan dan dokumentasi aktivitas pimpinan/pemberitaan kegiatan/capaian Kemenkes, publikasi *paid media* melalui media massa dan media sosial, sosialisasi kegiatan Kemenkes melalui penyediaan *display* foto serta pameran foto dalam rangka Hari Kesehatan Nasional (HKN), pembangunan relasi media seperti media *visit*, pelaksanaan konferensi pers/media *briefing*/peliputan kegiatan Kemenkes dengan para jurnalis/media, penyiapan bahan pimpinan berupa *talking point* dan/atau *briefing sheet*.

3. TIM KERJA PRODUKSI KOMUNIKASI

LINGKUP TUGAS

Pengelolaan media sosial resmi (YouTube, Instagram, X.com, Facebook, TikTok), *website*, Siaran Radio Kesehatan, Podcast Kemenkes, tv *streaming* Kementerian

Kesehatan, penerbitan majalah Kemenkes (mediakom), produksi konten edukasi terpilih untuk media sosial Kemenkes, dan penyusunan laporan kinerja tahunan Kemenkes

4. TIM KERJA KOMUNIKASI ANTAR LEMBAGA DAN KEHUMASAN

LINGKUP TUGAS

Fasilitasi kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kunjungan Kerja (Kunker) dan Sosialisasi Germas), koordinasi dan fasilitasi kegiatan Badan Koordinasi Humas Kementerian/Lembaga, pembinaan jabatan fungsional Pranata Humas, Penanggungjawab Provinsi Binwil Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, penghubung eksternal Kementerian/Lembaga/LSM dan organisasi non pemerintah lainnya.

5. TIM KERJA PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

LINGKUP TUGAS

Pengelolaan informasi (pojok info, HK, ULT, penayangan *signage* di lingkungan Kementerian Kesehatan), pengelolaan pengaduan masyarakat (unjuk rasa, Ombudsman, SP4N-LAPOR, dan media sosial pengaduan), penanggungjawab dalam penilaian kepatuhan standar layanan publik oleh Ombudsman, pengelolaan dan pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik, penyelenggaraan pemberian penghargaan terkait pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kesehatan.

6. TIM KERJA PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK

LINGKUP TUGAS

Pengelolaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Fasilitasi penilaian indeks pelayanan publik oleh oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), pengelolaan forum konsultasi pelayanan publik, pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), pelaksanaan survei kepatuhan interaksi pelayanan publik, Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di unit utama dan unit pelaksana teknis Kemenkes.

7. TIM KERJA KOMUNIKASI INTERNAL DAN PERPUSTAKAAN

LINGKUP TUGAS

Pengelolaan komunikasi internal terkait pelaksanaan transformasi internal (melalui @lifeatkemkes, komik, WhatsApp *Blast*, dan kegiatan lainnya), pengelolaan perpustakaan Kementerian Kesehatan, pembinaan pustakawan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Dalam pelaksanaannya, dibentuknya 7 (tujuh) Tim Kerja di lingkungan Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik untuk menjawab beberapa isu strategis antara lain:

- a. Komunikasi memiliki peran penting dalam mewujudkan kondisi kesehatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), antara lain untuk meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi *stakeholder* (pemangku kepentingan) Kemenkes terhadap kebijakan dan program pembangunan kesehatan.
- b. Terdapat peningkatan kebutuhan dari pemangku kepentingan internal Kemenkes terhadap peranan strategis Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, baik dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan, maupun dalam menjaga citra positif Kemenkes. Keberadaan Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dirasa penting dalam memberikan arahan dan pendampingan bagi unit-unit utama dalam menyiapkan dan mengolah bahan informasi yang ingin diinformasikan dan dipublikasikan Kemenkes kepada para pemangku kepentingan baik di internal maupun di eksternal.
- c. Terdapat peningkatan tuntutan dari pemangku kepentingan eksternal dan masyarakat luas terhadap peran Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dalam menyediakan informasi kesehatan yang benar dan akurat, dapat dengan mudah diakses oleh publik, mengkampanyekan/mensosialisasikan program-program yang dijalankan oleh Kemenkes, maupun menampung aspirasi publik. Masyarakat semakin menyadari hak mereka untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan dan program-program pemerintah dalam bidang kesehatan dan memberi masukan terhadap pemerintah.
- d. Terdapat peningkatan tuntutan dari pemangku kepentingan eksternal dan masyarakat luas terhadap keseragaman, kekinian, keakuratan dan kelengkapan informasi publik yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Keseragaman, kekinian, keakuratan dan kelengkapan data dan informasi menjadi hal yang perlu ditingkatkan karena empat poin tersebut akan bermuara pada kredibilitas dan kualitas informasi yang disampaikan Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes kepada para pemangku kepentingan Kemenkes. Dengan demikian tingkat kepercayaan pemangku kepentingan Kemenkes dapat meningkat sehingga Kemenkes dapat memperoleh citra yang baik.
- e. Meningkatnya berita yang tidak benar berupa *hoax* dan seperti informasi yang beredar di masyarakat tentang kesehatan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan keresahan apabila tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan ketidakpercayaan pada kebijakan/program Kementerian Kesehatan dan pemerintah

secara umum, untuk itu perlu langkah dan upaya mengonter dan diluruskan melalui konten positif dan desain anti *hoax*.

- f. Perlunya penguatan kapasitas Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, baik dari sisi sistem maupun sumber daya (*software* dan *hardware*), untuk mengoptimisasi penyelenggaraan fungsi komunikasi publik Kemenkes, baik untuk aspek strategis maupun aspek taktis.

Untuk mewujudkan RPJMN, Renstra Kementerian Kesehatan di tahun 2024 dan memperhatikan pencapaian Prioritas Nasional Bidang Kesehatan serta Rencana Aksi Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, maka akan dilaksanakan strategi yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan Pengelolaan Komunikasi Publik tahun 2024 ada dua yaitu, Kegiatan Pokok dan Indikatif.

Gambaran Kegiatan Pokok dan Indikatif Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik 2020-2024



Kegiatan Indikatif tersebut dapat dijabarkan berikut ini:

1. **Pengelolaan Manajemen Isu**

Kegiatan indikatif ini fokus untuk memonitor berbagai isu/opini kesehatan yang beredar di berbagai media pemberitaan, beberapa bentuk kegiatan yang dirancang seperti rapat, pertemuan evaluasi, konsinyasi, survei dan lain-lain.

2. **Penataan Pedoman/Petunjuk Teknis**

Kegiatan indikatif ini mencakup penyiapan buku pedoman dalam pengelolaan Komunikasi Publikasi dan Pelayanan Publik, seperti Strategi Komunikasi, Komunikasi Risiko, Komunikasi Publik di lingkungan Kementerian Kesehatan, Pelayanan Publik

dan lain lain. Kegiatan dapat dirancang seperti rapat, *workshop*, diseminasi, kerjasama dengan pihak ketiga, dan lain-lain.

3. Publikasi Kebijakan/Program

Kegiatan indikatif ini mencakup semua bentuk publikasi atau penyebarluasan informasi kebijakan/program Kesehatan kepada publik melalui media cetak, elektronik dan digital. Berbagai bentuk kegiatan dapat dirancang seperti *advertorial*, *talkshow*, *gathering* media, penulisan di Mediakom, temu media, *Podcast*, *reportase* berita kesehatan, ekspose pembangunan kesehatan di daerah bersama media, liputan dan dokumentasi kegiatan kesehatan dan lain- lain.

4. Koordinasi dan Sinergi antar Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah

Kegiatan indikatif mencakup komunikasi secara internal dan eksternal dengan Kementerian/Lembaga, termasuk dengan lembaga non pemerintah. Berbagai kegiatan dapat dirancang seperti rapat, pendampingan pimpinan dalam Raker/RDP dengan DPR/DPD, temu Bakohumas, pendampingan pimpinan dalam kunjungan kerja bersama dewan, pendampingan pimpinan pada daerah binaan, dan lain-lain.

5. Pengelolaan Pelayanan Informasi

Kegiatan indikatif mencakup semua bentuk layanan informasi yang diberikan sesuai permintaan publik. Berbagai kegiatan dapat dirancang seperti informasi pada *signage*, layanan melalui *contact center* 1500567, PPID, LAPOR, Pojok Info, dan ULT.

6. Pengelolaan Perpustakaan

Kegiatan indikatif ini mencakup pengelolaan perpustakaan yang terbaik untuk semua *customer* yang membutuhkan informasi akan literatur kesehatan baik secara manual atau berbasis teknologi informasi. Beberapa kegiatan dapat dirancang seperti rapat, temu nasional perpustakaan, pengembangan sistem layanan perpustakaan (*hardware* dan *software*), dan lain-lain.

7. Penguatan SDM Pelaku Komunikasi Publik

Kegiatan indikatif ini mencakup untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan dari para pelaku yang bergerak dalam komunikasi-publik. Beberapa kegiatan dapat dirancang seperti rapat, koordinasi, peningkatan kemampuan dan keterampilan melalui pelatihan, kursus, pembinaan, rapat atau pertemuan.

8. Penguatan SDM Pelaku Pelayanan Publik

Kegiatan indikatif ini mencakup untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan dari para pelaku yang bergerak dalam pengelolaan perpustakaan dari pusat sampai dengan UPT dan pelayanan publik kesehatan lainnya. Beberapa kegiatan dapat

dirancang seperti rapat, pembinaan atau pendampingan, pelatihan kursus dan lain-lain.

9. Pengelolaan Administrasi Biro

Kegiatan indikatif ini mencakup dukungan layanan internal organisasi/satuan kerja. Beberapa kegiatan dapat dirancang seperti pembinaan perencanaan dan monev program dan anggaran, pembinaan akuntansi keuangan dan BMN, pembinaan kapasitas SDM.

10. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kegiatan indikatif ini mencakup pemenuhan akan sarana dan prasarana kerja pada satuan kerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik seperti pengadaan kamera, komputer, printer dan renovasi prasarana. Dengan lima strategi dalam upaya mencapai RPJMN, Renstra Kementerian Kesehatan dan program di lingkup Sekretariat Jenderal serta Rencana Aksi Kegiatan Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik 2020-2024.

Peta Strategi Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik



D) SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Tahun 2024 disusun untuk menggambarkan pencapaian kinerja biro selama tahun berjalan. Laporan ini tidak hanya mencatat hasil kinerja tahun 2024, tetapi juga membandingkan capaian indikator kinerja tersebut dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga memberikan perspektif

mengenai tren dan perkembangan organisasi. Perbandingan ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja unit kerja secara keseluruhan. Melalui analisis capaian kinerja, laporan ini juga mengidentifikasi potensi perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi biro. Dengan pendekatan analitis tersebut, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik disusun sebagai berikut:

1. Bab I (Pendahuluan): menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas, fungsi dan struktur organisasi Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, serta sistematika penyajian laporan.
2. Bab II (Perencanaan dan perjanjian kinerja): menjelaskan Perencanaan Kinerja (Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, DO Indikator Kinerja Kegiatan) dan Perjanjian Kinerja 2024 Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik.
3. Bab III (Akuntabilitas Kinerja): menjelaskan tentang capaian kinerja 3 tahun terakhir, Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024, sumber daya manusia, anggaran serta Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam rangka pencapaian kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik selama Tahun 2024.
4. Bab IV (Kesimpulan dan Tindak Lanjut): berisi kesimpulan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Tahun 2024 dan Rencana Tindak Lanjut.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A) Perencanaan Kinerja

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dirancang sebagai landasan strategis untuk mewujudkan *good governance* dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result-oriented government*). Sistem ini tidak hanya menjadi alat pemantauan kinerja, tetapi juga berfungsi sebagai pendekatan manajemen berbasis kinerja yang terintegrasi, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya pemerintah. Dalam konteks ini, SAKIP memberikan kerangka kerja yang mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi serta pencapaian sasaran organisasi yang dikalkulasi berdasarkan indikator kinerja yang terukur dan relevan.

Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, sebagai entitas yang bertanggungjawab menjalankan fungsi strategis sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), telah menetapkan proses bisnis dan indikator yang berorientasi pada pencapaian *outcome* dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan. Pentingnya perencanaan kinerja di Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik terletak pada kemampuannya untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dan program yang dijalankan selaras dengan tujuan strategis organisasi. Dengan perencanaan yang terstruktur, biro dapat mengalokasikan sumber daya secara optimal, mengidentifikasi prioritas dan mengantisipasi tantangan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan, sehingga dalam hal ini akan mempermudah proses monitoring dan evaluasi demi perbaikan yang berkelanjutan.

Adapun proses bisnis unit kerja difokuskan pada; a) pengelolaan manajemen isu, Strategi Komunikasi dan Komunikasi Risiko; b) pengelolaan publikasi kesehatan; c) koordinasi komunikasi dan sinergi antar Kementerian/Lembaga; dan d) pengelolaan pelayanan publik dan dukungan administrasi Biro.

Gambaran Proses Bisnis Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik



1. Visi dan Misi

Pada Kabinet Indonesia Maju 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024, visi dan misi Kementerian Kesehatan yaitu “Menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan”, adapun upaya mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan melalui 4 (empat) misi Kementerian Kesehatan yaitu:

- a. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
- b. Menurunkan angka stunting pada balita;
- c. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- d. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Visi dan Misi tersebut merupakan visi misi bersama semua unit di lingkungan Kementerian Kesehatan.

2. TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Tujuan

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi untuk tercapainya visi. Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kementerian Kesehatan 2020-2024 telah ditetapkan tujuan strategis yaitu:

- 1) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup;
- 2) Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- 3) Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- 4) Peningkatan sumber daya kesehatan; dan
- 5) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan visi dan misi Presiden serta tujuan Kementerian Kesehatan dalam pembangunan kesehatan 2020-2024, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan komunikasi dan pelayanan publik perlu mempublikasikan, mengkomunikasikan kebijakan/program pada semua *stakeholder* dan masyarakat luas secara masif termasuk hasil-hasil pembangunan kesehatan yang telah dicapai. Semua hal ini dituangkan dalam rencana kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, untuk itu telah ditetapkan tujuan strategis dalam perencanaan kinerja pengelolaan komunikasi dan pelayanan publik:

- 1) Penguatan pengelolaan manajemen isu, strategi komunikasi dan komunikasi risiko.
- 2) Penguatan pengelolaan publikasi cetak, elektrik dan digital.

- 3) Peningkatan layanan informasi, pengaduan masyarakat, peliputan dan pendokumentasian hasil-hasil pembangunan kesehatan.
- 4) Penguatan hubungan media massa dan pengelolaan media sosial secara profesional.
- 5) Penguatan koordinasi hubungan komunikasi dan jejaring antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah.
- 6) Peningkatan pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Pustakawan.
- 7) Pengelolaan tata kelola administrasi umum Biro dengan baik, bersih dan transparan.

2.2 Sasaran

Sasaran strategis Kementerian Kesehatan untuk Tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yang bermutu
- 2) Meningkatnya perbaikan pengelolaan BPJS Kesehatan
- 3) Menurunnya kematian maternal dan neonatal
- 4) Meningkatnya status gizi balita
- 5) Meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- 6) Meningkatnya advokasi kesehatan dan aksi lintas sektor
- 7) Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dengan mengutamakan pendekatan faktor risiko
- 8) Meningkatnya pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
- 9) Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
- 10) Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar
- 11) Meningkatnya pembiayaan kesehatan
- 12) Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah
- 13) Meningkatnya efektivitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan
- 14) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Sebagai unit yang diberikan tugas pengelolaan publikasi dan pelayanan publik kementerian, maka sasaran kegiatan Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik adalah meningkatnya pengelolaan publikasi komunikasi dan pelayanan publik yaitu dengan: **“Meningkatkan akses dan kualitas publikasi-komunikasi dan pelayanan publik menuju layanan prima dengan penekanan penguatan strategi komunikasi, penyediaan produk komunikasi berkualitas, SDM Pranata Humas dan Pustakawan yang kompeten,**

penguatan koordinasi antar Lembaga dan pengembangan jejaring dengan didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi”.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut dapat tercapai untuk kurun lima tahun kedepan 2020-2024, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik telah menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis yaitu:

8 (delapan) sasaran Strategis Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik 2020-2024



3. STRATEGI

Untuk mewujudkan agenda pembangunan RPJMN 2020-2024, Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024, Rencana Aksi Kegiatan Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik 2020-2024 maka Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik telah menetapkan dan merancang strategi sebagai berikut:

Strategi Publikasi Komunikasi dan Pelayanan Publik

Tahun 2020-2024



4. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 telah ditetapkan 2 (dua) kategori Program Kementerian Kesehatan yaitu **program generik** dan **program teknis**. **Program generik** meliputi: 1) Program Dukungan Manajemen; 2) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan 3) Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Adapun **Program teknis** meliputi: 1) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; 2) Program Kesehatan Masyarakat; dan 3) Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Merujuk Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024, Indikator Kinerja Program dan Kegiatan ditetapkan bahwa Sasaran Program Dukungan Manajemen (Program Dukman) pada Sekretariat Jenderal adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan. Untuk mencapai salah satu sasaran Program Dukman di lingkungan Sekretariat Jenderal, Satker Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik yang diberi amanah dalam menjaga citra dan reputasi Kementerian Kesehatan diberi tanggungjawab dalam kegiatan pengelolaan publikasi dan pelayanan publik. Sasaran kegiatannya adalah meningkatnya pengelolaan komunikasi publik dan pelayanan publik dengan indikator pencapaian sasaran tersebut adalah: (1) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Berita dan Publikasi dengan pada semester I realisasi senilai 90,17, dan (2) Jumlah UPT Kemenkes dengan Kategori Baik dalam Pelaksanaan Standar Interaksi Pelayanan sebanyak 44 UPT.

Selanjutnya dapat dijabarkan dalam 5 (lima) tahun kedepan (2020-2024) secara rinci target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik sebagai berikut:

Matrik Kinerja Kegiatan
Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik 2022-2024

SEBELUM REVISI RENSTRA								
Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	2020		2021		2022	
			T	R	T	R	T	R
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pengelolaan Komunikasi dan	Jumlah publikasi program pembangunan	69.000	16.645	70.000	137.784	75.000	42.908

SEBELUM REVISI RENSTRA								
Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	2020		2021		2022	
			T	R	T	R	T	R
	Pelayanan Publik	kesehatan yang disebar-luaskan kepada masyarakat melalui berbagai media						
		Jumlah layanan informasi publik (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat yang diselesaikan	19.690	45.764	19.690	58.507	19.690	31.566
		Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan	30	30	30	37	30	46

SESUDAH REVISI RESTRA								
Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pengelolaan dan Publikasi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Berita dan Publikasi	82	B06: 85,34 B12: 86,28	83	B06: 88,20 B12: 89,36	83	B06: 89,36 B12: 90,17
	Komunikasi dan Pelayanan Publik	Jumlah UPT Kemenkes dengan Kategori Baik dalam Pelaksanaan Standar Interaksi Pelayanan	30	25	37	46	40	44

5. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Untuk memudahkan perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan maka disusun definisi operasional ke dua IKK sebagai berikut:

a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Berita dan Publikasi

Definisi Operasional: Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan informasi (berita/publikasi) kesehatan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Cara Perhitungan: Pengukuran melalui survei dengan nilai IKM kategori Baik sesuai dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

b. Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan

Definisi Operasional: Kategori Baik adalah jumlah UPT Kemenkes yang telah menerapkan interaksi pelayanan publik sesuai Permenkes No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kesehatan dan memperoleh angka penilaian diatas 70.

Cara Perhitungan: Melakukan penilaian melalui survei dengan angka *range* standar penilaian sebagai berikut : 91-100 Prima; 81-90 sangat baik; 71-80 Baik; 61-70 Cukup; 51-60 Kurang; dan 0-50 Buruk.

B. PERJANJIAN KINERJA 2024

Penetapan kinerja berisi komitmen yang dituangkan dalam rencana kinerja tahunan antara pimpinan unit kerja sebagai penerima tanggung jawab dengan pihak yang mendelegasikan amanah tersebut. Dalam konteks ini, Perjanjian Kinerja menjadi instrumen untuk mengukur akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja demi tercapainya tujuan instansi.

Sebagai penjabaran dari sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan kesehatan telah ditetapkan target-target sasaran indikator kinerja yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024. Target capaian indikator kinerja kegiatan untuk tercapainya sasaran meningkatnya pengelolaan komunikasi publik dari program kegiatan pengelolaan komunikasi publik adalah sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Tahun 2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik	Meningkatnya pengelolaan komunikasi publik dan pelayanan publik	1.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan berita dan publikasi	83
		2.	Jumlah UPT Kemenkes dengan Kategori Baik dalam Pelaksanaan Standar Interaksi Pelayanan	40 UPT

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan bagian esensial dari manajemen yang bertujuan untuk menilai keberhasilan pencapaian kinerja melalui perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Tahun 2024, pengukuran kinerja dilakukan dengan menganalisis kesesuaian target dan realisasi dari setiap indikator kinerja kegiatan yang telah dirumuskan. Proses ini berfungsi sebagai mekanisme evaluasi yang memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan strategis yang ditentukan.

Didasarkan atas informasi kinerja atau gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator yang diukur, maka akan ditindaklanjuti sebagai bagian pembinaan dan perencanaan kedepan sehingga setiap program/kegiatan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik melakukan pengukuran kinerja secara periodik dan dibahas diantara Pejabat Struktural, Ketua Tim Kerja dan staf, serta dalam rapat koordinasi staf rutin.

Sasaran merupakan hasil yang dicapai secara nyata oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran Kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik yaitu:

MENINGKATNYA PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK DAN PELAYANAN PUBLIK

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik tahun 2020 - 2024, terdapat 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Berita dan Publikasi ; dan
2. Jumlah UPT Kemenkes dengan Kategori Baik dalam Pelaksanaan Standar Interaksi Pelayanan.

Pencapaian tujuan dan sasaran akan terlihat secara keseluruhan pada kurun waktu Renstra, namun demikian perubahan setiap tahun akan terlihat dari pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Penetapan sasaran dan indikator kinerja di tuangkan dalam dokumen Rencana Strategi Kemenkes tahun 2020 – 2024.

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	T	R
			2024	2024
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pengelolaan Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Berita dan Publikasi	83	B06: 89,36 B12: 90,17
		2. Jumlah UPT Kemenkes dengan Kategori Baik dalam Pelaksanaan Standar Interaksi Pelayanan	40	44

***Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan TA 2024**

Dilihat dari capaian masing-masing indikator, untuk Tahun 2024 Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dapat melaksanakan dan mencapai sasaran kinerja dengan baik. Adapun uraian capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik yaitu sebagai berikut:

1. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) PERTAMA:

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Berita dan Publikasi

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pengelolaan Komunikasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Berita dan Publikasi	83	B06: 89,36 B12: 90,17

Definisi Operasional Indikator

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan informasi (berita/publikasi) kesehatan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Tujuan Pelaksanaan Indikator

- a. Mengukur tingkat kepuasan dan harapan masyarakat terhadap pengelolaan berita dan publikasi kebijakan kesehatan yang telah dilakukan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik pada semester I dan II tahun 2024;
- b. Mengetahui perubahan (peningkatan/penurunan) kepuasan masyarakat dari periode sebelumnya;
- c. Menginventarisasi area layanan publikasi yang perlu diperbaiki;
- d. Mengetahui kebutuhan dan keinginan (*need and want*) masyarakat terhadap informasi kesehatan; dan
- e. Mengetahui kebiasaan masyarakat dalam merespon isu kesehatan dan berita/informasi yang berpotensi *hoax*.

Cara Perhitungan Indikator

Dalam mengukur IKM, indikator dan parameter merujuk PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat yang terdiri dari 9 indikator/unsur yang terdiri dari:

- a. Persyaratan
- b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- c. Waktu Penyelesaian
- d. Biaya/Tarif
- e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- f. Kompetensi Pelaksana
- g. Perilaku Pelaksana
- h. Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan
- i. Sarana dan Prasarana

Guna mencapai tujuan indikator, maka parameter dari 9 unsur tersebut dapat dikembangkan agar mencerminkan aspek layanan terkait pemberitaan dan publikasi secara

lebih spesifik dan relevan. Dengan demikian, hasil survei menjadi lebih akurat dalam menilai efektivitas pengelolaan berita dan publikasi di berbagai *platform* yang digunakan.

Metode pengumpulan data dilakukan secara *mixed method*, yaitu menggabungkan antara riset kuantitatif dan riset kualitatif. Riset kuantitatif dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui *online survey* dan *telephone survey* terhadap sejumlah responden yang ditargetkan. Sedangkan, riset kualitatif dilakukan dengan diskusi kelompok terfokus (FGD) dan wawancara mendalam yang melibatkan informan dari beberapa orang yang telah mengikuti survei *online/telepon*.

Data-data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah dengan formulasi yang sudah ditetapkan dalam PermenPANRB. Kemudian, dianalisis menggunakan konsep analisis diagram Pencar: IPA Analysis. *Importance Performance Analysis* (IPA) digunakan untuk mengetahui area dari parameter yang menjadi prioritas untuk dipertahankan atau yang harus diperbaiki.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pengelolaan berita dan publikasi, pada tahun 2024 mempunyai target 83. Pelaksanaan survei semester I akan dilakukan bulan Juli-Agustus 2024 dan semester II diselenggarakan pada bulan November-Desember 2024.

Hasil/Keluaran

- a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
- b. Evaluasi dan rekomendasi terkait perbaikan layanan

Analisis Keberhasilan / kegagalan Pencapaian Indikator :

a. Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target

Untuk mencapai target IKK yang ditetapkan, telah dilakukan kegiatan publikasi kebijakan dan program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media (PESO media) sebagai berikut:

- 1) Publikasi Berita di *website* Kemenkes dan *sehatnegeriku*.
- 2) Publikasi Konten di Akun Media Sosial Kemenkes (Facebook, X.com, Instagram, YouTube, TikTok).
- 3) Wawancara media dengan juru bicara atau pejabat Kemenkes
- 4) Media *Briefing* dan Jumpa Pers
- 5) Reportase berita
- 6) Peliputan dan Dokumentasi
- 7) Siaran Radio Kesehatan
- 8) *Podcast* Kemencast

- 9) Penerbitan Majalah Mediakom
- 10) Pelibatan *Influencer* atau Pemengaruh di Media Sosial
- 11) Publikasi Advetorial di Media Cetak dan Media Sosial
- 12) *Talkshow* di TV dan Radio

b. Permasalahan

Dalam pelaksanaan survei IKM, terdapat beberapa tantangan/permasalahan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dan hasil survei berikutnya yakni:

- 1) Hambatan pada pelaksanaan survei IKM cukup terasa pada semester II. Mengingat rentang waktu yang lebih pendek di semester II dengan program/kegiatan komunikasi 2024 yang masih berjalan, sedangkan waktu surveinya di bulan Oktober-Desember 2024. Adapun, sosialisasi Laporan Hasil Survei IKM Pengelolaan Berita dan Publikasi Kesehatan Semester I dilakukan di bulan September 2024 dengan pelaksanaan surveinya di bulan Juli-Agustus 2024.
- 2) Sebagian besar rekomendasi yang diberikan pada survei IKM tahun 2024 sudah dilakukan di lingkup Rokom Yanlik, namun perlu dukungan Humas Unit Utama untuk berkontribusi secara aktif dalam melakukan taktik komunikasi yang terintegrasi.

c. Pemecahan masalah

Dengan rentang waktu yang lebih pendek di semester II dilakukan upaya yang lebih terencana dengan mulai melakukan penjajakan dengan para calon penyedia jasa survei pada awal Oktober 2024 dan memberikan rentang waktu hingga akhir Desember 2024 untuk pelaporan. Perencanaan kegiatan dengan mengatur waktu, SDM, anggaran, dan sarana prasarana secara lebih efektif dan efisien;

d. Rencana Tindak Lanjut

Perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan, hingga monitoring evaluasi pada survei IKM Pengelolaan Berita dan Publikasi Kesehatan tahun berikutnya diatur dengan sebaik mungkin yang disesuaikan waktu SDM, anggaran, dan sarana prasarana.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) KEDUA:

Jumlah UPT Kemenkes dengan Kategori Baik Dalam Pelaksanaan Standar Interaksi Pelayanan

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik	Meningkatnya pengelolaan komunikasi dan pelayanan publik	Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori Baik dalam Pelaksanaan Standar Interaksi Pelayanan	40 UPT	44 UPT

Definisi Operasional :

Kategori Baik yaitu jumlah UPT Kemenkes yang telah menerapkan interaksi pelayanan publik sesuai Permenkes No. 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kesehatan dan memperoleh angka penilaian diatas 71.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan tahun 2024 mempunyai target 40 UPT dengan realiasi sebanyak 4 UPT dengan nilai Baik, Sangat Baik dan Prima. Indikator Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik adalah jumlah UPT dengan minimal dengan kategori Baik ketika dilakukan monev berupa survei kepatuhan interaksi perilaku pelayanan publik. Untuk mengukur tingkat kepatuhan tersebut telah dilakukan beberapa pemilahan kriteria calon Unit Lokus Evaluasi (ULE). Adapun skema tahapannya dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Sebanyak 164 UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan telah mengikuti workshop *service excellence*. Adapun rincian dari 164 UPT tersebut terdiri dari Rumah Sakit Vertikal, Kekarantinaan Kesehatan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan Lingkungan, Balai Pelatihan Kesehatan, Balai Besar Biomedis Kesehatan Jakarta, Loka Pengamanan Alat dan Fasilitas, dan Politeknik Kesehatan Kemenkes.

Setelah mengikuti workshop tersebut, UPT menyusun rencana aksi peningkatan standar perilaku interaksi layanan sehingga mendapat monitoring standar perilaku interaksi layanan. Selanjutnya mengikuti kompetisi standar perilaku interaksi layanan sehingga pelaksanaan standar perilaku interaksi layanan yang dilakukan pada satker tersebut dapat dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun penjelasan pelaksanaan standar perilaku interaksi layanan yang telah dilakukan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik pada tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

Tujuan pelaksanaan kegiatan

- 1) Mengetahui tingkat kepatuhan pelaksanaan Pedoman Interaksi Pelayanan Publik pada UPT di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
- 2) Mengetahui praktek interaksi layanan atas pelaksanaan Pedoman Interaksi Pelayanan Publik pada UPT di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
- 3) Mengetahui kelemahan dan kekurangan pelaksanaan Pedoman Interaksi Pelayanan Publik pada UPT di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai acuan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan.
- 4) Sebagai bahan evaluasi dan acuan untuk merumuskan kebijakan perbaikan di masa depan.
- 5) Mendorong persaingan yang positif antar UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam upaya peningkatan mutu pelaksanaan interaksi pelayanan publik
- 6) Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kinerja unit pelayanan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai penerima layanan

Metode

- 1) Survei kepatuhan layanan interaksi ini menggunakan metode *mystery guest* atau *mystery shopping*
- 2) *Mystery guest* adalah salah satu teknik survei dalam menilai kualitas pelayanan publik dengan cara menugaskan seseorang atau sekelompok orang untuk berkunjung ke unit pelayanan dengan berpura-pura sebagai pengguna jasa untuk mengalami,

mengamati, dan menilai kesesuaian layanan dengan standar pelayanan (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara no 31 Tahun 2014)

3) Kriteria penilaian adalah:

Nilai	Kriteria
91%-100%	Prima
81%-90%	Sangat Baik
71%-80%	Baik
61%-70%	Cukup
51%-60%	Kurang
0%-50%	Buruk

Objek Survey Penilaian Standar Perilaku Interaksi Layanan Tahun 2024

Terdapat 58 UPT yang menjadi lokus target penilaian sampai dengan Juni 2024, UPT belum dilakukan pengambilan data sedang proses lelang pengadaan vendor pihak ke tiga.

Adapun rincian UPT yang telah dilakukan pengambilan data sebagai berikut:

Adapun daftar lokus/lokasi survei kepatuhan sebagai berikut:

Ditjen Pelayanan Kesehatan:

1. RS . Pusat Otak Nasional Jakarta
2. RS. Ketergantungan Obat Jakarta*
3. RSUP. Persahabatan Jakarta*
4. RSUP Dr. Sitanala Tangerang
5. RS. Khusus Mata Cicendo Bandung
6. RS. Orthopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta
7. RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
8. RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang
9. RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado
10. RSUP Ratatoto Buyat Manado
11. RSUP dr. Ben Mboi Kupang
12. RSAB Harapan Kita Jakarta
13. RSUP Fatmawati Jakarta
14. RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta

15. RSJ Dr. Marzuki Mahdi
16. RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang
17. RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta

Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

1. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan
2. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar
3. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banten
4. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Manado
5. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tanjung Samarinda
6. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura
7. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang
8. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Lhoksumawe
9. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Bitung
10. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Tembilahan
11. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Dumai
12. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Palu
13. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Kupang
14. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Biak
15. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong
16. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Manokwari
17. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sampit
18. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke
19. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Poso
20. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Palangkaraya
21. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Ternate
22. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Yogyakarta
23. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya

Ditjen Tenaga Kesehatan

1. Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten
2. Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang
3. Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado
4. Politeknik Kesehatan Kemenkes Gorontalo
5. Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak
6. Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram

7. Politeknik Kesehatan Kemenkes Riau
8. Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu
9. Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangkaraya
10. Politeknik Kesehatan Kemenkes Samarinda
11. Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang
12. Politeknik Kesehatan Kemenkes Mamuju
13. Politeknik Kesehatan Kemenkes Ambon
14. Politeknik Kesehatan Kemenkes Ternate
15. Politeknik Kesehatan Kemenkes Sorong
16. Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura
17. Balai Pelatihan Kesehatan Mataram
18. Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta 1
19. Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta 3
20. Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya

Ditjen Kesehatan Masyarakat

1. Balai Besar Labkesmas Manado
2. Balai Besar Labkesmas Banjarbaru
3. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala
4. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Papua
5. Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabumbu
6. Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tanah Bumbu
7. Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Baturaja

Ditjen Farmalkes

Loka Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru

Pelaksanaan Kegiatan Survei Kepatuhan Interaksi

Diawali penentuan lokus penilaian dan pembuatan *timeline* kegiatan. Dilanjutkan dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan penguatan secara daring oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik. Selanjutnya dilakukan pengambilan data survei lapangan, pengolahan data, analisis dan rekomendasi perbaikan sesuai butir instrumen penilaian.



Dok. Kegiatan Sosialisasi Kegiatan Monev Kepatuhan Interaksi Pelayanan Publik



Survei BKK Kupang



Survei Poltekkes Maluku



Survei RSKO Jakarta



Pemberian Penghargaan Kepatuhan Interaksi

Rekrutmen surveyor untuk pelaksanaan kepatuhan interaksi pelayanan publik menggunakan jasa pihak ketiga. Surveyor yang akan berperan sebagai tamu misteri (*mystery guest*) mendapatkan pelatihan oleh konsultan. Pengetahuan terkait instrumen dan objek UPT menjadi bekal ketika turun ke lapangan. Pada saat turun ke lapangan, surveyor didampingi staf Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaan penilaian kepatuhan interaksi layanan, surveyor melakukan penyamaran menjadi masyarakat umum yang membutuhkan informasi atau menjadi pasien atau yang mengamati langsung proses pelayanan publik secara rahasia.

Setiap titik UPT pengamatan dilakukan oleh minimal 1 orang petugas dari pihak ketiga dan 1 pendamping. Khusus rumah sakit yang memberikan pelayanan kepada banyak konsumen, maka petugas melakukan 2 kali pengamatan rahasia yakni pelayanan di waktu pagi dan siang. Sedangkan untuk jenis pelayanan lainnya akan menyesuaikan, karena jumlah konsumen yang mendapat layanan lebih sedikit. Sebagian besar pelayanannya dilakukan secara *online*.

Sosialisasi Program ke SDM Institusi Layanan UPT

Program penilaian kepatuhan interaksi pelayanan publik yang sudah dibakukan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 33 tahun 2019 ini sudah disosialisasikan melalui Surat Edaran Sekertaris Kementerian Kesehatan. Dalam edaran tersebut menjelaskan mekanisme penilaian dan rentang waktu penilaian yang sudah ditetapkan.

Selain itu, sosialisasi juga dilakukan kepada unit pelaksana teknis (UPT) melalui pertemuan yang diselenggarakan Satker pembina eselon atau, UPT sendiri atau Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, baik secara *offline* maupun *online*. Dalam sosialisasi ini juga diberikan alat penilaian/*tools*/borang yang dapat UPT pelajari dan melakukan penilaian secara mandiri.

Pelatihan Berkala

Sebelum melakukan penilaian, UPT harus mendapat pelatihan terlebih dahulu, khususnya para pimpinan UPT terkait, sehingga para pimpinan dapat mensosialisasikan/melatih seluruh karyawan yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat atau karyawan pendukung. Saat pelatihan para pimpinan UPT menyusun rencana aksi perbaikan pelayanan publik. Rencana aksi itu disepakati sudah harus diterapkan minimal 3 bulan setelah pelatihan.

Selanjutnya, UPT tersebut akan mendapat kunjungan monitoring evaluasi secara rahasia oleh SDM yang terdiri dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dan Satuan kerja pembina di atasnya. Kalau yang di monev rumah sakit, maka satker yang terlibat adalah Sekretariat Direktorat Pelayanan Kesehatan.

Kemudian hasil monev dipaparkan dihadapan manajemen dan pimpinan UPT pada hari terakhir kunjungan. Petugas juga memberikan beberapa catatan dan rekomendasi perbaikan pelayanan selanjutnya. Rekomendasi disertai dengan hasil temuan beberapa interaksi layanan yang untuk mendapat perhatian untuk perbaikan.

Alat Penunjang Penilaian

Dalam melakukan penilaian, surveyor harus membawa alat penunjang yang dapat memperlancar pelaksanaan penilaian. Alat tersebut berupa alat perekam suara, perekam gambar, surat tugas dan Surat Perjalanan Dinas dari Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Alat kelengkapan penunjang penilaian ini harus disiapkan oleh setiap petugas yang sudah mendapat surat tugas penilaian sebelum turun ke lapangan melaksanakan penilaian kepatuhan. Petugas juga harus mempersiapkan perencanaan pergi dan pulang, berupa tiket perjalanan dan penginapan yang sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian

a. Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target:

- 1) Telah dilakukan *workshop*, pembinaan, pendampingan pelayanan publik secara *online* dan *offline* dengan narasumber KemenPANRB dan Ombudsman RI
- 2) Pembinaan langsung kepada UPT oleh unit utama sebagai pembina
- 3) Dukungan pimpinan dan jajaran UPT dalam mendukung kegiatan Interaksi Kepatuhan Layanan Publik.
- 4) Pembinaan kepada unit layanan publik yang akan menjadi sampel penilaian kepatuhan standar pelayanan publik.

b. Permasalahan

- 1) Belum optimalnya komitmen dari beberapa pimpinan UPT, maupun belum optimalnya pembinaan dari unit eselon I bekerja sama dengan Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
- 2) Adanya perubahan/rotasi pimpinan, maupun perubahan SOTK di Kementerian Kesehatan sehingga perlu pengulangan *workshop* pimpinan.
- 3) Belum optimalnya komitmen unit layanan publik yang menjadi sampel penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Ombudsman.

c. Pemecahan Masalah

- 1) Perlu penguatan pembinaan dari unit eselon I bekerja sama dengan Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, dengan disesuaikan anggaran untuk mencapai target tahunan.
- 2) Dilakukan pemetaan awal dan *self-assessment* untuk UPT yang akan disurvei.
- 3) Penilaian terhadap UPT dengan menambahkan 10% dari total target yang akan dicapai.

- 4) Meningkatkan pembinaan dan penguatan kepatuhan standar pelayanan publik kepada unit layanan publik yang menjadi sampel penilaian Praktek Baik Pelayanan Publik.

d. Rencana Tindak Lanjut

- 1) Melakukan optimalisasi pembinaan terhadap UPT dengan membuat program bersama dengan unit eselon I terkait.
- 2) Melakukan pemetaan dan berkoordinasi dengan unit eselon I sehingga UPT terkait dapat melakukan *self-assessment* terlebih dahulu dengan indikator yang ada.
- 3) Mengupayakan pelaksanaan survei kepatuhan interaksi pelayanan publik setelah lokus mempersiapkan diri dengan perbaikan layanan publiknya.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan standar pelayanan publik kepada unit layanan publik yang akan menjadi sampel penilaian Praktek Baik Pelayanan melalui Program Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) mandiri institusional.

2. PELAKSANAAN KEGIATAN PENDUKUNG INDIKATOR PENDUKUNG KEGIATAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik tidak hanya berfokus pada pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan, tetapi juga melaksanakan berbagai kegiatan yang tercantum dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Kesehatan. Kegiatan tersebut dapat memiliki hubungan langsung dengan capaian IKK atau bersifat tidak langsung, namun tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap tujuan strategis organisasi secara keseluruhan. Indikator pendukung yang dimaksud mencerminkan elemen-elemen tambahan yang berperan dalam memperkuat capaian. Indikator pendukung yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

STRATEGI KOMUNIKASI

1. Media Monitoring di Media Massa dan Media Digital dan Analisis Pemberitaan

Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes mempunyai berbagai tugas, yang salah satunya melakukan pengelolaan opini publik dan manajemen isu. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka perlu dilakukan pemantauan isu media atau media monitoring, baik pada media massa maupun media sosial.

Guna melaksanakan salah satu tugasnya dalam mengelola isu, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik membutuhkan bantuan alat/*tools* media monitoring yang dapat mengamati dan mengolah *big data*. Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes menyadari bahwa perkembangan teknologi komunikasi tidak terhindarkan, di mana perkembangan ini dapat

mempengaruhi informasi dan isu yang diterima dan berkembang di masyarakat. Dengan berlangganan *tools* yang dapat mendeteksi dan mengantisipasi secara dini isi dari sebuah artikel, berita atau naskah berita, iklan media massa, hingga percakapan di media sosial. Isinya dapat berkaitan dengan suatu peristiwa, menyangkut siapa, mengapa bisa terjadi, sumber daya publik yang berkaitan, kebijakan, dan dampak apa yang dapat terjadi atau harus diantisipasi, serta hal lainnya. Dengan menggunakan *tools* media monitoring diharapkan Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. Adapun prosesnya sebagai berikut:

- a) Menggunakan media monitoring online *tools* untuk media massa, bekerja sama dengan PT. Binokular Media Utama. Perangkat ini dapat diakses melalui <https://kemenkes.binokular.net/signin>. Selain digunakan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik selaku admin utama, perangkat ini juga dapat digunakan oleh para pejabat fungsional Hubungan Masyarakat di unit utama lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai user untuk mengolah data media monitoring sesuai kebutuhannya masing-masing.
- b) Menggunakan media monitoring *online tools* untuk media sosial bekerja sama dengan PT. Tritunggal Anjaya Pratama. Perangkat ini dapat diakses melalui <https://analytics.astramaya.id/user/login>. Tools ini juga dapat diakses oleh pengguna di luar Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik guna membantu unit utama/satuan kerja terkait dalam memantau perkembangan percakapan warganet di media sosial.
- c) Berbagai berita dan isu yang termonitor diolah, dianalisis, dan dilaporkan secara berkala (harian pagi dan sore, mingguan, bulanan dan tahunan).
- d) Monitoring dan sistem peringatan dini juga dilakukan, jika terdapat isu-isu negatif. Disampaikan melalui WhatsApp dan email.
- e) Untuk isu-isu khusus tertentu, penyedia jasa *tools* media monitoring bersama tim Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik menyiapkan laporan media monitoring khusus.
- f) Kegiatan ini dilaksanakan bulan Januari s.d. Desember 2024

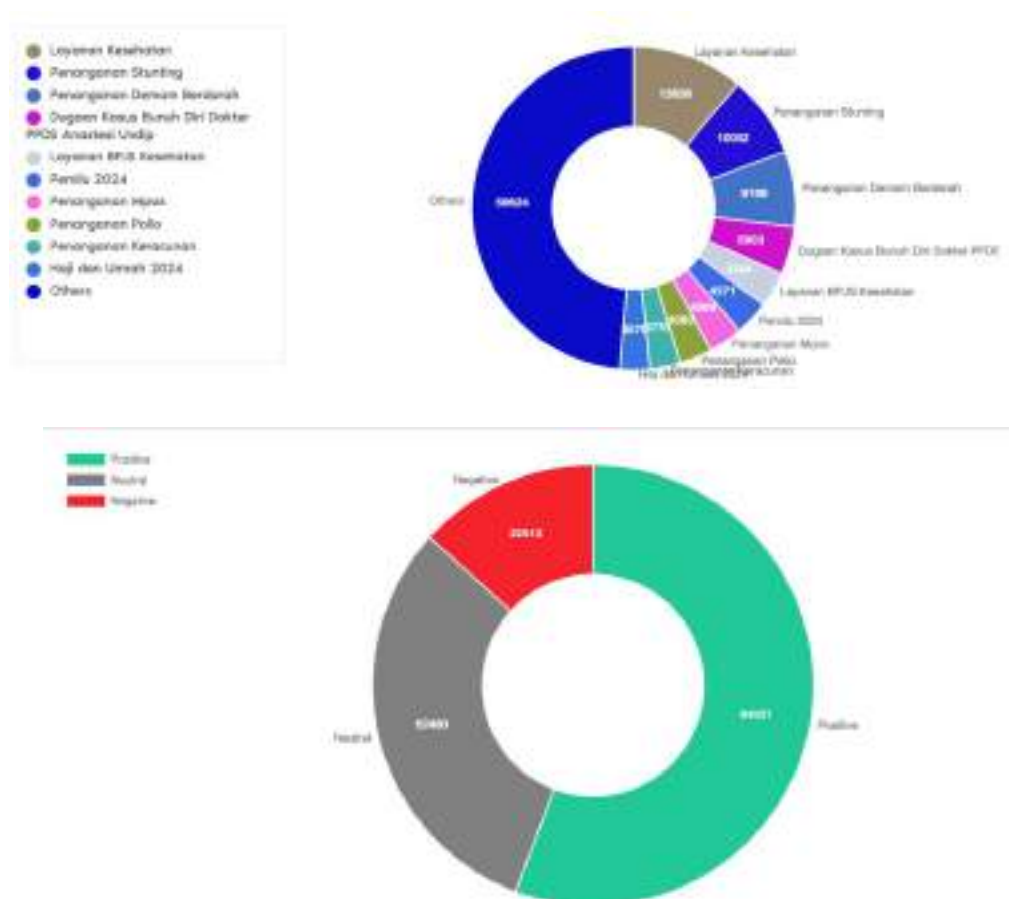
Dengan mengimplementasikan proses tersebut, kegiatan media monitoring tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai dasar untuk menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif dan responsif. Adapun hasil/keluaran kegiatan tersebut adalah:

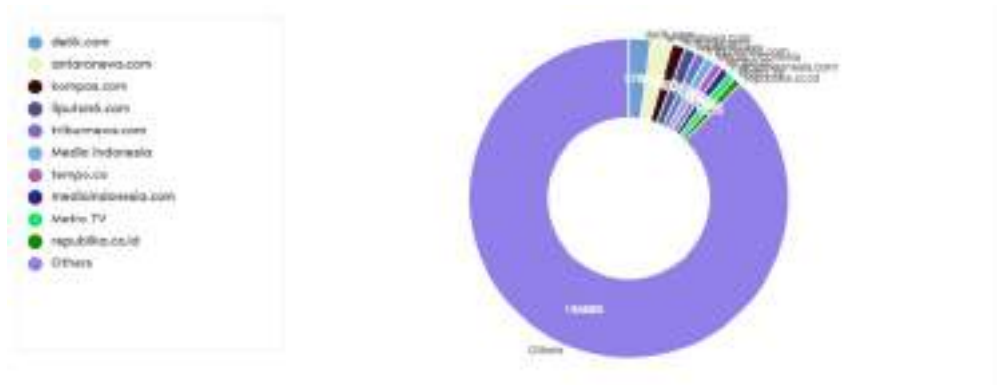
- a) Laporan Media Monitoring Media Massa (Cetak, Online, TV, dan Radio) selama bulan Januari – Desember tahun 2024:

- 480 laporan media monitoring harian (2 laporan pagi-sore dalam 1 hari)
 - 48 laporan media monitoring mingguan
 - 12 laporan media monitoring bulanan
- b) Laporan Monitoring Media Sosial (X.com, Facebook Fanpage, Instagram (*hashtag*), YouTube, dan Media *Online*) selama bulan Januari - Desember 2024:
- 480 Laporan harian monitoring media *online* dan media sosial (2 laporan pagi-sore dalam 1 hari)
 - 48 Laporan media monitoring mingguan
 - 12 Laporan media monitoring media *online* dan media sosial bulanan
- c) Laporan Media Monitoring Isu Khusus sebanyak 28 laporan media monitoring isu khusus kesehatan lainnya (Januari-Desember 2024). Laporan Media media monitoring khusus untuk memantau isu tertentu yang berpotensi memberikan sentimen negatif.
- d) Agenda Setting *biweekly* dengan hari kesehatan atau isu yang sedang berkembang untuk membahas rencana komunikasi per dua minggu. Agenda *setting* bulan Januari-Desember 2024 sebanyak 24 bahan/materi.
- e) Isu-isu yang dipantau pada periode Januari s.d. Desember ini 2024 di media massa, yakni:
- Berdasarkan monitoring media massa isu kesehatan dan Kementerian Kesehatan pada periode Januari s.d. Desember 2024, terdapat total 169.324 pemberitaan. Dari jumlah tersebut, isu negatif mendapatkan proporsi terendah dengan 22.513 berita (13%). Sedangkan isu positif mendapatkan proporsi tertinggi dengan 94.331 berita (55,7%) dan isu netral sebanyak 52.480 berita (31%).
 - Secara umum, isu Layanan Kesehatan menjadi isu terpanas (*hot issue*) di berbagai media. Terdapat 5 topik berita (*news trend*) yang mendapatkan proporsi tertinggi, yaitu Layanan Kesehatan; Penanganan Stunting, Penanganan Demam Berdarah; Dugaan Kasus Perundungan Dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro, dan Layanan JKN (BPJS Kesehatan). Totalitas isu Layanan Kesehatan, Penanganan Stunting, dan Pemilu 2024, merupakan isu-isu terbanyak dengan sentimen positif. Sedangkan isu Dugaan Kasus Perundungan Dokter PPDS Undip, dan menjadi isu dengan tonalitas negatif tertinggi.

- Selama periode Januari hingga Desember tahun 2024, terdapat **20.500 media** yang mengangkat isu seputar kesehatan dan Kementerian Kesehatan, di mana media detik.com menjadi media online yang mendominasi pemberitaan.
- Pada periode yang sama, 10 media tertinggi yang melakukan peliputan didominasi oleh media online. Media cetak dengan pemberitaan tertinggi adalah Media Indonesia (1.640 Berita). Media Elektronik dengan pemberitaan tertinggi adalah Metro TV (1.368 Berita).
- Narasumber yang paling banyak dikutip oleh media, yakni: Budi G. Sadikin (Menteri Kesehatan), Mohammad Syahril (Juru Bicara Kemenkes), dan Siti Nadia Tarmizi.

Topik Berita





Isu-isu yang dipantau pada tahun 2024 di media sosial yaitu:

- Pada periode Januari – Desember 2024, total *mention* pada topik yang dipantau yaitu Kemenkes RI (330.951), Menkes RI (84.637), Penyakit Tidak Menular (19.751) dan UU Kesehatan (192.375) serta beberapa isu lain yang dipantau khusus dalam 'kontainer' tertentu dengan total sebanyak 627.714 *mention*.
- Secara umum, totalitas percakapan bulan Januari s.d. Desember 2024 adalah positif sebanyak 306.634 (34.45%), netral 169.57(19.05%), dan negatif 413.803 (46.49%).

All Media

No	Project	Negative	Positive	Neutral	Total
1	Kemenkes RI	135,963 (41.13 %)	113,863 (34.44 %)	80,752 (24.43 %)	330,588
2	Menkes RI	39,100 (46.24 %)	33,974 (40.17 %)	11,492 (13.59 %)	84,566
3	Perundingan PPDS	126,445 (48.11 %)	106,560 (40.54 %)	29,816 (11.34 %)	262,821
4	PTM	1,896 (9.81 %)	18,782 (85.07 %)	1,049 (5.32 %)	19,727
5	UU Kesehatan	110,399 (57.41 %)	36,455 (18.44 %)	46,458 (24.16 %)	192,312

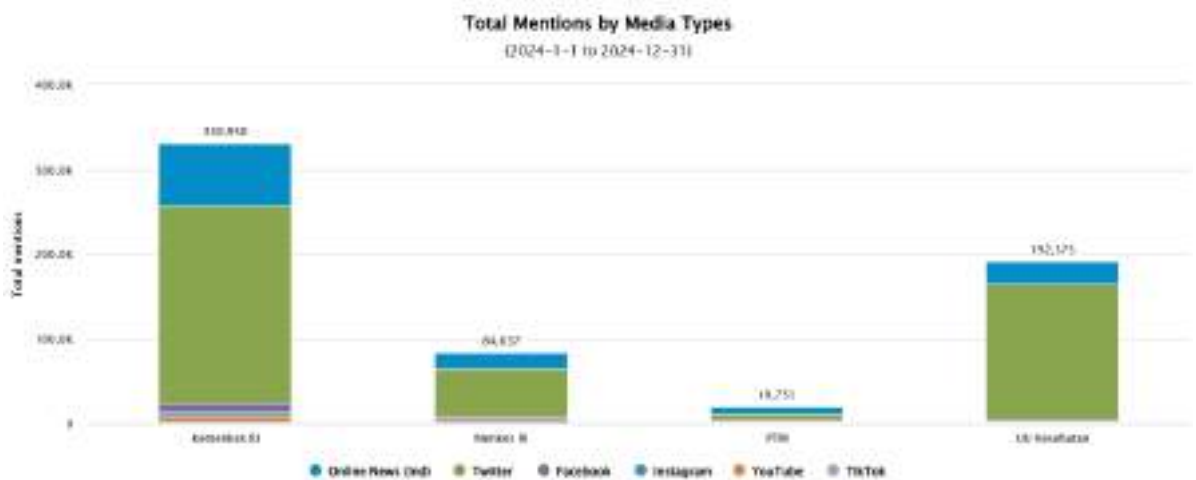
- Isu seputar langkah preventif Kemenkes RI dalam kasus DBD, pemerintah Indonesia menerapkan *Hospital Based* untuk Pendidikan Dokter Spesialis, program Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dalam BPJS Kesehatan, PIN Polio, diadakannya Rakerkesnas 2024, program naturalisasi dokter menjadi isu dengan mayoritas bersentimen **positif**. Sementara top isu **negatif** diantaranya pada isu penolakan penyebaran nyamuk *Wolbachia*, penolakan RPP turunan UU Kesehatan karena merugikan industri tembakau, polemik penghapusan sistem kelas pada BPJS Kesehatan, penolakan program naturalisasi dokter, polemik penggunaan stetoskop tidak ilmiah dan Menkes ancam dokter, Perundingan PPDS, Korupsi Alat Kesehatan, Pemberhentian Sepihak KTKI.
- X.com menjadi *platform* media sosial yang berisi konten dan *mention* terbanyak dalam semua isu kesehatan yang dipantau. Diikuti oleh Facebook, Instagram dan YouTube.

Influencer yang sering terlibat dalam percakapan dan memiliki *engagement* tinggi diantaranya @DrEvaChaniago, @TedInvestigasi, @ZainalM_Prof, @MurtadhaOne1, @DokterTifa, @ardisatriawan, @TedInvestigasi, @incitu, @Heraloebss dan @dhemit_is_back.

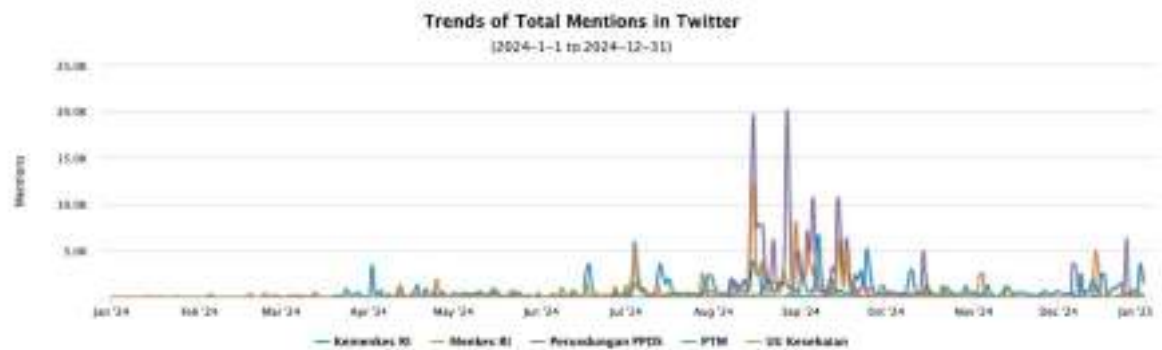
- e) Puncak tren percakapan untuk setiap isu terjadi pada bulan yang berbeda. Isu Perundungan PPDS dan UU Kesehatan terjadi pada Agustus dan September 2024. Sementara untuk topik Menkes RI dan PTM pada Juni. Pada puncak tren beberapa topik isu yang muncul seputar Kasus *Bullying* PPDS Undip, Penolakan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) Tembakau, dan Naturalisasi dokter asing.

No	Project	Online News (Ind)	Twitter	Facebook	Instagram	YouTube	TikTok	Total
1	Kemendesa RI	73,669	232,911	9,922	5,302	6,475	2,682	330,851
2	Menkes RI	19,668	57,437	4,721	886	2,260	275	84,637
3	Perundungan PPDS	25,935	233,196	1,381	155	1,714	543	262,826
4	PTM	8,489	6,160	2,921	1,565	588	0	19,751
5	UU Kesehatan	28,013	169,486	3,029	553	1,254	0	192,375

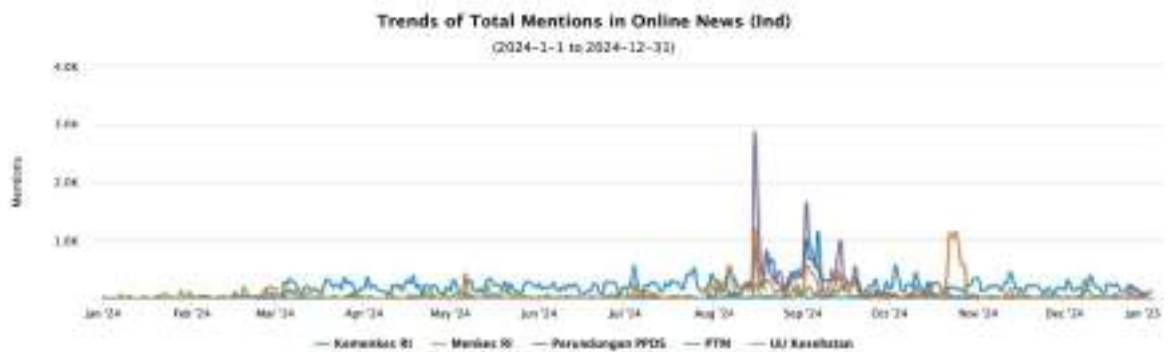
Volume Pemberitaan dan Percakapan



Tren Percakapan



Tren Pemberitaan



Top Influencer

Topik Kemenkes RI

No.	Avatar	Account Name	Followers	RT + Reply Count	Retweets	Replies
1		@indonesiaku	535	21,724	26,849	76
2		@investigative	38,902	1,887	7,962	8
3		@hyunehkari	116,843	8,756	9,913	145
4		@rachitka	3,559	9,528	9,535	8
5		@ChikaChika	14,748	4,370	4,243	27

Topik Menkes RI

No.	Avatar	Account Name	Followers	RT + Reply Count	Retweets	Replies
1		@DrGuaChuang	74,740	5,337	3,205	122
2		@Tebuswajaya	904	2,389	2,279	37
3		@WulanSatya	85,533	2,331	2,228	3
4		@Miki_Annisa1701	183,567	1,846	1,348	8
5		@MatsudaOne1	32,342	1,780	718	1,053

Topik PTM

No.	Avatar	Account Name	Followers	RT + Reply Count	Retweets	Replies
1		@Bani_21	18,080	919	818	8
2		@DrGuaChuang	74,740	639	676	8
3		@Dovand_Ferd	2,225	543	540	8
4		@relika	3,801	384	381	8
5		@dendabawati	4,136	363	355	8

Topik UU Kesehatan

No.	Avatar	Account Name	Followers	RT + Reply Count	Retweets	Replies
1		@BambangSugiti	328	26,278	26,180	98
2		@Dhoni_k_bak	28,240	6,623	6,614	12
3		@publika124	307	6,662	6,660	2
4		@DrGuaChuang	74,740	6,381	6,281	20
5		@relika	3,775	6,228	6,227	3

2. Media Coaching bagi Pejabat/Pimpinan Kementerian Kesehatan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 70 menjelaskan bahwa ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya. Dalam rangka pengembangan kompetensi dan keterampilan ASN Kementerian Kesehatan, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik melakukan kegiatan *media coaching* bagi pejabat/pimpinan Kementerian Kesehatan melalui pembekalan teori dan

praktik kiat dan teknik *public speaking* serta *media handling* dalam berhadapan dengan media/wartawan.

Sebagai pejabat publik dan figur yang akan menjadi perwakilan dari institusinya, diperlukan untuk bisa mengenal dan memahami bagaimana sebenarnya cara kerja media, baik itu media massa maupun sosial media. Dengan demikian, kepercayaan publik perlu dibangun dan dijaga agar tidak terjadi kepanikan dalam masyarakat. Hal ini hanya dapat terjadi jika para perumus dan pelaksana kebijakan mendapatkan referensi dan pemahaman yang benar terkait urgensi komunikasi publik dalam pengambilan keputusan, serta memiliki kapasitas yang mumpuni terkait dengan bidang komunikasi.

Oleh karena itu dibutuhkan keahlian dan kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan baik dan mudah dipahami, sehingga tidak menimbulkan potensi *blunder* yang bisa menyebabkan isu bagi lembaga bersangkutan. Dapat disimpulkan pelaksanaan Media *Coaching* bagi Pejabat/Pimpinan Kementerian Kesehatan bertujuan untuk:

- a) Mengetahui dan meningkatkan kapasitas pejabat dalam menghadapi wartawan/media, baik Menkes, Wamenkes, eselon I, eselon II, Juru Bicara, maupun pejabat lainnya di lingkungan Kantor Pusat Kemenkes.
- b) Menyiapkan para pejabat/pimpinan di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat menjadi komunikator yang efektif, agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh pemangku kepentingan yang beragam, mulai dari media, masyarakat, pemerintah, legislatif, sektor swasta dan lainnya.

Dalam rangka memberikan pembekalan teori dan praktik kepada peserta mengenai kiat dan teknik *media handling*, *personal branding*, dan *public speaking* yang pada umumnya terdapat 4 komponen utama kegiatan ini yaitu:

- a) *Review*: menggali pengalaman peserta dalam menghadapi media;
- b) Simulasi wawancara *doorstop*, wawancara via telepon, dan *talkshow* di media penyiaran;
- c) Penyampaian materi tentang landscape media dan komunikasi efektif yang disampaikan oleh redaktur media dan pakar komunikasi.
- d) Evaluasi dan penyampaian umpan balik bagi peserta.

Selama bulan Januari s.d. Desember 2024, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik telah menyelenggarakan dua kali Media *Coaching* bagi Pimpinan Kementerian Kesehatan:

a) **Media Coaching untuk Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan**, drg. Arianti Anaya, MKM.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2024, dengan narasumber Riko Anggara dengan materi *Media Relations*, Ayu Diah Pasha memberikan materi *Personal Branding*. Untuk memastikan efektivitas sesi *Media Coaching*, berikut saran dan rekomendasi :

1. Peserta diharapkan mampu merubah mindset saat berhadapan dengan media dalam kondisi apapun.
2. Mulai membiasakan diri untuk berbicara dengan intonasi, *phrasing* dan artikulasi yang tepat pada saat berhadapan dengan media.
3. Untuk mendukung visualisasi di hadapan kamera, peserta diharapkan dapat memperhatikan postur, gestur dan mimik wajah sehingga apa yang diinformasikan dapat tersampaikan dengan baik.

Rekomendasi pelatihan lain untuk menambah dan memperkaya kompetensi dan karakter Peserta antara lain :

1. *Influential Communication Technique*
2. *Handling Difficult Situation & Objection*

Observasi selama kelas berlangsung :

1. Peserta menunjukkan semangat dan antusiasme serta berperan aktif dalam setiap sesi kegiatan.
2. Peserta mau terlibat dua arah dalam menyampaikan pendapat maupun bertanya terkait materi pada saat sesi berlangsung hingga akhir sesi kegiatan.
3. Peserta memiliki pikiran terbuka dalam menerima materi serta mau menerima *feedback* yang disampaikan oleh narasumber.
4. Peserta menunjukkan progres yang positif terhadap pengetahuan dan keterampilan sebelum maupun setelah sesi kegiatan.



b. Media Coaching untuk Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik (Aji Muhawarman, ST, MKM) dan Juru Bicara Kementerian Kesehatan (drg. Widyawati, MKM).

Narasumber pada kegiatan ini yaitu Dentamira Kusuma dengan materi *Media Coaching Clinic* dan Adisty Larasati yang memberikan materi *Personal Branding* baru Pejabat Publik Kemenkes. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2024. Pelatihan media ini dirancang untuk Kemenkes RI guna meningkatkan keterampilan media, khususnya *Media Coaching Clinic* dan *Personal Branding* untuk Pejabat Publik Kemenkes. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan tim Kemenkes RI dalam menyampaikan dan menanggapi berbagai isu dengan efektif, membangun reputasi baik, serta membentuk citra positif pejabatnya. Dengan keterampilan yang diperoleh, diharapkan Kemenkes RI dapat berkomunikasi dengan lebih baik serta memiliki partisipasi publik yang baik.

Pejabat perlu menguasai strategi komunikasi yang tepat agar setiap pesan yang disampaikan mampu membangun kepercayaan dan menjaga kredibilitas kementerian. Diperlukan juga *personal branding* pejabat yang kuat dan autentik serta pendekatan advokasi cermat guna menjaga reputasi institusi.





3. Komunikasi Risiko

International Health Regulations (IHR) 2005 menyebutkan bahwa komunikasi risiko adalah salah satu kapasitas inti yang perlu dibangun dan dijalankan oleh semua negara anggota *World Health Organization* (WHO) sebagai bagian dari perjanjian global untuk memperkuat sistem nasional dan global guna mendeteksi dan menanggapi ancaman bahaya kesehatan masyarakat.

Di tingkat nasional telah dilakukan penilaian oleh WHO terhadap implementasi IHR tersebut pada aspek komunikasi risiko melalui *Joint External Evaluation* (JEE) pada tahun 2017. Salah satu temuan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti adalah melakukan penguatan kapasitas komunikasi risiko hingga tingkat daerah/lokal. Oleh karena itu, Tim Kerja Strategi Komunikasi melaksanakan kegiatan terkait komunikasi risiko, sebagai berikut:

a) Komunikasi Risiko dalam Merespon Wabah/KLB di daerah

Sebagai respon terhadap temuan kasus lumpuh layu akut (Polio) tipe 2 yang terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sleman, dan DIY, Kementerian Kesehatan mengeluarkan Surat Edaran No. 1051 pada 29 Desember 2023. Surat edaran ini merinci rencana Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub PIN) Polio di seluruh Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kekhawatiran muncul karena selama ini banyak terjadi kesalahpahaman dan stigma seputar imunisasi polio secara khusus dan imunisasi rutin secara umum. Kementerian menekankan, peran media massa dalam memberikan edukasi tentang polio, mempromosikan imunisasi, perubahan gaya hidup, dan menghilangkan stigma. guna meningkatkan kapasitas media dan jurnalis dalam pemberitaan tentang KLB Polio di Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY dan mendorong peliputan media yang positif untuk meningkatkan pengetahuan publik tentang pentingnya imunisasi rutin dan bahaya yang dihadapi anak-anak ketika mereka tidak sepenuhnya diimunisasi (kematian, disabilitas). Merespon hal tersebut, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik diundang sebagai

narasumber untuk memberikan materi komunikasi risiko pada acara *Media Briefing*, *Journalist Training* dan *Influencer Gathering* pada 18 Januari 2024 di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur. selain itu juga menjadi pemateri pada acara Workshop Komunikasi Risiko dalam Merespon Kejadian Polio di Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 2024 di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Semarang.

b) Penguatan Kapasitas Komunikasi Risiko

International Health Regulations (IHR) 2005 menyebutkan bahwa komunikasi risiko adalah salah satu kapasitas inti yang perlu dibangun dan dijalankan oleh semua negara anggota *World Health Organization* (WHO) sebagai bagian dari perjanjian global untuk memperkuat sistem nasional dan global guna mendeteksi dan merespon ancaman bahaya kesehatan masyarakat. Berdasarkan Kepmenkes No. HK.02.02/Menkes/273/2016 tentang Kelompok Kerja Ketahanan Kesehatan Global di Lingkungan Kementerian Kesehatan bahwa Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat (sekarang Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Rokom Yanlik) sebagai representasi *technical area* komunikasi risiko selaku Ketua Bidanganya, melakukan upaya penguatan komunikasi risiko dalam bentuk lokakarya swakelola.

Oleh karena itu, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik melakukan kegiatan Penguatan Kapasitas Komunikasi Risiko sebagai salah satu upaya penguatan manajemen komunikasi risiko di pusat dan daerah. Selama bulan Januari s.d. Desember 2024, telah dilakukan kegiatan Penguatan Kapasitas Komunikasi Risiko di tiga Provinsi (Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau, dan Provinsi Kalimantan Selatan). Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka (*full day meeting*) dengan dihadiri sekitar 30 orang yang terdiri dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Biro Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Daerah, dan lain-lain) serta Kementerian/Lembaga, lintas sektor atau mitra terkait yang terlibat atau penanggung jawab kegiatan komunikasi di daerah tersebut, seperti Palang Merah Indonesia, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Adapun kegiatan yang dilakukan, sebagai berikut:

Diawali dengan pembukaan oleh Ketua Tim Kerja Strategi Komunikasi Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, dilanjutkan penyampaian materi *Best Practice* Respon Cepat Penanganan KLB/Wabah Penyakit di Provinsi oleh Dinas Kesehatan Provinsi; peserta diberikan materi literasi digital dengan narasumber Praktisi Literasi Digital; materi

Komunikasi Risiko untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan diberikan kepada peserta dengan narasumber Ketua Tim Kerja Strategi Komunikasi, Kemenkes. Kegiatan dilanjutkan setelah isihoma dengan workshop komunikasi risiko. Peserta dibagi menjadi dua/tiga kelompok (disesuaikan dengan jumlah peserta) untuk menyusun *standby statement* disesuaikan dengan topik Kesehatan yang berbeda-beda berdasarkan isu prioritas di setiap provinsi. Kegiatan diakhiri dengan presentasi hasil diskusi dari setiap kelompok.



4. Dukungan Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik pada kegiatan penguatan kapasitas kesehatan dalam komunikasi risiko

Sebagai upaya penguatan komunikasi risiko di tingkat pusat dan daerah Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik beberapa kali juga diundang sebagai narasumber untuk memberikan materi komunikasi risiko guna meningkatkan kapasitas bagi SDM Kesehatan. Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik diundang menjadi fasilitator secara daring bagi 15 angkatan (untuk periode Januari s.d. Desember 2024) pada kegiatan Pelatihan Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan dengan memberikan materi Manajemen Komunikasi Risiko pada tanggap darurat krisis kesehatan dengan peserta Tim Cadangan Kesehatan (TCK). Kegiatan ini difasilitasi oleh 7 Balai Pelatihan Kesehatan/Balai Besar Pelatihan Kesehatan (DKI Jakarta, Mataram, Batam, Makassar, Ciloto dan Cikarang).

Selain itu, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik berkontribusi dalam penyusunan modul dan pedoman pada materi Komunikasi Risiko dan Pemberdayaan Masyarakat terkait

Penanggulangan Krisis Kesehatan, Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Imunisasi.

5. Dukungan AIHSP untuk Penguatan Komunikasi Risiko

Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP) adalah program kerja selama 5 tahun yang dibiayai oleh *Australia's Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT). AIHSP merupakan kolaborasi antara Kementerian Kesehatan (Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular), Kementerian Pertanian dan pihak terkait untuk mencapai tujuan akhir program, yaitu memperkuat sistem ketahanan kesehatan di Indonesia untuk mencegah, mendeteksi dan merespons keadaan darurat kesehatan hewan dan masyarakat yang diakibatkan oleh penyakit menular yang muncul; dan meningkatkan koordinasi nasional dalam menanggapi ancaman kesehatan nasional, regional, dan global.

Guna meningkatkan kapasitas komunikasi risiko, baik di tingkat pusat dan daerah, AIHSP bekerjasama dengan Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Semarang menyusun modul pelatihan Komunikasi Risiko dan melaksanakan *Training of Trainers* (ToT). Selama tahun 2024, telah berlangsung dua kali kegiatan ToT, tanggal 1 sd 3 April dan 21 sd 23 Juli 2024 bertempat di Bapelkes Semarang, Kampus Salaman. Adapun peserta ToT ini yaitu para Pengelola Program Pelayanan Kesehatan dan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Penanganan Hoaks Kesehatan

Pada 2017, Mastel melakukan penelitian terkait berita bohong atau yang kerap disebut sebagai berita hoaks. Mereka mendapati fakta bahwa 62.10% berita hoaks adalah berupa teks, dan media yang umum digunakan untuk menyebarkannya adalah media sosial serta aplikasi pesan/*chatting*. Keberadaan berita hoaks pada umumnya sangat meresahkan dan merugikan masyarakat.

Data Kementerian Kominformasi (saat ini KomDigi) hingga 31 Desember 2023 menemukan adanya 12.547 isu hoaks, yang didominasi oleh hoaks sebesar 2.357 isu kesehatan. Isu-isu hoaks tersebut menyebar di berbagai platform digital, seperti Facebook, Instagram, X.com, dan YouTube. Hoaks yang menyangkut kesehatan memang marak beredar di kalangan masyarakat. Begitu masifnya penyebaran hoaks kesehatan di masyarakat, menjadi salah satu ancaman di dalam kelancaran pembangunan kesehatan nasional. Guna mengedukasi publik tentang cara mencari informasi yang benar dan melawan informasi yang sudah beredar dengan informasi yang benar dan kredibel, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik

Kemenkes tidak secara aktif sendiri bekerja, akan tetapi *support system* yang dikomandoi oleh Kementerian Kominfo dan organisasi yang aktif memerangi peredaran hoaks seperti Mafindo, cek fakta media, *United Nations Children's Fund* (UNICEF), *Information and Communication Technology* (ICT) *watch* dan komunitas lainnya.

Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik belum memiliki tools khusus dalam menjangring hoaks, khususnya yang beredar di kanal media sosial (X.com, Facebook, Instagram, TikTok, dan sebagainya). Berdasarkan hal tersebut, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik bekerjasama dengan salah satu media *online* (tirto.id) yang mempunyai lisensi/diverifikasi oleh Jaringan Pengecekan Fakta Internasional (IFCN), tirto.id memiliki tools khusus untuk menjangring hoaks seputar kesehatan dan melakukan manajemen antihoaks kesehatan agar masyarakat mendapatkan informasi yang sebenarnya.

Terdapat beberapa hoaks yang telah ditangani oleh langsung Kemenkes maupun lembaga lainnya, khususnya yang terkait *Corona Virus Disease* (COVID-19), vaksinasi COVID-19, imunisasi, maupun disinformasi yang mengatashamakan institusi Kemenkes dan Menkes.

Ke depan diperlukan strategi baru di dalam internal Kemenkes, penyediaan sumber daya, penguatan kapasitas dan kerja sama yang lebih erat dalam penanganan hoaks kesehatan. Termasuk untuk kapasitas pelaksana kegiatan komunikasi/kehumasan di daerah.



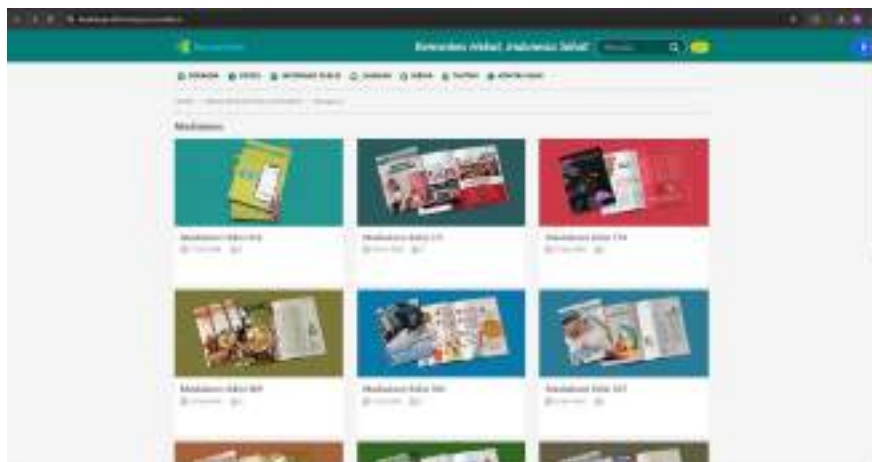
PRODUKSI KOMUNIKASI

1. Produksi Majalah Mediakom

Perkembangan media sosial tidak serta merta mematikan media konvensional seperti majalah. Majalah yang dulu hadir dalam bentuk cetak bertransformasi menjadi majalah digital atau *e-magazine*. Sejak pertama kali terbit pada tahun 2006 hingga akhir tahun 2024 sebanyak 173 edisi majalah mediakom telah diterbitkan. Capaian semester II tahun 2024 Tim Kerja Produksi Komunikasi telah memproduksi 12 terbitan *e-magazine* mediakom edisi 161 Januari 2024 s.d Edisi 173 Desember 2024, dengan catatan edisi Desember saat ini sedang dalam tahapan *finishing* majalah.

Mediakom terbit setiap bulan yang memiliki rubrik seperti: Media Utama, Serba Serbi, Info Sehat, Peristiwa, Profil, Kilas Internasional, Galeri Foto, Aku Tahu, Pojok Info, Iklan, Isi Piringku, Resensi Buku, dan Resensi Film.

E-magazine Mediakom diterbitkan sebulan sekali atau 12 Edisi dalam setahun dalam bentuk PDF dan dapat diunduh melalui website Kemenkes yaitu: <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/> atau <https://kemkes.go.id/id/category/mediakom>



Edisi Mediakom Tahun 2024

Terdapat 13 rubrik dalam setiap edisi mediakom. Jumlah artikel Majalah Mediakom yang diproduksi selama tahun 2024 sebanyak 384 artikel. Terdiri dari Artikel Media Utama, Peristiwa, Info sehat, maupun berita kesehatan terkini lainnya. Untuk menerbitkan majalah Mediakom, dilakukan rapat redaksi sebanyak 2 kali setiap edisinya, yaitu untuk menentukan topik dilaksanakan pada rapat pertama, dan melakukan *review* pada rapat kedua.

Adapun rubrik yang terdapat pada Mediakom dengan rata-rata jumlah artikel pada rubrik tersebut adalah sebanyak : Etalase (1 Artikel); Info Sehat (3 Artikel); Media Utama (4

Artikel) ; Peristiwa (6 Artikel); Galeri Foto (2 Artikel); Serba-serbi (2 Artikel); Kilas Internasional (2 Artikel); Profil (1 Artikel); Resensi Buku (1 Artikel); Referensi Film (1 Artikel); Iklan (5 Infografis); Aku Tahu (2 Infografis); Pojok Info (1 Infografis); dan Isi Piringku (1 artikel).



Tampilan Mediakom Edisi 162 Januari 2024 s.d. Edisi 173 Desember 2024

Bulan	Edisi	Judul	Jumlah Artikel
Januari	162	Sehat dengan Vitamin A	33 Artikel
Februari	163	Agar Gigi dan Mulut Sehat	30 Artikel
Maret	164	Berhari Raya yang Sehat	33 Artikel
April	165	Demam Berdarah Masih Mengintai	32 Artikel
Mei	166	Kisah Penolong Persalinan	31 Artikel
Juni	167	Membentengi Anak dari Stunting	34 Artikel
Juli	168	Menangkal Penyakit Berat	34 Artikel
Agustus	169	Agar MPox Tak Meluas	34 Artikel
September	170	Agar Mikroba Tak Perkasa	33 Artikel
Oktober	171	Memperkuat Layanan Primer	30 Artikel
November	172	Integrasi Data Ke Dalam Satusehat	31 Artikel
Desember	173	Merangkul Penyandang Disabilitas Sehat	29 Artikel

*) untuk Mediakom Edisi Desember sedang dalam proses produksi dan akan dipublikasi akhir Desember 2024

Penghargaan InMA untuk Mediakom

Selain itu pada tanggal 30 April 2024 Mediakom juga mendapatkan penghargaan dari SPS atau Serikat Perusahaan Pers (SPS) untuk kategori *Inhouse Magazine Award* (InMA) 2024 kategori Majalah Digital Internal Institusi. Majalah Bulanan Kementerian Kesehatan RI Mediakom berhasil memperoleh penghargaan *Gold Winner* dan *Silver Winner* pada gelaran SPS Awards ke -15 yang diadakan pada Selasa malam (30/4). Penghargaan tersebut diberikan untuk kategori Kategori Indonesia *Inhouse Magazine Awards* (InMA) sub Kategori *Inhouse E-Magazine* Institusi Terbaik atau *The Best of Government's E-Magazine*. Edisi yang terpilih menjadi penerima *Gold Winner* adalah Mediakom Edisi 151/Februari 2023 dengan judul sampul “Jaga Ginjal Kita”. Sementara edisi yang terpilih menjadi penerima *Silver Winner* adalah Mediakom Edisi 152/Maret 2023 dengan judul sampul ‘Anak-Anak Luar Biasa.’



Kelas Menulis Mediakom

Dalam rangka meningkatkan kualitas penulisan di majalah Mediakom sekaligus menjangkau talenta baru penulis dari pranata Hubungan Masyarakat (Humas) yang ada di lingkungan Kementerian Kesehatan, Mediakom juga mengadakan kegiatan seminar secara *hybrid* setiap bulannya selama 12 bulan dengan nama kegiatan Kelas Menulis Mediakom.

Mengangkat tema yang berbeda-beda tiap bulannya, kelas menulis Mediakom menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan Pranata Humas yang bekerja di lingkungan Kemenkes, selain mengangkat tema yang menarik dan aplikatif untuk pekerjaan kehumasan, Mediakom juga bekerjasama dengan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya untuk bisa berbagi ilmu setiap bulannya.

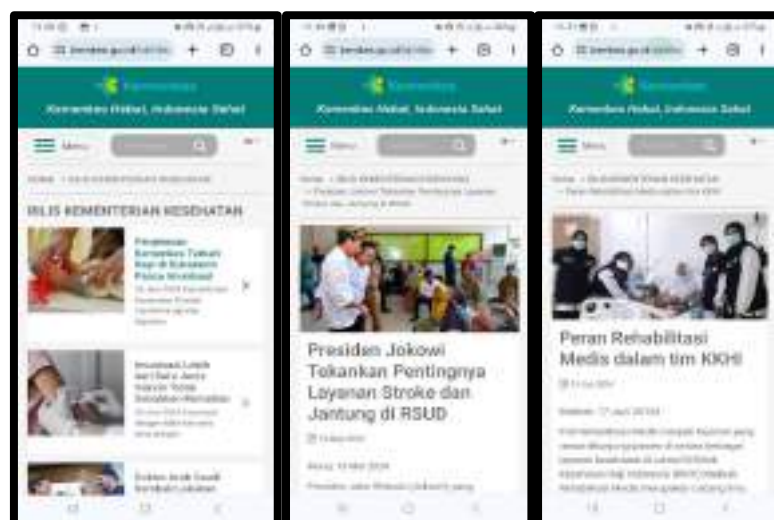


2. Publikasi Berita di Website Kemenkes

Publikasi pemberitaan terkait dengan Kebijakan dan Program Kementerian Kesehatan kepada masyarakat telah dikembangkan melalui situs resmi Kementerian Kesehatan yaitu sehatnegeriku.kemkes.go.id sejak tahun 2015. Publikasi ini bertujuan memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat dan media massa serta meningkatkan jumlah pemberitaan positif di media massa.

Selama dua semester (Semester I & II) bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2024 sebanyak 528 rilis yang telah diterbitkan di website sehatnegeriku.kemkes.go.id dan kemkes.go.id. Rilis yang diterbitkan terdiri dari pemberitaan kegiatan Kementerian Kesehatan yang merupakan implementasi dari 6 pilar transformasi Kesehatan yaitu Transformasi Layanan Primer, Transformasi Layanan Rujukan, Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, Transformasi Pembiayaan Kesehatan, Transformasi SDM Kesehatan, dan Transformasi Teknologi Kesehatan.

Informasi mengenai pemberitaan tersebut disiarkan melalui rilis sebagai bahan bagi wartawan atau Masyarakat umum. Tulisan yang diangkat sangat beragam, mulai dari perkembangan kebijakan dan peraturan terkini Kementerian Kesehatan, perjalanan dan capaian enam pilar transformasi kesehatan, Berbagai kegiatan Kementerian Kesehatan seperti kunjungan Menkes dan Presiden dalam rangka peninjauan fasilitas pelayanan Kesehatan di sejumlah RSUD dan berbagai informasi berita lainnya seperti launching atau peluncuran SKI (Survei Kesehatan Indonesia) 2023 yang memuat Gambaran kondisi Kesehatan di Indonesia, peninjauan layanan KJSU pada fasilitas layanan sekunder, perkembangan penyakit terkini, serta berita lainnya seperti mengenai Kondisi Kesehatan jamaah haji serta peran TKHI dalam mendukung kesehatan jamaah haji.





Hasil rilis pemberitaan yang di unggah di halaman sehatnegeriku.kemkes.go.id

Selama rentang dua semester rilis pemberitaan yang ditayangkan melalui halaman kemkes.go.id maupun sehatnegeriku.kemkes.go.id di seringkali menjadi acuan wartawan dari berbagai media untuk menulis berita. Berikut *breakdown* jumlah rilis yang dihasilkan dalam satu semester.

Rilis	Jumlah Posting Rilis dalam Bulan						Total Posting
	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	
Jumlah	34	34	36	32	50	46	232

Rilis	Jumlah Posting Rilis dalam Bulan						Total Posting
	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	
Jumlah	53	50	41	32	50	46	232

3. Siaran Radio Kesehatan

Siaran Radio Kesehatan memiliki 9 program yaitu *Talkshow* Keluarga Sehat, *Talkshow* Sehat Wicara, *Talkshow* Eksklusif, Siaran Sehat, Berita Kesehatan, Iklan Layanan Masyarakat, Adlips, Konten Platform Digital & Artikel Web, dan *Podcast*.



software pendukung untuk penjadwalan program siaran

a. Siaran Sehat

Siaran sehat dilakukan secara daring bersama dokter Reisa, membahas tentang kesehatan ataupun berbagi info tentang kesehatan dan secara *live* melalui Instagram Kementerian Kesehatan.



b. Berita Kesehatan

Berita Kesehatan yang dibacakan untuk pendengar Siaran Radio Kesehatan update 3-4 berita setiap hari yang dibagikan melalui Siaran Radio Kesehatan.



c. **Talkshow Keluarga Sehat**

Talkshow Keluarga sehat merupakan *talkshow* yang membahas masalah kesehatan di sekitar lingkungan keluarga dan dapat diikuti oleh berbagai kalangan, dibawakan dengan ringan serta melibatkan peran serta dan interaksi (tanya jawab) antara narasumber dan pendengar yang dapat ikuti melalui kanal Instagram.



d. **Talkshow Eksklusif**

Talkshow bersama Tim Dokter Staf Komunikasi Kemenkes membahas isu atau tips kesehatan. Disiarkan setiap hari Jumat pukul 14.00-15.00 WIB. Dapat diakses melalui Instagram *live* Kemenkes RI dan *streaming* di website radiokesehatan.kemkes.go.id



e. *Talkshow Sehat Wicara*

Talkshow bersama para *stakeholder* Kementerian Kesehatan RI membahas isu kesehatan. Waktu *talkshow* disesuaikan dengan jadwal narasumber selama 60 menit. Dapat diakses melalui Aplikasi Radio Kesehatan, streaming radiokesehatan.kemkes.go.id dan IG Live Kemenkes RI



f. Iklan Layanan Masyarakat

Iklan Layanan Masyarakat (ILM) berisi tetang pesan singkat berupa informasi, atau seruan dan atau ajakan terkait Kesehatan yang disiarkan minimal 27 kali setiap harinya oleh penyiar radio SRK.

No	ISI ILM	Waktu Siaran	Saluran Siaran	Biaya
1	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
2	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
3	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
4	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
5	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
6	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
7	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
8	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
9	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
10	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
11	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
12	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
13	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
14	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
15	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
16	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
17	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
18	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
19	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
20	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
21	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
22	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
23	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
24	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
25	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
26	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
27	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
28	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
29	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
30	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
31	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
32	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
33	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
34	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
35	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
36	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
37	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
38	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
39	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
40	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
41	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
42	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
43	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
44	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
45	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
46	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
47	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
48	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
49	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000
50	ILM - KEMERDEKAAN	10:00:00:00:00:00:00	SRK - Radio Kesehatan	1.000.000

sound file ILM radio

g. Adlibs

Adlibs adalah siaran *live* yang dilakukan di studio SRK dengan menyediakan *script* dan berikut contoh format *script* yang biasanya dibuat oleh penyiar radio SRK.

ADLIBS	
Edisi	PERPUSTAKAAN KEMENKES RI
Pukul	08:00, 11:00, 12:00, 15:00, 17:00 WIB (5x/hari)
Agenda Setting	-
Voice over dapat mengembangkan kreatifitasnya dalam membaca adlibs.	
Opening	Sobat sehat, buat kamu yang suka membaca buku atau yang lagi cari – cari buku khusus tentang kesehatan? Apalagi kamu yang sedang membutuhkan suasana baru dalam membaca buku? Karena situasi pandemi Covid 19 seperti saat ini. Nah, kamu bisa ke Perpustakaan Kementerian Kesehatan, yang masih memberikan pelayanan disaat pandemi ini. Melalui www.perpustakaan.kemkes.go.id
The Point	Jadi sobat sehat, Kementerian Kesehatan memiliki perpustakaan khusus yang dapat di manfaatkan oleh pegawai Kementerian Kesehatan dan juga untuk masyarakat umum yang suka membaca. Layanan yang tersedia di Perpustakaan Kementerian Kesehatan itu diantaranya adalah layanan baca tempat, sirkulasi, referensi, dan layanan anak. Selain ada koleksi buku kesehatan tersedia juga koleksi non kesehatannya, seperti buku baru atau best seller, buku anak, novel, majalah, dan juga koran. Oh iya! Semua produk karya cetak dan karya rekam satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan wajib lho, mencantumkan <i>International Standar Book Number (ISBN)</i> dan Katalog Dalam Terbitan (KDT), sesuai dengan yang diamanatkan Permenkes No. 38 tahun 2015 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Lingkungan

naskah Adlibs

h. Konten Platform Digital & Artikel Web

Untuk konten digital Spotify diupload melalui akun Spotify SRK, sedangkan konten untuk YouTube diupload melalui akun YouTube Kementerian Kesehatan RI.



i. Podcast (KEMENCAST)

Podcast adalah siaran yang menampilkan obrolan seputar kesehatan yang dibawakan secara santai dan disiarkan secara langsung maupun *taping* melalui akun YouTube resmi Kementerian Kesehatan RI, dengan menghadirkan narasumber yang

kompeten. Untuk Podcast *live*, melibatkan penonton untuk bertanya langsung kepada narasumber dengan pertanyaan yang dapat diajukan melalui kolom komentar.

Podcast Kementerian Kesehatan sendiri bernama **Kemencast** yang bermakna Kementerian Kesehatan Podcast.



Sepanjang Januari - Desember tahun anggaran 2024, berikut jumlah produksi komunikasi di Siaran Radio Kesehatan (SRK)

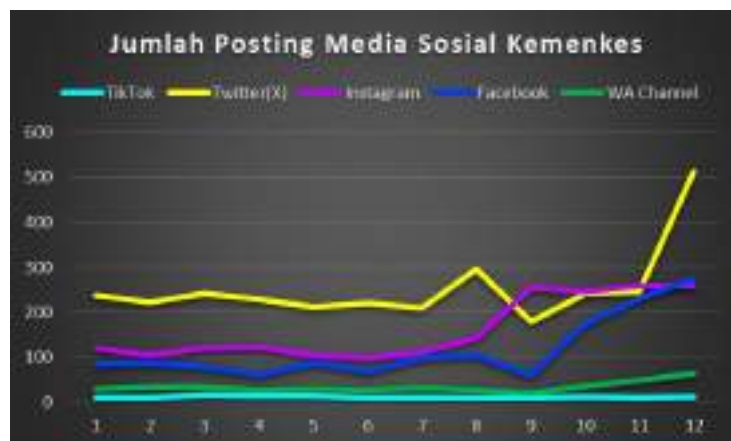
Program Siaran	Bulan					
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
Siaran Kesehatan	62	59	58	69	64	56
Berita Kesehatan	119	81	76	99	114	98
<i>Talkshow Keluarga Sehat</i>	21	18	19	14	15	15
<i>Talkshow Exclusive</i>	4	2	5	5	4	4
Siaran Sehat/Sehat Wicara	5	4	5	3	4	5
ILM	528	532	483	529	529	460
Adlibs	112	113	107	159	121	89

Konten Platform Digital & Artikel Web	4	1	21	8	2	3
Podcast	2	3	8	1	5	2
Jumlah siaran	857	813	779	887	860	738

Program Siaran	Bulan					
	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Siaran Kesehatan	65	61	59	65	51	55
Berita Kesehatan	118	85	102	114	111	107
<i>Talkshow</i> Keluarga Sehat	19	17	18	17	15	15
<i>Talkshow Exclusive</i>	4	5	5	5	4	3
Siaran Sehat/Sehat Wicara	5	4	2	4	3	5
ILM	529	391	483	529	492	506
Adlibs	92	74	78	92	102	3
Konten Patform Digital & artikel Web	3	1	0	3	4	3
Podcast	7	3	5	8	4	3
Jumlah siaran	835	638	749	836	785	700

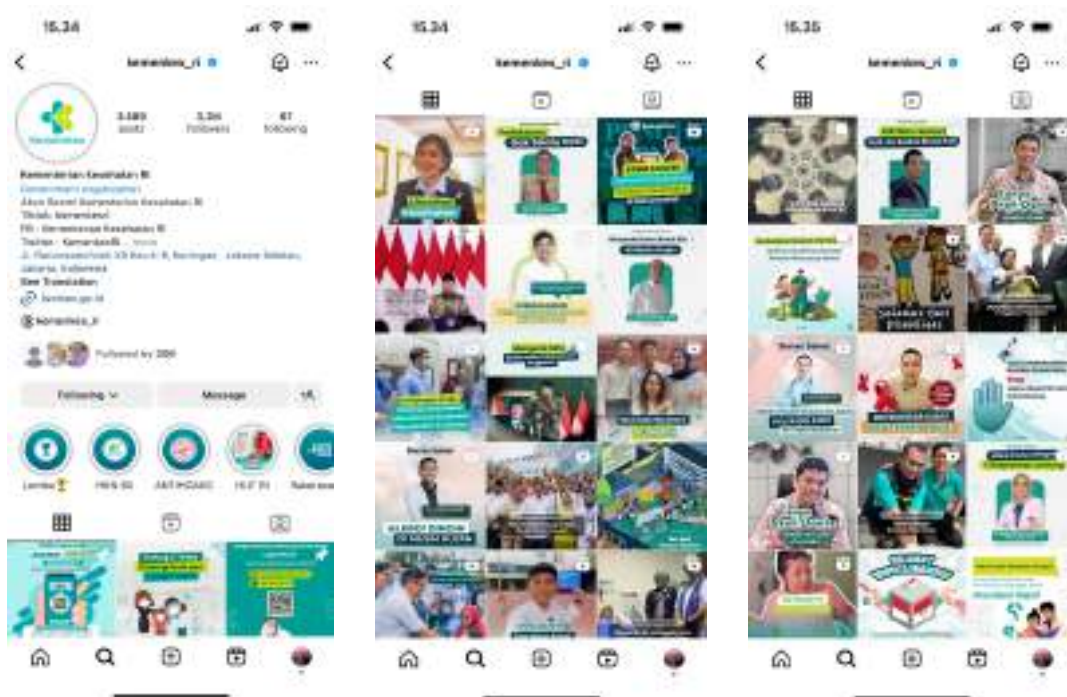
3. Pengelolaan Media Sosial

Tim Kerja Produksi Komunikasi juga mengelola berbagai media sosial diantaranya Instagram, X.com, TikTok, YouTube, dan Facebook, serta WA Channel. Setiap media sosial dikelola untuk menyampaikan berbagai informasi di Kementerian Kesehatan mulai dari kegiatan pimpinan (Menkes, Wamenkes, dan Setjen), ucapan hari-hari besar, serta informasi dan edukasi seputar isu kesehatan lainnya.



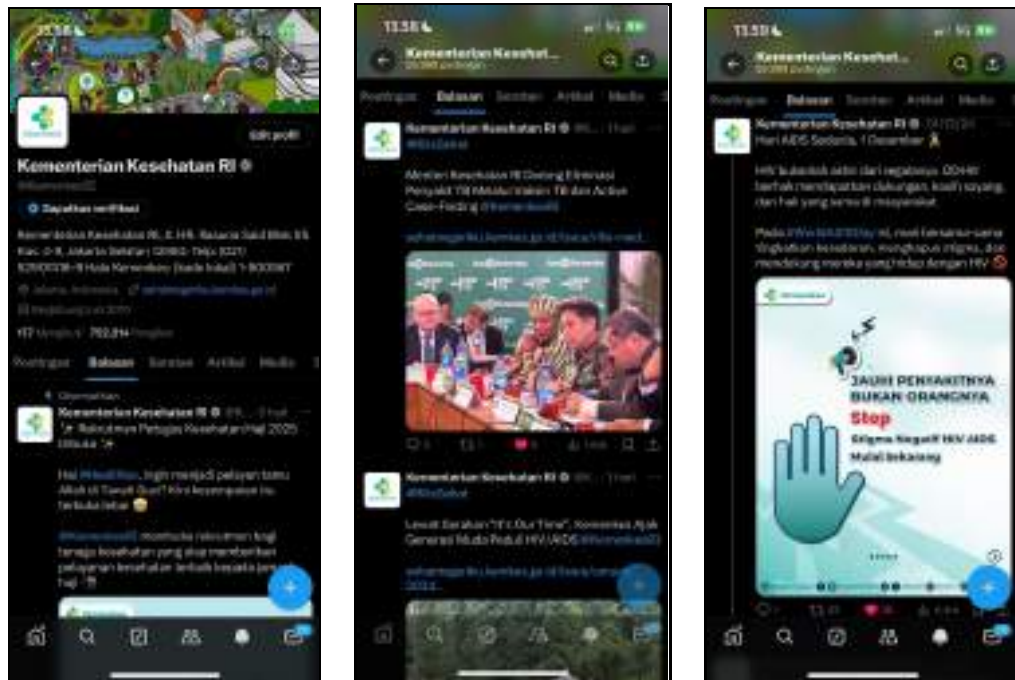
a. Instagram

Tim kerja produksi Komunikasi mengelola media sosial Instagram dengan alamat resmi @kemenkes_ri. Akun Instagram Kemenkes RI berisi informasi video *vertical* dan konten informasi visual berupa poster. Konten video *vertical* berisi tentang recap atau *highlight* kegiatan Menkes atau Wamenkes atau konten video edukasi dan informasi kesehatan. Hingga akhir November 2024 akun instagram @kemenkes_ri telah diikuti lebih dari 3,2 juta pengikut dan memposting lebih dari 3,7 ribu postingan.



b. X.com (Twitter)

X.com atau Twitter Kemenkes merupakan saluran yang digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna media sosial melalui cuitan atau hashtag tertentu. Akun X atau X.com Kemenkes adalah @kemenkesRI dan memiliki sekitar 752 ribu lebih pengikut. Akun X sangat berguna untuk memantau isu kesehatan dan membentuk serta mengetahui opini publik terkait isu kesehatan tertentu.



c. TikTok

Akun TikTok adalah akun yang menyasar generasi Z dan Alpha, yang sangat menyukai informasi kesehatan yang cenderung ringan dan tidak terlalu serius. Akun TikTok Kemenkes adalah @kemenkesri dengan jumlah pengikut sebanyak 301.9 ribu pengikut. Konten yang terdapat pada akun TikTok @kemenkesri adalah konten ringan dan pendek yang umumnya disajikan dalam bentuk audio video.



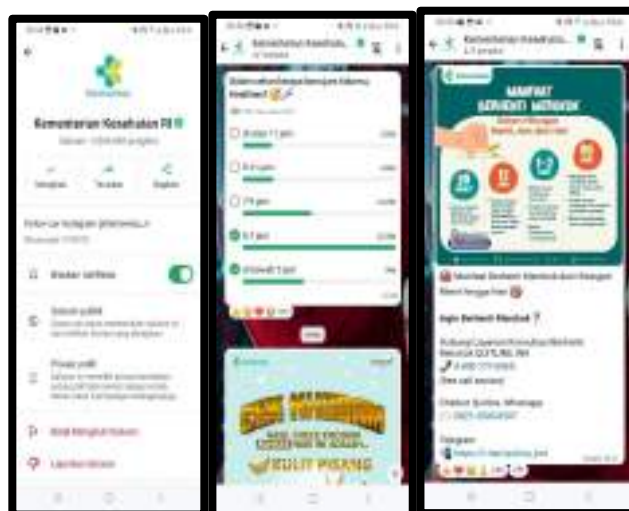
d. Facebook

Facebook adalah salah satu media sosial pertama. Meski ekosistem Facebook tidak seramai Instagram dan TikTok, Kemenkes RI juga memiliki akun Facebook dengan nama Kementerian Kesehatan RI. Informasi yang disajikan dalam akun Facebook pada umumnya duplikasi informasi akun Instagram yang disampaikan dengan narasi pengantar yang berbeda mengikuti gaya media sosial Facebook.



e. WA Channel

WA Channel adalah akun sosial media baru yang terbentuk pada 12 September 2023. Akun ini merupakan akun informasi satu arah yang terdapat dalam WhatsApp di mana pengguna hanya bisa memberikan reaksi pada setiap postingan yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Meski terhitung media sosial baru, akun WA Channel Kemenkes dengan nama Kementerian Kesehatan RI telah memiliki lebih dari 3 juta pengikut.



Tim Kerja Produksi Komunikasi secara aktif melakukan produksi dan publikasi berbagai konten pada berbagai ragam media sosial tersebut dengan mengikuti karakteristik media sosial tersebut. Berikut jumlah posting publikasi pada berbagai akun media sosial Kemenkes RI selama periode Januari-Desember 2024.

Jenis Media Sosial	Jumlah Posting dalam Bulan						Jumlah Posting
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	
TikTok	10	10	16	13	13	10	72
X.com (X)	237	222	242	228	212	219	1360
Instagram	120	105	121	122	104	98	680
Facebook	85	88	80	62	87	69	402
WA Channel	29	33	33	26	29	26	176

Jenis Media Sosial	Jumlah Posting dalam Bulan						Jumlah Posting
	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	
TikTok	10	10	10	11	10	12	63
X.com (X)	210	296	179	242	246	512	1685
Instagram	111	141	254	245	260	259	1270
Facebook	98	104	59	174	231	275	941
WA Channel	32	27	20	36	48	64	227

Penghargaan *Public Relation (PR)* Indonesia

Selain itu pada tanggal 7 Maret 2024 Media Sosial Kementerian Kesehatan RI juga mendapatkan penghargaan dari PR Indonesia untuk kategori Kanal Digital yaitu *Silver Winner* dalam sub Kategori Media Sosial Instagram, *Silver Winner* dalam Sub Kategori Media Sosial TikTok, dan *Bronze Winner* untuk Sub Kategori Media Sosial YouTube.

4. Publikasi Q&A melalui *Live Instagram*

Pada tahun 2024, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik memanfaatkan media sosial untuk tetap memberikan konten dengan informasi yang ringan dan membuka ruang diskusi bersama *netizen* secara *live*. Program yang dilaksanakan yaitu Instagram Live Q&A dengan tema Isi piringku, Makanan Pendamping ASI (MPASI), Makanan minuman manis, *Rotavirus*, Pendengaran, Kesehatan Gigi, Sehat saat mudik, Talasemia, DBD Anak, Berat badan bayi,

Diabetes Anak, Imunisasi Anak, Kesehatan Olahraga, Kesehatan Mata, Penggunaan Antibiotik, dan Kesehatan Jiwa.



Live Q&A	Bulan						Jumlah
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	
	2	2	2	1	1	2	

Live Q&A	Bulan						Jumlah
	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	
	2	1	1	2	2	1	

5. Workshop Konten Media Digital

Workshop Konten Media Digital diselenggarakan bagi insan Rumah Sakit Vertikal (RSV) Kemenkes untuk optimalisasi promosi dan pemasaran RSV Kemenkes berikut layanan unggulannya melalui media digital. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong para dokter, tenaga kesehatan, dan *staff management* di seluruh RSV agar memiliki *basic skill* untuk menjadi *content creator*. Kegiatan ini juga diharapkan dapat membangun *branding image* dan meningkatkan pendapatan Rumah Sakit.



Workshop Konten Media Digital sudah dilakukan di 21 RSV: RS Mata Cicendo, RS Hasan Sadikin, RS Fatmawati, RS Soeharto Heerdjan, RS H. Adam Malik, RS Wahidin, RS Tadjuddin, RS Mata Makassar, RS Kariadi, RSAB Harkit, RSJPD Harkit, RS M. Hoesin, RS Rivai Abdullah, RSJ Radjiman, RSK Dharmais, RSUP Ngoerah, RS Persahabatan, RSO Soeharso, RSUP Surakarta, RS Sardjito, dan RS Soerojo.

Workshop	Bulan						Jumlah
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	
	2	6	1	0	0	4	13

Workshop	Bulan						Jumlah
	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	
	0	0	3	3	0	2	8

6. Komik Animasi

Komik animasi merupakan ilustrasi yang dibuat dan disebarluaskan melalui akun media sosial Kemenkes yang bertujuan memberikan ucapan dan informasi dalam kemasan visual yang lebih segar untuk menjaga *engagement follower* media sosial. Komik animasi merupakan bentuk inovasi tim kerja produksi komunikasi yang ditujukan untuk menjangkau dan menjaga *engagement* audiens pengikut akun media sosial kemenkes. Komik animasi terdiri ucapan dalam bentuk ilustrasi, isu kesehatan yang dikemas dalam bentuk yang ringan dan disampaikan secara singkat dengan durasi tidak lebih dari dua menit. Berikut contoh postingan Komik animasi pada berbagai akun media sosial Kemenkes.



Berikut jumlah produksi Komik animasi sepanjang tahun 2024 yang diposting di media sosial Kemenkes:

Jenis Komik Animasi	Jumlah Posting Komik Animasi dalam Bulan						Jumlah Posting
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	
Ilustrasi	1	2	1	1	1	0	6
Animasi pendek	4	5	0	2	2	1	14

Jenis Komik Animasi	Jumlah Posting Komik Animasi dalam Bulan						Jumlah Posting
	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	
Ilustrasi	0	1	5	6	1	1	14
Animasi pendek	1	0	1	0	1	0	3

Selain animasi pendek, produksi Komunikasi juga melakukan fasilitasi pembuatan V-Card Hari Kesehatan Nasional, dan hari besar keagamaan lainnya untuk Eselon I (Sekretaris Jenderal) dan Wakil Menteri Kesehatan. Berikut V-Card yang diproduksi selama tahun 2024 yang tercatat sampai tanggal 13 Desember 2024, yaitu sebanyak 2 ilustrasi.



Ilustrasi V-Card Wamen dan Sekjen

7. *Live streaming dan Short YouTube*

Live streaming dan *Short YouTube* merupakan bagian sarana amplifikasi dan sosialisasi kegiatan yang dilakukan oleh Kemenkes RI. *Live Streaming* YouTube digunakan untuk mensosialisasikan kegiatan besar seperti acara seminar, pertemuan, atau konferensi pers yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan atau unit Esselon I di bawah Kementerian Kesehatan.

Sementara *Short YouTube* merupakan tayangan di bawah enam puluh detik atau di bawah satu menit yang berisi kutipan pesan-pesan kunci narasumber yang kompeten terkait isu kesehatan tertentu. *Short YouTube* biasanya berupa potongan hasil wawancara narasumber pada berbagai program yang ditayangkan di media sosial Kemenkes seperti Podcast Kemencast atau Siaran SRK.



Live Streaming dan short pada YouTube Kemenkes

JENIS TAYANGAN	Jumlah postingan Per Bulan						Jumlah Posting
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	
Live Streaming	8	7	22	7	19	12	75
Short	24	18	15	30	25	18	130

JENIS TAYANGAN	Jumlah postingan Per Bulan						Jumlah Posting
	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	
Live Streaming	8	7	22	7	19	12	75
Short	24	18	15	30	25	18	130

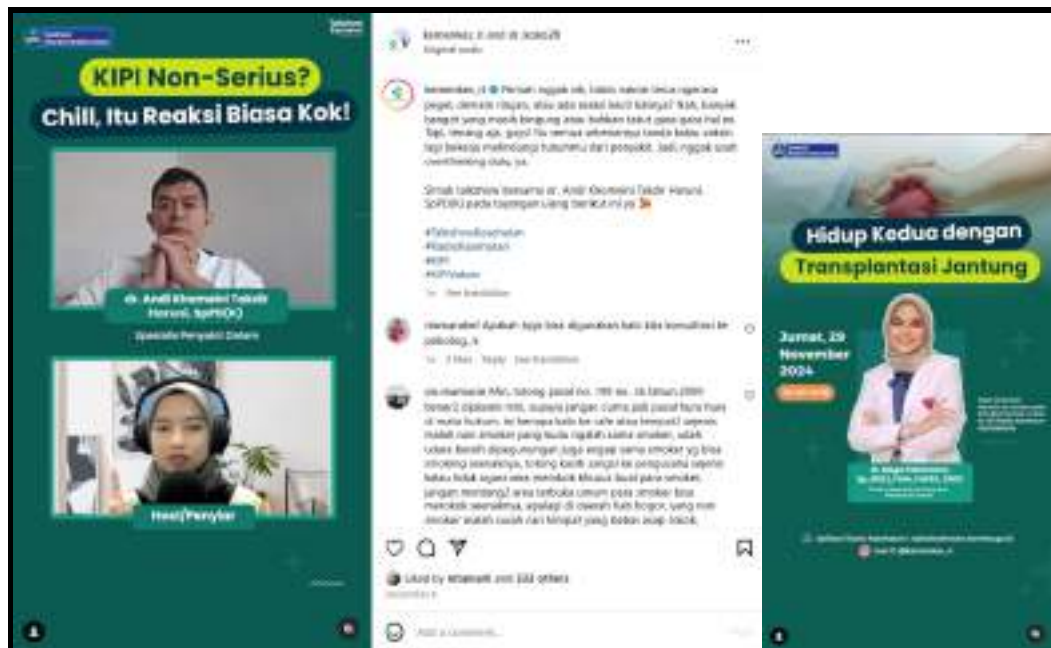
8. *Pelibatan Influencer di Media Digital*

Sejak tahun 2023 dibentuk staf teknis komunikasi transformasi kesehatan dengan nomor SK HK.01.07/MENKES/1425/2023 yang bertugas melakukan sosialisasi terkait transformasi kesehatan, rancangan Undang-Undang Kesehatan, melakukan

komunikasi publik dalam penjelasan isu kesehatan strategis dan sensitif, serta memberikan pandangan kepada Menteri Kesehatan terkait opini publik dalam hal transformasi kesehatan. Adapun nama-nama staf teknis komunikasi transformasi kesehatan yaitu:

1. Dr. Vito Anggarino Damay, SpJP(K), Mkes, AIFO-K, FIHA, FICA, FASCC.
2. Dr. Andi Khomeini Takdir Haruni, SpPD(K).
3. dr. Roy Tanda Anugrah Sihotang, MARS.
4. dr. RA Adaninggar Primadia Nariswari, SpPD.
5. dr. Ngabila Salama, MKM.
6. dr. Alvin Saputra.
7. dr. Makhyan Jibril Al Farabi.
8. dr. Mega Febrianora, SpJP(K), FIHA, FAPSC, CRFC

Berikut adalah jumlah siaran yang dilakukan *influencer* atau pemengaruh yang disampaikan di studio Siaran Radio Kesehatan dan disebarluaskan atau ditayangkan melalui akun media sosial Kemenkes RI.



Tampilan Talkshow bersama Dokter *Influencer*

Nama Dokter Influencer	Jumlah Siaran						Jumlah
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	
Dr. Vito Anggarino Damay				1		1	2
Dr. Andi Khomeini Takdir Haruni							
dr. Roy Tanda Anugrah Sihotang							
dr. RA Adaninggar Primadia Nariswari	1		1	1	1	1	5
dr. Ngabila Salama	2	1	2	1	3	1	10
dr. Alvin Saputra							
dr. Makhyhan Jibril Al Farabi	1		1	1	1		4
dr. Mega Febrianora, SpJP(K), FIHA, FAPSC, CRFC		1	1	1		1	4

Nama Dokter Influencer	Jumlah Siaran						Jumlah
	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	
Dr. Vito Anggarino Damay							
Dr. Andi Khomeini Takdir Haruni					1	1	2
dr. Roy Tanda Anugrah Sihotang							
dr. RA Adaninggar Primadia Nariswari	1		1				2
dr. Ngabila Salama	1	2	2	2	1	1	9
dr. Alvin Saputra							
dr. Makhyhan Jibril Al Farabi	1	2	1	1	1	1	7
dr. Mega Febrianora, SpJP(K), FIHA, FAPSC, CRFC	1	1	1	2	1	1	7

PELIPUTAN DAN DOKUMENTASI

1. Advertorial Berita Kesehatan di Media Cetak dan Elektronik

Untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada publik tentang kebijakan dan program Kemenkes, dilakukan pemuatan advertorial berita kesehatan di media cetak dan



3. Reportase Berita dan Liputan Informasi Berita Kesehatan

Kementerian Kesehatan telah membangun hubungan baik dengan berbagai media nasional maupun internasional. Untuk memfasilitasi media mendapatkan berita terkini bidang kesehatan dari sumber terpercaya, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik mengadakan konferensi pers/ temu media dengan berbagai macam isu/ topik kesehatan. Selain itu, media juga difasilitasi untuk melakukan kunjungan lapangan ke fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, dan lainnya sehingga mereka dapat membuat reportase berita.

Reportase pemberitaan juga dilakukan melalui kegiatan kunjungan tematik media massa, dengan membawa 15 media nasional dan 5 media lokal, yang dilaksanakan pada 8 s.d. 9 Agustus 2024. Kegiatan dimulai dengan pembekalan media yang dilaksanakan di Hotel Santika Premiere Semarang pada 8 Agustus 2024. Selanjutnya, pada 9 Agustus 2024 kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan kegiatan oleh Wakil Menteri Kesehatan di Aula Kantor Bupati Boyolali, yang dilanjutkan dengan kunjungan tematik ke RSUD Pandan Arang, Puskesmas Sawit Boyolali, dan RSUP Dr. Kariadi.

Sepanjang tahun 2024, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik telah mengadakan 73 temu media, dengan jumlah pemberitaan sebanyak 2.368 berita, dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Temu Media	7	4	8	6	6	5	5	6	6	6	8	6
Jumlah pemberitaan	272	366	198	383	237	123	104	114	123	101	187	160



Selain reportase bersama rekan media, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat juga meliput dan mendokumentasikan kegiatan pimpinan Kementerian Kesehatan, yaitu Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Kesehatan, maupun pejabat lainnya yang mewakili Menteri Kesehatan. Output kegiatan dimaksud berupa album foto di situs *Flickr* Sehat Negeriku, dengan tautan <https://www.flickr.com/photos/sehatnegeriku/albums/>.



Rincian rekap publikasi pada *Flickr* tahun 2024

Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Album	83	60	66	44	73	53	65	71	47	55	101	6
Jumlah pemberitaan	681	745	1.104	803	701	1.133	1.250	1.614	1.036	1.225	2.292	2.044

Selama periode Januari hingga Desember 2024, telah dibuat sebanyak 98 album foto, dengan total 14.628 jumlah foto. Seluruh foto-foto dalam situs *Flickr* Sehatnegeriku bisa diunduh dalam resolusi tinggi dan semua dokumentasi kegiatan pimpinan Kementerian Kesehatan diperbarui secara berkala.

Rincian rekap pameran foto tahun 2024

Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Pameran foto	83	60	66	44	73	53	70	70	0	0	170	150

Pada September dan Oktober pameran foto masih menggunakan foto Agustus 2024 yang bertema Lomba 17 Agustus, dan persiapan pameran foto di November dalam rangka HKN ke-60, dengan tema Gerak Bersama Sehat Bersama.

Selain dokumentasi foto, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik juga mempublikasikan video kegiatan pimpinan Kementerian Kesehatan, yaitu Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Kesehatan, maupun video liputan hasil pembangunan kesehatan. Output kegiatan yang dimaksud berupa video liputan, termasuk video live streaming YouTube yang dapat disaksikan pada tautan <https://www.youtube.com/@KementerianKesehatanRI>. Selama kurun waktu satu tahun, video liputan yang diunggah di kanal YouTube Kementerian Kesehatan sebanyak 249 video dan terdapat sebanyak 235 *live streaming* YouTube.

Rekap video liputan dan live streaming youtube tahun 2024

Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Video Liputan YouTube	27	31	24	17	20	15	22	16	19	21	16	21
Live Streaming YouTube	8	7	22	7	19	12	49	3	45	37	3	23



Selain tayangan *live*, rekaman video (*taping*) terhadap pimpinan Kementerian Kesehatan juga dilakukan untuk memenuhi permintaan dari pihak eksternal atau saat pimpinan tidak dapat hadir secara langsung pada suatu acara, juga saat ada kebutuhan tertentu. Berbeda dengan publikasi foto dan video, hasil perekaman video tidak semua dipublikasikan di kanal Kementerian Kesehatan. Beberapa video taping dapat dipublikasikan pada momen tertentu, seperti pada saat hari raya keagamaan. Tercatat telah dilakukan sebanyak 233 perekaman video di tahun 2024.

Rekap taping tahun 2024

Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
<i>Taping</i>	13	13	7	12	11	23	25	18	41	29	18	23



4. Partisipasi Event Pameran Hari Kesehatan Nasional (HKN)

Publikasi foto tidak hanya melalui media *online*, namun juga dilakukan secara *offline* melalui pameran foto. Publikasi foto ini dilakukan secara rutin dipasang di sepanjang selasar lantai 1 dan lantai 2 Gedung Adhyatma. Sementara dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-60, pada 12 sampai 30 November 2024, Biro Komunikasi dan

Pelayanan Publik telah mengadakan pameran foto di lobi dan selasar Gedung Adhyatma lantai 1 dan Gedung Sujudi lantai 1, dengan memasang 120 foto dengan tema Gerak Bersama Sehat Bersama.



PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK

1. Pelaksanaan Pendampingan Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) telah melakukan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Kementerian/Lembaga.

Pada tahun 2024 ini, ORI tengah berproses melakukan pendampingan yang akan dilanjutkan dengan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan terhadap pejabat dan unit pelayanan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Adapun lokus yang terlibat atau yang dinilai oleh Tim ORI adalah, Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Setditjen Pelayanan Kesehatan (Unit Pelayanan Kesehatan/UPK). Tim Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik melakukan rangkaian kegiatan persiapan mulai dari membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan hingga membantu mempersiapkan data dukung sebagaimana yang telah disyaratkan.



Pemberian Apresiasi kepada Para Pimpinan Lokus Evaluasi

2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Mandiri Institusional (PEKPPP Mandiri)

Melalui Surat Edaran Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik kepada 36 UPT yang berada di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk melakukan Praktek baik Penguatan Pelayanan Publik. Adapun pendekatan praktek baik pelayanan publik tersebut pada 6 unsur komponen yang akan dievaluasi mulai Kebijakan Pelayanan Publik, Profesionalisme SDM, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Pengelolaan Pengaduan dan SP4N LAPOR, Inovasi Pelayanan Publik dan Sarana Prasarana. Adapun Lokus PEKPPP Mandiri sebagai berikut:

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

- a. RS Dharmais Jakarta
- b. RSUP Fatmawati Jakarta
- c. RS Paru dr. H.A. Rotinsulu Bandung
- d. RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua
- e. RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
- f. RS Ortopedi Dr. Soeharso Surakarta

Direktorat Jenderal Kefarmasian Alat Kesehatan

- a. Balai Pengamanan Alat Fasilitas Kesehatan Jakarta
- b. Balai Pengamanan alat Fasilitas Kesehatan Surabaya
- c. Balai Pengamanan alat Fasilitas Kesehatan Medan
- d. Balai Pengamanan alat Fasilitas Kesehatan Makassar
- e. Loka Pengamanan Alat Fasilitas Kesehatan (LPAFK) Surakarta
- f. Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPAFK) Banjarbaru

Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

- a. BBKK Makassar
- b. BBKK Soekarno Hatta
- c. BKK Kelas I Panjang
- d. BKK Kelas I Palembang
- e. BKK Kelas I Banjarmasin
- f. BKK Kelas I Kendari
- g. BKK Kelas I Pekanbaru
- h. BKK Kelas II Tembilahan
- i. BKK Kelas II Palu

Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

- a. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya

- b. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarbaru
- c. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Ambon
- d. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Medan
- e. Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Baturaja

Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

- a. BBPK Makassar
- b. BBPK Jakarta
- c. Poltekkes Jakarta I
- d. Poltekkes Jakarta II
- e. Poltekkes Jakarta III
- f. Poltekkes Palembang
- g. Poltekkes Tasikmalaya
- h. Poltekkes Manado
- i. Poltekkes Kendari
- j. Poltekkes Banten

Tahapan PEKPPP Mandiri

- a. Sosialisasi dan lokus mengisi F01 & F03: Maret-28 Juni 2024
- b. Dokumen diterima evaluator : 10-19 Juli 2024
- c. Pleno dan Penetapan PEKPPP Mandiri 23 Juli 2024



Pendampingan PEKPPP Mandiri di BBPK Jakarta

3. Pelaksanaan Penyusunan Indek Pelayanan Publik (IPP) Kemenkes

Untuk kegiatan penyusunan IPP ini, Kemenkes telah menetapkan lokus RSUP dr. Kariadi Semarang sebagai wakil kemenkes tahun 2024. Tahap persiapan RSUP dr. Kariadi sudah mendapat pendampingan dari KemenPANRB, Biro Komunikasi dan

Pelayanan Publik serta Pembina unit utama Ditjen Pelayanan Kesehatan baik secara daring maupun luring.

Saat ini RSUP dr. Kariadi telah merampungkan pengisian F01 dan F03 menggunakan *google drive* karena aplikasi yang disediakan kemenPANRB *error* diretas pihak lain sehingga tidak dapat dipergunakan. Selanjutnya sesuai jadwal 29 Juli - 2 Agustus 2024 dilakukan verifikasi lapangan oleh evaluator nasional KemenpanRB. Setelah itu evaluator melakukan analisa dan penilaian untuk mendapatkan Indeks Pelayanan Publik Kemenkes.

4. Pelaksanaan Pembinaan Wilayah Korwil Provinsi Bali

Terdapat 4 kegiatan situasional yang telah melibatkan Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dalam kaitanya dengan tugas direktif pimpinan melakukan fungsi pembinaan wilayah di Provinsi Bali yaitu:

- Kegiatan “Workshop Penanggulangan *Dengue*” yang diselenggarakan di Sanur, Bali
- Koordinasi dan Konsultasi secara daring dengan Dinas Kesehatan Provinsi
- Rapat Koordinasi Kesehatan Daerah Provinsi Bali
- Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Provinsi Bali



PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

1. Pengelolaan Halo Kemenkes

Upaya pelaksanaan keterbukaan informasi dan pelayanan informasi publik merupakan komitmen yang kuat untuk memberikan transparansi dan akses yang lebih luas terhadap informasi kesehatan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik telah melaksanakan inisiatif yang signifikan melalui akses layanan informasi publik yang diberi nama **Halo Kemenkes**.



Logo Halo Kemenkes

Kementerian Kesehatan melalui Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik mengembangkan Halo Kemenkes 1500567 yang bertujuan untuk memberikan layanan pengaduan dan informasi secara cepat dan cermat yang diperlukan masyarakat dalam bidang kesehatan melalui *hotline* 1500567.

Halo Kemenkes adalah sebuah layanan terintegrasi yang inovatif dan revolusioner, menghadirkan pengalaman pelayanan pengaduan dan informasi di bidang kesehatan yang lebih baik dan efisien bagi masyarakat. Dengan memadukan berbagai kanal komunikasi seperti telepon, SMS, email, layanan ini dijalankan melalui aplikasi bernama *Ecentrix*.

Pemanfaatan Halo Kemenkes tidak terbatas hanya pada masyarakat dalam negeri, melainkan juga membuka akses dan memberikan layanan kepada masyarakat yang berada di luar negeri.

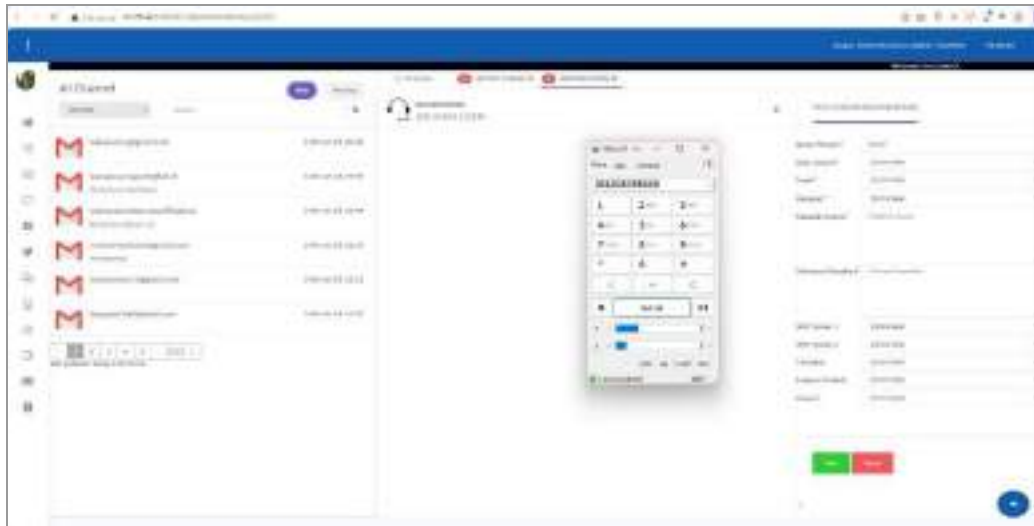


Petugas Halo Kemenkes dalam memberikan layanan

a. Layanan Telepon 1500567

Halo Kemenkes telah menyediakan layanan yang responsif dengan waktu operasional selama 24 jam sehari. Namun, perlu diperhatikan bahwa mulai bulan Mei 2023, terdapat penyesuaian jadwal layanan untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal. Saat ini, Halo Kemenkes beroperasi pada hari Senin hingga Jumat, dimulai dari pukul 07.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan yang

diberikan tetap konsisten, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus memberikan kesempatan bagi tim Halo Kemenkes untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan peningkatan layanan demi kepuasan pengguna yang lebih baik.



Dashboard *Ecentrix* Halo Kemenkes Kanal Telepon

Jumlah telepon yang dilayani dalam periode Januari hingga Desember 2024 adalah sebanyak 60.939 layanan dengan status *closed*.

BULAN	PERMINTAAN INFORMASI		PERMOHONAN INFORMASI		ASPIRASI/SARAN		PENGADUAN		TOTAL OPEN	TOTAL CLOSE	TOTAL LAYANAN	% PENYELESAIAN
	OPEN	CLOSE	OPEN	CLOSE	OPEN	CLOSE	OPEN	CLOSE				
Januari	0	7030	0	0	0	1	0	1	0	7032	7032	100
Februari	0	5356	0	0	0	0	0	0	0	5356	5356	100
Maret	0	5380	0	0	0	0	0	0	0	5380	5380	100
April	0	3494	0	0	0	0	0	0	0	3494	3494	100
Mei	0	4706	0	0	0	0	0	0	0	4706	4706	100
Juni	0	4529	0	0	0	0	0	0	0	4529	4529	100
Juli	0	5612	0	0	0	0	0	0	0	5612	5612	100
Agustus	0	4566	0	0	0	0	0	0	0	4566	4566	100
September	0	4457	0	0	0	0	0	0	0	4457	4457	100
Oktober	0	4979	0	0	0	0	0	0	0	4979	4979	100
November	0	4461	0	0	0	0	0	0	0	4461	4461	100
Desember	0	6367	0	0	0	0	0	0	0	6367	6367	100
JUMLAH	0	60937	0	0	0	1	0	1	0	60939	60939	100

Data Jumlah Layanan Telepon Halo Kemenkes Januari - Desember 2024

b. Layanan WhatsApp (081260500567)

Layanan informasi dan pengaduan WhatsApp mulai diperkenalkan sejak awal Januari 2019 dengan nomor layanan 08126050056. Layanan WhatsApp hanya beroperasi pada hari kerja dari Senin hingga Jumat.

Layanan WhatsApp ini difokuskan untuk pengguna layanan telepon Halo Kemenkes yang ingin mengirimkan data pendukung terkait permohonan informasi atau pengaduan. Selain itu, layanan WhatsApp juga berfungsi sebagai sarana bagi agen Halo Kemenkes untuk menyampaikan informasi lebih lanjut kepada pengguna layanan telepon Halo

Kemenkes. Saat ini, layanan WhatsApp tidak terintegrasi dalam sistem *omnichannel Ecentrix* Halo Kemenkes, sehingga kegiatan eskalasi atau tindak lanjut yang menggunakan layanan WhatsApp ini tidak tercatat secara otomatis oleh sistem.

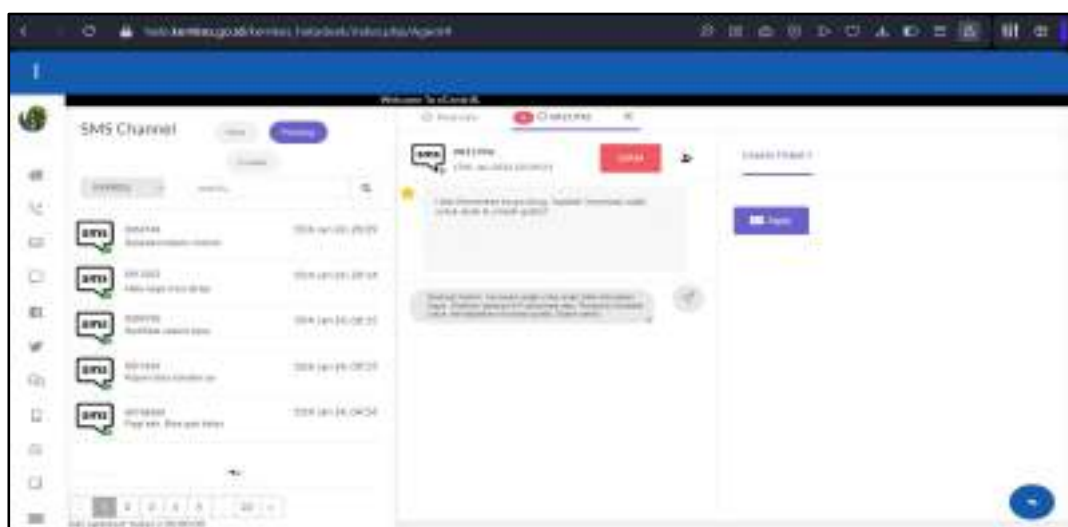
c. Layanan *Short Messaging Service* (081281562620)

Pada tahun 2024, layanan *Short Messaging Service* (SMS) melalui Halo Kemenkes tetap menjadi salah satu pilihan utama masyarakat untuk memperoleh informasi dalam bidang kesehatan. Data menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 5.159 permintaan informasi yang telah berhasil ditangani melalui SMS, dengan status layanan yang ditutup (*closed*).

BULAN	PERMINTAAN INFORMASI		PERMOHONAN INFORMASI		ASPIRASI/SARAN		PENGADUAN		TOTAL OPEN	TOTAL CLOSE	TOTAL LAYANAN	% PENYELESAIAN
	OPEN	CLOSE	OPEN	CLOSE	OPEN	CLOSE	OPEN	CLOSE				
Januari	0	951	0	0	0	0	0	0	0	951	951	100
Februari	0	470	0	0	0	0	0	0	0	470	470	100
Maret	0	474	0	0	0	0	0	1	0	475	475	100
April	0	372	0	0	0	0	0	6	0	378	378	100
Mei	0	450	0	0	0	0	0	0	0	450	450	100
Juni	0	385	0	0	0	0	0	0	0	385	385	100
Juli	0	272	0	0	0	0	0	0	0	272	272	100
Agustus	0	251	0	0	0	0	0	0	0	251	251	100
September	0	321	0	0	0	0	0	1	0	322	322	100
Oktober	0	276	0	0	0	0	0	0	0	276	276	100
November	0	229	0	0	0	0	0	0	0	229	229	100
Desember	0	700	0	0	0	0	0	0	0	700	700	100
JUMLAH	0	5151	0	0	0	0	0	8	0	5159	5159	100

Data Jumlah Pengguna Layanan SMS Halo Kemenkes Periode Januari-Desember Tahun 2024

Jumlah permintaan yang signifikan ini juga menunjukkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap layanan SMS dalam menyediakan jawaban yang tepat terkait isu-isu kesehatan.



Dashboard Ecentrix Kanal Short Messaging Service

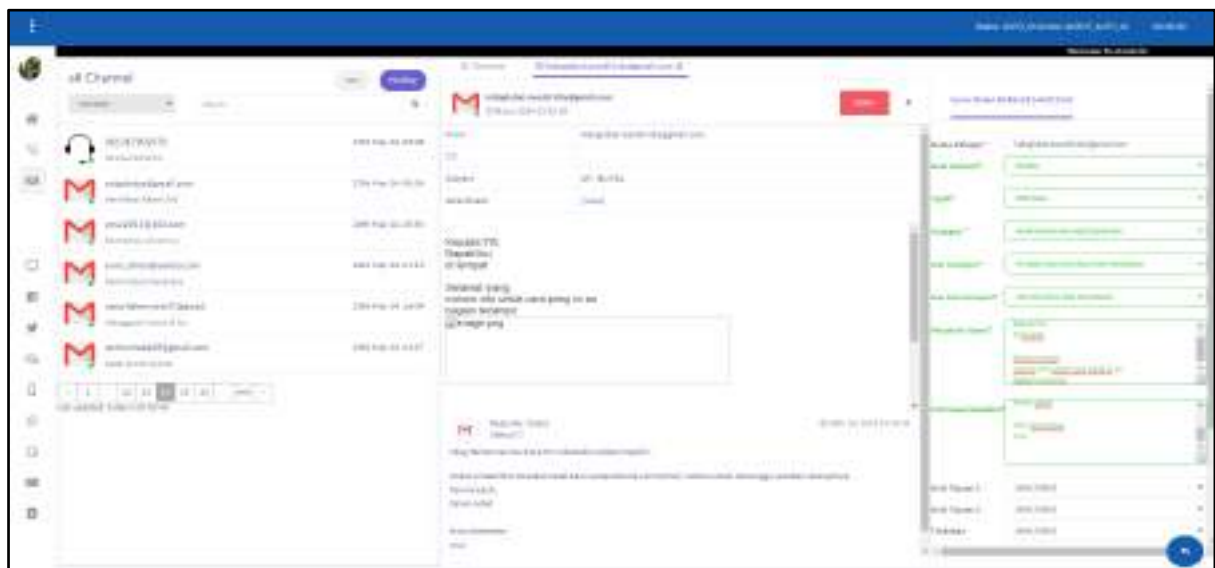
d. Layanan Email (kontak@kemkes.go.id)

Email merupakan salah satu layanan yang telah diintegrasikan dalam aplikasi *Ecentrix*. Selama periode Januari hingga Juni tahun 2024 telah dilakukan pelayanan sebanyak 24.500 email dengan permintaan informasi, pengaduan dan saran dari masyarakat dengan status *closed*.

BULAN	PERMINTAAN INFORMASI		PERMOHONAN INFORMASI		ASPIRASI/SARAN		PENGADUAN		TOTAL OPEN	TOTAL CLOSE	TOTAL LAYANAN	% PENYELESAIAN
	OPEN	CLOSE	OPEN	CLOSE	OPEN	CLOSE	OPEN	CLOSE				
Januari	0	1314	0	0	0	0	0	32	0	1346	1346	100
Februari	0	1442	0	0	0	3	0	22	0	1467	1467	100
Maret	0	2671	0	0	0	0	0	10	0	2681	2681	100
April	0	2273	0	0	0	2	0	12	0	2287	2287	100
Mei	0	3905	0	0	0	0	0	20	0	3925	3925	100
Juni	0	2937	0	0	0	4	0	2	0	2943	2943	100
Juli	0	2743	0	0	0	2	0	6	0	2751	2751	100
Agustus	0	1370	0	0	0	0	0	5	0	1375	1375	100
September	0	1409	0	0	0	1	0	5	0	1415	1415	100
Oktober	0	1632	0	0	0	0	0	9	0	1641	1641	100
November	0	1153	0	0	0	0	0	20	0	1173	1173	100
Desember	0	1493	0	0	0	0	0	3	0	1496	1496	100
JUMLAH	0	24342	0	0	0	12	0	146	0	24500	24500	100

Data Jumlah Pengguna Layanan email Halo Kemenkes Periode Januari – Desember Tahun 2024

Pemanfaatan email sebagai sarana komunikasi mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat dalam menggunakan teknologi untuk berinteraksi dengan pemerintah, khususnya dalam konteks kesehatan. Jumlah email yang signifikan mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat dalam berkontribusi, memberikan umpan balik, dan berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan melalui kanal ini.



Tampilan Dashboard Ecentrix untuk Service Level Monitoring

Dashboard pemantauan tingkat layanan (*service level*) dalam aplikasi *Ecentrix* aktif digunakan untuk memonitor tingkat layanan pada kanal telepon, email dan SMS. Hal ini memungkinkan petugas untuk menjaga tingkat layanan tetap di atas 90%.

BULAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
Persentase Service Level	86,85	96,49	96,10	97,63	96,52	95,36	94,74	97,04	96,08	95,18	96,40	89,01
Average	94.78%											

Persentase *Service Level* Kanal Telepon Per Bulan Tahun 2024

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan Halo Kemenkes, telah dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sepanjang tahun 2024. Survei Kepuasan Masyarakat ini dilakukan terhadap pelanggan Halo Kemenkes yang menggunakan layanan kanal telepon, surat elektronik maupun layanan pesan singkat. Kuesioner diisi oleh 600 responden yang diharapkan mampu menjadi perwakilan pelanggan Halo Kemenkes terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas Halo Kemenkes kepada pelanggan yang membutuhkan pelayanan. SKM ini dilakukan dengan metode kuesioner yang terdiri atas 9 pertanyaan yang terdiri dari 9 unsur SKM yang relevan untuk mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Halo Kemenkes tahun 2024. Pengambilan data Survei Kepuasan Masyarakat ini dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu: pertama, dengan microsoft form dengan link <https://link.kemkes.go.id/SKMHaloKemenkesTahun2024> dan kedua, menggunakan google form dengan link <https://link.kemkes.go.id/SKMHK2024>.

Unsur Pengukuran	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Total Nilai Per Unsur	1843	1860	1750	1853	1988	1797	1911	1850	2003
Nilai Rata-Rata (NRR) Per Unsur	3,07	3,1	2,92	3,09	3,31	3	3,19	3,08	3,34
NRR Tertimbang/Unsur	0,341	0,344	0,324	0,343	0,368	0,333	0,354	0,343	0,371
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan	3.12								
Konversi Indeks Kepuasan Masyarakat	78,03								
Kategori Penilaian Kepuasan Masyarakat	BAIK								

Dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan terhadap pelayanan di Halo Kemenkes tahun 2024 menunjukkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Halo Kemenkes tahun 2024 masuk dalam kategori baik dengan nilai rata-rata per unsur semua masuk dalam kategori baik.

Dari sembilan unsur tersebut, terdapat lima unsur dengan nilai rata-rata terendah antara lain waktu penyelesaian, Kompetensi pelaksana/petugas, Persyaratan, Penanganan pengaduan/saran/kritik, Prosedur/urutan/alur pelayanan. Kelima unsur yang memiliki nilai rata-rata terendah tersebut akan dilakukan evaluasi guna meningkatkan pelayanan publik di Halo Kemenkes.

Rencana tindaklanjut yang akan dilakukan diantaranya adalah pembaruan perangkat dan peningkatan kapasitas petugas. Rencana tindaklanjut akan dilaksanakan pada periode 2025. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Halo Kemenkes Periode 2024 dapat diakses melalui tautan berikut:

<https://drive.google.com/file/d/1uaPFtn0nTTRH0L0MvTYINRoMZuiUAKpL/view?usp=sharing>

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Kesehatan Koordinasi PPID

Keterbukaan informasi merupakan salah satu elemen penting manajemen pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal tersebut telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi serta bertanggung jawab langsung kepada atasan PPID.

Penunjukan PPID adalah kewenangan pimpinan badan publik yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. PMK No. 37 Tahun 2019 dan Kepmenkes No. 1279 Tahun 2023 menjadi dasar tugas dan fungsi PPID dalam mengelola informasi publik di Kementerian Kesehatan. Dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/A/1991/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, PPID Kemenkes terdiri atas:

- PPID Pelaksana;
- PPID Pembantu;
- Koordinator Pelayanan Informasi;
- Koordinator Dokumentasi; dan
- Petugas Layanan Informasi



Layanan permohonan informasi publik menjadi garis terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Petugas Informasi sebagai perpanjangan tangan PPID melaksanakan fungsi layanan serta melaksanakan pengujian konsekuensi yang akan dikecualikan serta pembuatan pertimbangan tertulis apabila dikecualikan ataupun ditolak.

Untuk memaksimalkan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, PPID Kementerian Kesehatan telah memanfaatkan teknologi informasi melalui website PPID yang tersedia pada <https://ppid.kemkes.go.id/>. Website PPID Kementerian Kesehatan telah diterapkan sejak tahun 2011 dengan pengembangan dan penyesuaian yang terus dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan di seluruh unit kerja dan unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Kesehatan.

a. Koordinasi PPID

Berikut data rekapitulasi koordinasi PPID periode bulan Januari-Desember tahun 2024:

Rekapitulasi Koordinasi PPID Tahun 2024

No	Tanggal	Perihal	Instansi/Satuan Kerja	Tempat
JANUARI				
1	02 Januari 2024	Koordinasi permohonan jawaban informasi publik oleh Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ)	1. Ses Unit Utama 2. Ditjen P2P 3. Dir Yankes Rujukan 4. Ditjen Nakes	1. Daring

No	Tanggal	Perihal	Instansi/Satuan Kerja	Tempat
			5. Dir Fasyankes	
2	23- 24 Januari 2024	Rapat Pembahasan Jawaban Permohonan Informasi Publik Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ) terkait keuangan dan PC PEN	1. Ses Ijen 2. Ses Ditjen Kesmas 3. Ses Ditjen P2P 4. Ses Ditjen Yankes 5. Ses Ditjen Farmalkes 6. Ses Ditjen Nakes 7. Ses BKPK 8. Dir SKK 9. Dir Yankes Rujukan 10. Dir Fasyankes	Ruang Rapat Naranta Kementerian Kesehatan RI
3	25 Januari 2024	Rapat Strategi Pengembangan Web PPID Kemenkes	Satuan Unit Kerja Kemenkes	Ruang Rapat 104
4	31 Januari 20214	Rapat Rencana Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kemenkes RI	Ses Unit Utama	Ruang Rapat Naranta Kementerian Kesehatan RI
FEBRUARI				
1	05 Februari 2024	Rapat Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)	Ses Unit Utama	Ruang Rapat Naranta Kementerian Kesehatan RI
2	26 Februari 2024	Rapat Koordinasi Pembahasan Kendala e-ppid	Timker Yaninfodumas	Ruang Rapat 104
MARET				
1	01 Maret	Rapat asistensi PPID Kemenkes		

No	Tanggal	Perihal	Instansi/Satuan Kerja	Tempat
	2024			
2	04 Maret 2024	Rapat Sharing Pengalaman Penyelenggaraan Monev KIP di Internal Kementerian	1. KIP 2. Ses Unit Utama	Ruang Rapat Naranta Kementerian Kesehatan RI
3	08 Maret 2024	Rapat koordinasi klarifikasi atau permintaan informasi DPP PLPN	1. Inspektur Investigasi 2. Kepala Biro Hukum 3. Kepala Biro Umum 4. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Zoom
4	13 Maret 2024	Rapat Koordinasi Pembahasan Tanggapan atau Jawaban Permintaan Informasi MoU antara Kemenkes dan The Bill & Melinda Gates Foundation dari Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN)	1. Ses Ditjen Kesmas 2. Ses Ditjen P2P 3. Ses Ditjen Farmalkes 4. Ses BKPK 5. Chief (DTO) / Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan 6. Dir PKPM 7. Kepala Biro Hukum 8. Kepala Biro Umum	Zoom

No	Tanggal	Perihal	Instansi/Satuan Kerja	Tempat
5	14 Maret 2024	Rapat Koordinasi Pembahasan Tanggapan atau Jawaban Permintaan Informasi Kontrak Vaksin dari Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN)	1. Ses Ditjen P2P 2. Ses Ditjen Farmalkes 3. Dir Pengelolaan Imunisasi 4. Dir PenYanfar 5. Kepala Biro Hukum	Zoom
6	14 Maret 2024	Rapat Koordinasi Pembahasan Tanggapan atau Jawaban Permintaan Informasi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dari Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN)	1. Ses Ditjen P2P 2. Dir Pengelolaan Imunisasi 3. Kepala Biro Hukum 4. Kepala Biro Umum	Zoom
7	19 Maret 2024	Rapat Koordinasi Lanjutan Pembahasan Tanggapan atau Jawaban Permintaan Informasi MoU antara Kemenkes dan The Bill & Melinda Gates Foundation dari Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN)	1. Ses Itjen 2. Ses BKPK 3. Ses PuSjak KGTK 4. Kepala Biro Hukum 5. Kepala Biro Keuangan dan BMN 6. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran	Zoom
8	20 Maret 2024	Menjawab permintaan informasi publik terkait Kontrak semua vaksin COVID-19 dan vaksin Polio nOPV2	Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia	Email
9	20 Maret 2024	Menjawab permintaan informasi publik terkait Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemenkes dan <i>The Bill & Melinda Gates Foundation</i>	Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia	Email
10	20 Maret 2024	Menjawab permintaan informasi publik terkait Data KIPI	Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia	Email
11	21 Maret 2024	Rapat Forum Konsultasi Publik Uji Konsekuensi Daftar Informasi	K/L	Kementerian Kelautan dan

No	Tanggal	Perihal	Instansi/Satuan Kerja	Tempat
		Dikecualikan (DIK) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024		Perikanan
12	22 Maret 224	Surat jawaban permintaan informasi DPP PLPN	DPP PLPN	Email
APRIL				
1	01 April 2024	Rapat BKPK terkait MoU BMGF	1. Ses BKPK 2. Pusjak KGTK 3. Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik	BKPK
2	02 April 2024	Rapat Koordinasi PPID BKPK (SK dan DIP DIK)	1. Ses BKPK 2. Pusjak KGTK 3. Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik	BKPK
3	22 April 2024	Rapat Koordinasi Jawaban Keberatan Informasi MoU antara Kemenkes dan The Bill & Melinda Gates Foundation dari Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN)	1. Ses Itjen 2. Ses BKPK 3. Ses PuSjak KGTK 4. Kepala Biro Hukum 5. Kepala Biro Keuangan dan BMN 6. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran	Zoom
4	22 April 2024	Rapat Koordinasi Jawaban Keberatan Informasi Kontrak Vaksin	1. Ses Ditjen P2P 2. Ses Ditjen Farmalkes 3. Dir Pengelolaan Imunisasi 4. Dir PenYanfar 5. Kepala Biro Hukum	Zoom
5	22 April 2024	Rapat Koordinasi Jawaban Keberatan Informasi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)	1. Ses Ditjen P2P 2. Dir Pengelolaan	Zoom

No	Tanggal	Perihal	Instansi/Satuan Kerja	Tempat
		dari Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN)	3. Kepala Biro Hukum 4. Kepala Biro Umum	
6	25 April 2024	Rakontek PPID BPOM Tahun 2024	K/L	BPOM
MEI				
1	08 Mei 2024	Rapat Uji Konsekuensi MoU antara Kementerian Kesehatan dengan The Bill & Melinda Gates Foundation	1. Kepala Biro Hukum 2. Kepala Biro Umum 3. Ses BKPK 4. Kepala Pusjak KGTK 5. <i>The Bill & Melinda Gates Foundation</i> 6. PPID KemKOMINF 7. PPID KemKumHAM 8. PPID Kementerian Sekretariat Negara	Ruang Rapat Naranta Kementerian Kesehatan RI
2	14 Mei 2024	Menjawab keberatan informasi YAKIN terkait MoU Kemenkes dengan BMGF	Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia	Email
3	14 Mei 2024	Menjawab keberatan informasi YAKIN terkait Kontrak Vaksin	Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia	Email
4	14 Mei 2024	Menjawab keberatan informasi YAKIN terkait Data KIPi	Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia	Email
5	17 Mei 2024	Sosialisasi Workshop Peningkatan Pemahaman dan Kemampuan Teknis	K/L	Grand Mercure Kemayoran

No	Tanggal	Perihal	Instansi/Satuan Kerja	Tempat
		Keterbukaan Informasi Publik PPID Badan Publik		
6	21 Mei 2024	Rapat Persiapan Sengketa Yayasan YAKIN	1. Ses Ditjen Farmalkes 2. Ses Ditjen P2P 3. Direktur Pengelolaan Imunisasi 4. Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian 5. Kepala Biro Hukum 6. Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi	Zoom
7	27 Mei 2024	Rapat Forum Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka Penguatan Akuntabilitas, Transparansi, dan Sinergi Lintas Sektor Lembaga Publik - Bank Indonesia	K/L	Kempinski Grand Ballroom
8	29 - 31 Mei 2024	Desk PPID Ditjen Kesmas	1. Ditjen kesmas 2. Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik	Harris
JUNI				
1	06 Juni 2024	Rapat Koordinasi PPID BKPK (Penyusunan SK, DIP, serta DIK)	1. Ses BKPK 2. Pusjak KGTK 3. Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik	BKPK
2	13 Juni 2024	Rapat Bimbingan Teknis Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Berbasis Digital	K/L	Zoom

No	Tanggal	Perihal	Instansi/Satuan Kerja	Tempat
		Bagi Penyandang Disabilitas		
3	19 Juni 2024	Rapat Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)	Ses Unit Utama	Ruang Rapat Naranta Kementerian Kesehatan RI
4	20 Juni 2024	Rapat Forum Keterbukaan Informasi Publik Kemen PPPA Tahun 2024	K/L	Millennium Hotel Sirih Jakarta
5	21 Juni 2024	Rapat Koordinasi Permohonan Informasi Amandemen IHR	1. Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri 2. Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang 3. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan 4. Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi	Zoom

No	Tanggal	Perihal	Instansi/Satuan Kerja	Tempat
			Kesehatan 5. Kepala Biro Hukum	
6	25 Juni 2024	Rapat Lanjutan Permohonan Informasi Amandemen IHR	Kemenlu: 1. Direktur Informasi dan Media 2. Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang 3. Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya 4. Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh / Wakil Tetap RI Jenewa Kemenkes: 1. Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan 2. Sekretaris Badan Kebijakan	Zoom

No	Tanggal	Perihal	Instansi/Satuan Kerja	Tempat
			Pembangunan Kesehatan 3. Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan 4. Kepala Biro Hukum	
JULI				
1	05 Juli 2024	Rapat perkembangan perbaikan website PPID	1. Tim PPID Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik 2. Tim pengembang Web PPID Kemenkes 3. IT Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik	Ruang 104 Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
AGUSTUS				
1	01 Agustus 2024	Rapat tanggapan permohonan informasi naskah akademik Pest Control	1. Kepala Biro Humum 2. Sekretaris Ditjen P2P	Zoom
2	06 Agustus 2024	Seminar Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Keuangan 2024	Lintas K/L	Kementerian Keuangan
3	09 Agustus 2024	Rapat koordinasi lanjutan dengan Kemenlu terkait keberatan informasi Amandemen IHR	Kemenkes 1. Ses Unit Utama 2. Dir SKK	Zoom

No	Tanggal	Perihal	Instansi/Satuan Kerja	Tempat
			3. Kepala KGTK 4. Kepala Biro Hukum 5. Kepala Biro Umum Kemenlu 1. Dir SosBud OINB 2. Dir Hukum dan PSB 3. Dir Infomed	
4	19 Agustus 2024	Rapat monev keterbukaan informasi publik internal Kemenkes		
5	22 Agustus 2024	Forum keterbukaan informasi publik Kemenpora 2024		
6	23 Agustus 2024	Rapat Persiapan panggilan sidang sengketa KIP terkait permohonan informasi YAKIN mengenai Kontrak Vaksin		
7	26 Agustus 2024	Sidang sengketa Komisi Informasi Pusat mengenai permohonan informasi oleh YAKIN terkait Kontrak Vaksin dan Polio noPV2 serta Data KIPI		
8	28 Agustus 2024	Rapat Uji Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan Terkait Dokumen Seluruh Kontrak Vaksin		
9	30 Agustus 2024	Uji Konsekuensi Kontrak Vaksin COVID-19 dan Polio noPV2		
SEPTEMBER				
1	03 September 2024	1. Rapat persiapan mediasi permohonan informasi Data KIPI 2. Rapat pertemuan Kajian Kausalitas KIPI Serius dari Provinsi DKI Jakarta (bersama dengan Jawa		

No	Tanggal	Perihal	Instansi/Satuan Kerja	Tempat
		Barat)		
2	24 September 2024	Rapat Uji Konsekuensi Data KIPI		
3	25 September	Rapat Pembahasan Penandatanganan Penetapan Informasi Dikecualikan		
4	27 September 2024	Persiapan Sidang Sengketa Informasi - Ajudikasi Kontrak Vaksin COVID-19		
5	30 September 2024	1. Sidang Ajudikasi Kontrak Vaksin COVID-19 dan Data KIPI 2. Mengisi FAQ monev KIP 2024		
OKTOBER				
1	02 Oktober 2024	Rapat perbaikan Uji Konsekuensi Kontrak Vaksin COVID-19 dan Data KIPI		
2	18 Oktober 2024	1. Rapat Finalisasi Perbaikan Uji Konsekuensi Data KIPI Dan Kontrak Pengadaan Vaksin COVID-19 2. Rapat persiapan monev internal dengan PT TERA		
3	22 Oktober 2024	1. Rapat Finalisasi Uji Konsekuensi Data KIPI		
4	25 Oktober 2024	Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi PPID Pelaksana di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI		
5	31 Oktober 2024	Bimbingan Teknis Kebijakan Aplikasi Umum Layanan Informasi Publik Bagi PPID		
NOVEMBER				
1	06 November 2024	<i>Technical Meeting</i> Presentasi Uji Publik Monev 2024		

No	Tanggal	Perihal	Instansi/Satuan Kerja	Tempat
2	13 November 2024	Presentasi Uji Publik KIP		
3	29 November 2024	Rapat Pemaparan hasil pengisian FAQ Monev PPID Pelaksana		
DESEMBER				
1	10 Desember 2024	Sidang sengketa informasi publik		
2	17 Desember 2024	Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik		

Selain permohonan informasi, PPID Kementerian Kesehatan pada periode ini memiliki 3 keberatan informasi dari Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia yang berisi:

- Kontrak semua vaksin COVID-19 dan vaksin Polio nOPV2
- Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemenkes dan *The Bill & Melinda Gates Foundation*
- Data Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) atau *Adverse Events Following Immunization* (AEFI) untuk semua vaksin

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi, badan publik diharapkan termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mewujudkan pemerintahan yang terbuka, mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), sehingga tercipta tata kelola dan pemerintahan yang baik.



Forum Keterbukaan Informasi Bank
Indonesia



Forum Keterbukaan Informasi KemenPPPA



Rapat Persiapan Monev PPID



Rapat Persiapan Jawaban Permohonan
MoU Kemenkes dan BMGF



Rapat Penyusunan SK, DIP, dan DIK BKKP



Rapat Pengembangan Web PPID



Sosialisasi Workshop PPID Bersama KIP



Rapat Koordinasi Jawaban Keberatan Data KIP



Rapat Koordinasi Jawaban Keberatan MoU BMGF

b. Pelayanan Informasi - Pojok Informasi

Berikut adalah Pelayanan Informasi yang ada di Pojok Informasi berdasarkan Jumlah Pengunjung di Gedung Prof.Sujudi Lantai 1 Tahun 2024



Berdasarkan diagram di atas jumlah permohonan informasi melalui pojok informasi sebanyak **72 permohonan informasi**.

c. Instagram @ppid_kemenkes

1) Postingan



Berdasarkan diagram di atas jumlah Postingan IG PPID sebanyak 213 postingan.

2) Interaksi Direct Messages



NO	Tanggal Diterima	Status Permohonan
JANUARI = 0		
FEBRUARI= 1		
1	12 Februari 2024	Closed

MARET= 8		
1	01 Maret 2024	<i>Closed</i>
2	07 Maret 2024	<i>Closed</i>
3	07 Maret 2024	<i>Closed</i>
4	07 Maret 2024	<i>Closed</i>
5	14 Maret 2024	<i>Closed</i>
6	20 Maret 2024	<i>Closed</i>
7	27 Maret 2024	<i>Closed</i>
8	27 Maret 2024	<i>Closed</i>
APRIL= 0		
MEI= 2		
1	17 Mei 2024	<i>Closed</i>
2	20 Mei 2024	<i>Closed</i>
JUNI= 1		
1	14 Juni 2024	<i>Closed</i>
JULI= 1		
1	03 Juli 2024	<i>Closed</i>

3) Email PPID

NO	Tanggal Diterima	Status Permohonan
AGUSTUS= 0		
SEPTEMBER= 1		
1	09 September 24	<i>Closed</i>
OKTOBER= 5		
1	9 Oktober 2024	<i>Closed</i>
2	10 Oktober 2024	<i>Closed</i>
3	23 Oktober 2024	<i>Closed</i>
4	28 Oktober 2024	<i>Closed</i>
5	31 Oktober 2024	<i>Closed</i>

NOVEMBER= 5		
1	13 November 2024	<i>Closed</i>
2	18 November 2024	<i>Closed</i>
3	19 November 2024	<i>Closed</i>
4	21 November 2024	<i>Closed</i>
5	29 November 2024	<i>Closed</i>
DESEMBER= 0		
TOTAL	24 Permohonan Informasi <i>Closed: 24</i>	

Berdasarkan tabel di atas jumlah permohonan informasi melalui email PPID pada tahun 2024 sebanyak 24 permohonan informasi dengan status *Closed*.

4) Website PPID

Website PPID masih dalam *maintenance*, sehingga pemohon tidak bisa melakukan permohonan informasi melalui *website*.

5) Surat

NO	Tanggal Diterima	Status Permohonan
JANUARI = 0		
FEBRUARI= 0		
MARET= 1		
1	26 Februari 2024	
APRIL= 0		
MEI = 0		
JUNI= 1		
1	19 Juni 2024	<i>Closed</i>
JULI= 1		

1	30 Juli 2024	<i>Closed</i>
AGUSTUS= 0		
SEPTEMBER= 0		
OKTOBER= 0		
NOVEMBER= 0		
DESEMBER= 2		
1	16 Desember 2024	<i>Closed</i>
2	24 Desember 2024	<i>Closed</i>
TOTAL = 5 Permohonan Informasi		

Berdasarkan tabel di atas jumlah permohonan informasi melalui surat pada tahun 2024 sebanyak 5 permohonan informasi dengan status *Closed*.

Data Rekapitulasi Permohonan Informasi Selama Tahun 2024

Tabel Rekapitulasi Permohonan Informasi Tahun 2024

NO	BULAN	JUMLAH PERMOHONAN	INFORMASI DIBERIKAN			RATA WAKTU PEMENUHAN	ALASAN PENOLAKAN
			SEMUA	SEBAGIAN	TIDAK DIBERIKAN		
1	Januari	17	17	0	0	10 HK	-
2	Februari	13	12	0	1	10 HK	Permohonan dalam jumlah yang besar, berulang, dan berkaitan dengan hak-hak pribadi dan rahasia jabatan
3	Maret	24	24	0	0	10 HK	-

4	April	8	8	0	0	10 HK	-
5	Mei	12	12	0	0	10 HK	-
6	Juni	8	7	1	0	10 HK	-
7	Juli	25	23	2	0	10 HK	-
8	Agustus	8	8	0	0	10 HK	-
9	September	23	23	0	0	10 HK	-
10	Oktober	25	24	0	1	10 HK	Tidak berada dalam penguasaan Kementerian Kesehatan.
11	November	26	23	1	2	10 HK	1. Persyaratan tidak sesuai 2. Pemohon tidak melengkapi persyaratan
12	Desember	23	0	0	0	10 HK	-
TOTAL		211	179	4	4	10 HK	

Berdasarkan tabel di atas jumlah permohonan informasi baik dari Pojok Informasi, Instagram, Email, Website, dan Surat berjumlah **211 permohonan informasi** (diberikan semua 179 permohonan, diberikan sebagian 4 permohonan dan tidak diberikan 4 permohonan).

6) Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (SP4N-LAPOR!)

Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mengembangkan akses pengaduan dan permintaan masyarakat melalui Unit Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (**LAPOR**) yang saat ini dikelola oleh KemenPAN RB, Kominfo, Kemendagri dan Ombudsman RI. Selama Januari - Desember 2024 tercatat Kementerian Kesehatan (Admin Instansi) telah melakukan disposisi sebanyak **787** layanan (total) dengan **775** layanan dengan status *close* (**98,48%**) yang diselesaikan oleh admin Unit Utama dan UPT.

BULAN	PERMINTAAN INFORMASI		PERMOHONAN INFORMASI		SARAN/ASPIRASI		PENGADUAN		TOTAL OPEN	TOTAL CLOSE	JUMLAH	SELESAI	% PENYELESAIAN
	OPEN	CLOSE	OPEN	CLOSE	OPEN	CLOSE	OPEN	CLOSE					
Januari	0	89	0	0	0	9	0	45	0	143	143	143	100.00
Februari	0	47	0	0	0	20	0	60	0	127	127	127	100.00
Maret	0	21	0	0	0	9	0	78	0	108	108	108	100.00
April	0	8	0	0	0	1	0	43	0	52	52	52	100.00
Mei	0	11	0	0	0	7	0	55	0	73	73	73	100.00
Juni	0	13	0	0	0	2	0	38	0	53	53	53	100.00
Juli	0	9	0	0	0	6	0	35	0	50	50	50	100.00
Agustus	0	1	0	0	0	2	0	28	0	31	31	31	100.00
September	0	12	0	0	0	4	2	18	2	34	36	34	94.44
Oktober	2	13	0	0	0	4	0	46	2	63	65	63	96.92
November	1	4	0	0	1	4	3	20	5	28	33	28	84.85
Desember	0	1	0	0	0	2	2	10	2	13	15	13	86.67
JUMLAH	3	229	0	0	1	70	7	476	11	775	786	775	98.60

KOMUNIKASI ANTAR LEMBAGA DAN PENGUATAN KEHUMASAN

1. Pendampingan Rapat Kerja Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI (KAL)

Salah satu tugas Tim Kerja Komunikasi antar Lembaga dan Penguatan Kehumasan adalah penyiapan dan pendampingan dalam Raker/ RDP/ Ratas Program Kesehatan dan acara kelembagaan lainnya. Tim Kerja Komunikasi antar Lembaga dan Penguatan Kehumasan bertugas koordinasi penyiapan agenda, koordinasi penyiapan raker, menyiapkan pendampingan, membuat *briefnote*, menggandakan bahan, hingga penyiapan jalannya rapat kerja . Pada tahun 2024 Tim Kerja Komunikasi antar Lembaga dan Penguatan Kehumasan telah melakukan pendampingan 32 Raker/ RDP/Ratas Program Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL	URAIAN
1	25 Maret 2024	Rapat Kerja Gabungan Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI dengan Pembahasan tentang Pandangan umum mini fraksi fraksi dan Pengambilan Keputusan Atas RUU tentang

		kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan
2	27 Maret 2024	Rapat Dengar Pendapat Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI tentang : 1. Penjelasan Program JKN sd saat ini demi mencapai UHC 2024; 2. Kejelasan terkait perkembangan rencana implementasi KRIS dan KDK dalam program JKN; dan 3. Penjelasan terkait Formularium nasional.
3	01 April 2024	Rapat Panja Mengenai Pengawasan terhadap Percepatan Penurunan Stunting
4	16 Mei 2024	Rapat Kerja Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI, terkait : 1. Membahas perkembangan pelaksanaan upaya penurunan stunting sebagai program nasional Tahun 2024 a. Metode pendataan stunting dan analisis terhadap keakuratan serta kecukupan data yang telah terkumpul; b. kendala dalam proses pendataan stunting dan langkah-langkah untuk meningkatkan akurasi dan cakupan data stunting di seluruh wilayah Indonesia; dan c. upaya kolaborasi antara lembaga dan pihak terkait untuk memperkuat system pendataan stunting secara berkelanjutan. 2. Membahas perkembangan percepatan pelaksanaan program intervensi spesifik bagi anak stunting tahun 2024
5	21 Mei 2024	Rapat Kerja Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI, terkait : 1. Membahas penanganan penyakit menular a. Penjelasan KIPI vaksin COVID-19 produksi Astra Zeneca; b. Penjelasan pencegahan dan pengendalian <i>Dengue</i>;

		2. Membahas evaluasi kemajuan dan tantangan dalam memperkuat infrastruktur kesehatan di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang termasuk pembiayaan; dan 3. Membahas perkembangan kemandirian industri <i>fraksionasi plasma</i>.
6	30 Mei 2024	Rapat Panja Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI terkait Pengawasan terhadap percepatan penurunan stunting dengan Komisi IX DPR RI
7	6 Juni 2024	Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Menteri Kesehatan, Dirut Utama BPJS Kesehatan, DJSN, dan Dewas BPJS Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI, terkait : 1. Membahas Penjelasan Pelaksanaan Kelas Rapat Inap Standar (KRIS) dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; dan 2. Membahas perkembangan penataan koordinasi benefit antara BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta dan Pembiayaan Inovatif demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan program JKN.
8	6 Juni 2024	Rapat Kerja Wakil Menteri Kesehatan dengan Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI terkait Pembahasan Evaluasi Program dan Realisasi Anggaran Kementerian Kesehatan RI
9	11 Juni 2024	Rapat Kerja Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI terkait Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L tahun 2025
10	13 Juni 2024	Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Eselon I Kemenkes Pendalaman Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L tahun 2025
11	24 Juni 2024	Rapat Dengar Pendapat Dirjen Farmalkes dengan Komisi IX DPR RI, terkait: 1. Pembenahan Sistem Keamanan dan Mutu Obat; 2. Penjelasan terkait arah kebijakan pengawasan keamanan dan mutu obat;

		3. Penguatan pembinaan dan pengawasan peredaran obat; 4. Penjelasan terkait pemenuhan kebutuhan bahan baku obat dan jaminan keamanan dan mutunya; dan 5. Penjelasan terkait upaya yang perlu dilakukan untuk menuju kemandirian industry farmasi agar pemenuhan kebutuhan obat dalam negeri terpenuhi.
12	25 Juni 2024	Rapat Kerja Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI Pembicaraan tingkat I/ Pembahasan RUU Tentang Pengawasan Obat dan Makanan
13	1 Juli 2024	Rapat Dengar Pendapat Dirjen P2P dan Ka. BKPK dengan Komisi IX DPR RI, membahas: 1. Penjelasan terkait arah kebijakan pembatasan konsumsi Gula Garam Lemak (GGL) di Masyarakat; dan 2. Penguatan pengawasan konsumsi Gula Garam Lemak di Masyarakat.
14	2 Juli 2024	Rapat Kerja Komite III DPD RI Membahas tentang Inventarisasi Materi terkait Pandangan dan Pendapat terhadap Rencana undang – undang Pengawasan Obat dan Makanan
15	2 Juli 2024	Rapat Kerja Komisi IX DPR RI Rapat Lanjutan Pembicaraan Tingkat I / Pembahasan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
16	3 Juli 2024	Rapat Kerja Komisi IX DPR RI Membahas Strategi peningkatan jumlah, kualitas dan distribusi tenaga kesehatan, tenaga medis secara merata di seluruh Indonesia, termasuk dokter spesialis melalui program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit
17	8 Juli 2024	Rapat Kerja Komisi IX DPR RI membahas tentang Penjelasan terkait perkembangan peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

18	26 Agustus 2024	Rapat Kerja Komite III DPD RI dengan Wakil Menteri Kesehatan, dengan membahas: 1. Program Kerja Kementerian Kesehatan RI Tahun 2024 dan Realisasi Program Kerja dan Anggaran Semester Awal Tahun 2024; 2. Kasus Perundungan Peserta Didik Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS); 3. Progress Pelaksanaan KRIS; 4. Penanganan Kasus DBD di Indonesia; 5. Perjanjian Internasional tentang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Respon Pandemi; 6. Meningkatkan kasus diabetes dan gagal ginjal pada anak-anak; dan 7. Kontroversi Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 103 (a) 4 tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Pelajar dan Remaja.
19	29 Agustus 2024	Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI dengan membahas Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2023
20	29 Agustus 2024	Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI dengan membahas: 1. Penjelasan terkait Perkembangan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan; dan 2. Membahas Isu Terkini khususnya : • Peningkatan kasus cuci darah pada anak; • Status pandemic dan kondisi terkini wabah Mpox; dan • Pengawasan Proses Pendidikan Kedokteran di Indonesia.

21	3 September 2024	Rapat Kerja (Raker) Komisi IX DPR RI, dengan pembahasan terkait: 1. Pembahasan RKA K/L Tahun 2025; dan 2. Pembahasan Usulan Program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis Komisi.
22	10 September 2024	Rapat Kerja Komisi IX DPR RI Pembahasan terkait dengan RPKM Kesehatan Reproduksi dan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK)
23	10 September 2024	Rapat Kerja Komisi IX DPR RI Pembahasan terkait Penyesuaian RKA K/L Tahun 2025 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran
24	17 September 2024	Rapat Kerja Komisi IX DPR RI Pembahasan tentang Materi Panja RUU Pengawasan Obat dan Makanan (POM)
25	17 September 2024	Rapat Kerja Komisi IX DPR RI Penyampaian dan Pengesahan Hasil Panja Pembahasan RUU Pengawasan Obat dan Makanan.
26	23 September 2024	Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI Pembahasan tentang Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445H/2024 M dan Isu-Isu Aktual
27	27 September 2024	Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI Pembahasan tentang: 1. Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445H/2024 M; 2. Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024; dan 3. Isu-isu aktual.

28	30 September 2024	Rapat Paripurna DPR RI Pembahasan terkait Laporan Komisi IX DPR RI atas hasil Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan terhadap RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan
29	28 Oktober 2024	Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR RI terkait dengan: 1. Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M; 2. Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/ 2024 M; dan 3. Isu – isu aktual.
30	31 Oktober 2024	Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, terkait dengan: 1. Perkenalan Mitra Kerja Komisi IX DPR RI; dan 2. Penjelasan Menteri Kesehatan RI Mengenai Visi dan Misi Presiden di bidang Kesehatan
31	13 November 2024	Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Dirjen Yankes terkait: a. Perkenalan dari Mitra Kerja Komisi IX DPR RI b. Membahas Penguatan Fungsi dan Peran Rumah Sakit Vertikal dalam peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
32	3 Desember 2024	Rapat Kerja Komite III DPD RI dengan Wakil Menteri Kesehatan, pembahasan terkait: 1. Realisasi Program Kerja dan Anggaran Kementerian Kesehatan RI Tahun 2024 (sampai dengan bulan Oktober); 2. Rencana Program Kerja dan Anggaran Kementerian RI Tahun 2025; 3. Proses pembentukan Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi serta <i>Update</i> terkini terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan

		4. Kolaborasi Program Kerja Kementerian Kesehatan RI dengan Komite III DPD RI.
--	--	--



Dokumentasi Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI Tahun 2024

Selain pendampingan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI, Tim Kerja Komunikasi antar Lembaga dan Penguatan kehumasan juga mengkoordinasikan dan melaksanakan pendampingan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI dan Pimpinan dalam rangka pengawasan pembangunan kesehatan. Pada tahun 2024 Tim Kerja Komunikasi antar Lembaga dan Penguatan kehumasan telah mengkoordinasikan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI dan Pimpinan dalam rangka pengawasan pembangunan kesehatan pada 24 Provinsi. Rincian kegiatan Kunjungan Kerja adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Tanggal
1	Pendampingan Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI Ke Provinsi Kepulauan Riau, dengan lokasi sebagai berikut: 1. Kota Batam; 2. Kota Tanjung Pinang; dan 3. Kab. Bintan Provinsi Kepri.	27 s.d 29 Feb 2024

2	Pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI Dalam rangka pengawasn peredaran keamanan makanan dan minuman di Bulan Ramadan 1445 H, dengan lokasi sebagai berikut: 1. Kota Depok; dan 2. Kota Tangerang Selatan	21 sd 23 Maret 2024
3	Pendampingan Kunker Reses masa Persidangan IV tahun Sidang 2023/2024 ke Provinsi Bali, dengan lokasi sebagai berikut: 1. Kabupaten Badung; 2. Kabupaten Tabanan; dan 3. Kabupaten Gianyar.	9 sd 13 Mei 2024
4	Pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI terkait Pengawasan Pelayanan Kesehatan di Asrama Haji pada Musim Haji Tahun 2024 M/1445 H dengan lokasi sebagai berikut: 1. Provinsi Sumatera Selatan; 2. Provinsi Jawa Tengah; dan 3. Provinsi Sulawesi Selatan.	3 s.d 5 Juni 2024
5	Pendampingan Kunjungan Kerja pada Reses Masa persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 dengan lokasi: 1. Kota Manado, Sulawesi Utara; 2. Kota Bitung, Sulawesi Utara; dan 3. Kab. Minahasa Utara, Sulawesi Utara.	15 s.d 18 Juli 2024
6	Kunjungan Kerja Panitia Kerja Komisi IX DPR RI ke Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mendapat masukan terkait Pembahasan Panja Pengawasan terhadap Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Obat	11 – 13 September 2024

7	Kunjungan Kerja Panitia Kerja Komisi IX DPR RI Ke Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam rangka mendapat masukan terkait Pembahasan Panja Pengawasan terhadap Produk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji dengan Kandungan Gula, Garam dan Lemak (GGL); dan	11 – 13 September 2024
8	Kunjungan Kerja Panitia Kerja Komisi IX DPR RI ke Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka mendapat masukan terkait Pembahasan Panja Pengawasan terhadap Percepatan Penurunan Stunting.	11 – 13 September 2024
9	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI Pengawasan terkait Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Tahun 2024 dengan Lokasi: 1. Kota Bekasi, Jawa Barat; 2. Kota Tangerang Selatan, Banten; dan 3. Kabupaten Bogor, Jawa Barat	19 – 21 September 2024
10	Kunjungan Kerja Spesifik dengan lokasi sebagai berikut : 1. Bogor Jawa Barat; 2. Kota Depok Jawa Barat; dan 3. Kabupaten Tangerang, Banten.	1-3 November 2024
11	Kunjungan Kerja Spesifik ke Bekasi Jawa Barat dalam rangka pengawasan kualitas dan keamanan produk obat tradisional	6-8 November 2024
12	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR dalam rangka pengawasan kualitas dan keamanan produk obat tradisional dengan lokasi sebagai berikut: 1. Provinsi Sulawesi Selatan; dan 2. Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.	14-15 November 2024

13	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR ke Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka pengawasan percepatan penurunan stunting	14-15 November 2024
14	Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dengan Lokasi sebagai berikut: 1. Kota Balikpapan/IKN, Provinsi Kalimantan Timur; 2. Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur; dan 3. Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.	6–10 Desember 2024



Dokumentasi Kunjungan Kerja dengan Komisi IX DPR RI Semester 1 Tahun 2024

Tim Kerja Komunikasi antar Lembaga dan Penguatan kehumasan selain melaksanakan pendampingan dalam Raker/ RDP/ Ratas Program Kesehatan dan acara kelembagaan lainnya juga bertugas menyiapkan jawaban tertulis atas pertanyaan yang diajukan pada rapat tersebut jika tersebut dalam laporan singkat rapat. Pada tahun 2024 Tim Kerja Komunikasi antar Lembaga dan Penguatan kehumasan telah membuat jawaban pertanyaan sebanyak 13 Jawaban tertulis:

No	Agenda Raker/RDP	Tanggal Raker	Tanggal Pengiriman
1	Rapat Kerja Gabungan Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI dengan Pembahasan tentang Pandangan umum mini fraksi dan Pengambilan Keputusan Atas RUU tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan	25 Maret 2024	26 Maret 2024
2	Rapat Dengar Pendapat Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI tentang : 1. Penjelasan Program JKN sd saat ini demi mencapai UHC 2024; 2. Kejelasan terkait perkembangan rencana implementasi KRIS dan KDK dalam program JKN; dan 3. Penjelasan terkait Formularium nasional.	27 Maret 2024	1 April 2024
3	Rapat Kerja Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI, terkait : 1. Membahas perkembangan pelaksanaan upaya penurunan stunting sebagai program nasional Tahun 2024 a. Metode pendataan stunting dan analisis terhadap keakuratan serta kecukupan ;data yang tela terkumpul b. kendala dalam proses pendataan stunting dan langkah-langkah untuk meningkatkan akurasi dan cakupan data stunting di seluruh wilayah Indonesia; dan	16 Mei 2024	17 Mei 2024

	c. upaya kolaborasi antara lembaga dan pihak terkait untuk memperkuat system pendataan stunting secara berkelanjutan. 2. Membahas perkembangan percepatan pelaksanaan program intervensi spesifik bagi anak stunting tahun 2024		
4	Rapat Kerja Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI, terkait : 1. Membahas penanganan penyakit menular a. Penjelasan KIPi vaksin COVID-19 produksi Astra Zeneca; b. Penjelasan pencegahan dan pengendalian <i>Dengue</i>; 2. Membahas evaluasi kemajuan dan tantangan dalam memperkuat infrastruktur kesehatan di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang termasuk pembiayaan; dan 3. Membahas perkembangan kemandirian industri <i>fraksionasi plasma</i>.	21 Mei 2024	27 Mei 2024
5	Rapat Kerja Wakil Menteri Kesehatan dengan Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI terkait Pembahasan Evaluasi Program dan Realisasi Anggaran Kementerian Kesehatan RI	6 Juni 2024	7 Juni 2024
6	Rapat Kerja Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI terkait Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L tahun 2025	11 Juni 2024	11 Juni 2024

7	Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Eselon I Kemenkes Pendalaman Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L tahun 2025	13 Juni 2024	28 Juni 2024
8	Rapat Kerja Komisi IX DPR RI membahas strategi peningkatan jumlah, kualitas dan distribusi tenaga kesehatan, tenaga medis secara merata di seluruh Indonesia, termasuk dokter spesialis melalui program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit	3 Juli 2024	15 Juli 2024
9	Rapat Kerja Komisi IX DPR RI membahas tentang Penjelasan terkait perkembangan peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	8 Juli 2024	15 Juli 2024
10	Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI Dengan membahas : 1. Penjelasan terkait Perkembangan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan; 2. Membahas Isu Terkini khususnya : a. Peningkatan kasus cuci darah pada anak; b. Status pandemic dan kondisi terkini wabah Mpox; dan c. Pengawasan Proses Pendidikan Kedokteran di Indonesia.	29 Agustus 2024	6 September 2024
11	Rapat Kerja (Raker) Komisi IX DPR RI, dengan pembahasan terkait :	3 September 2024	7 September 2024

	1. Pembahasan RKA K/L Tahun 2025; dan 2. Pembahasan usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi.		
12	Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, terkait dengan: 1. Perkenalan Mitra Kerja Komisi IX DPR RI; dan 2. Penjelasan Menteri Kesehatan RI Mengenai Visi dan Misi Presiden di bidang Kesehatan	31 Oktober 2024	7 November 2024
13	Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Dirjen Yankes terkait : 1. Perkenalan dari Mitra Kerja Komisi IX DPR RI; dan 2. Membahas Penguatan Fungsi dan Peran Rumah Sakit Vertikal dalam peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan.	13 November 2024	25 November 2024

2. Pertemuan Humas Kesehatan

Kegiatan pertemuan Humas Kesehatan tahun 2024 di selenggarakan sebagai salah satu bentuk pembinaan bidang kehumasan. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai wadah yang bersifat koordinatif dan strategis untuk penguatan peran humas kesehatan dan meningkatkan hubungan antar humas kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan beserta UPTnya dalam rangka menyatukan langkah strategis kehumasan dalam mengkomunikasikan seluas-luasnya kepada masyarakat berbagai program dan kebijakan kesehatan di pusat maupun daerah secara cepat, tepat, dan profesional demi terwujudnya pembangunan kesehatan.

Pertemuan Humas Kesehatan tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 29 sampai dengan 31 Mei 2024 secara luring bertempat di Hotel Santika Premier Kota Harapan Indah dengan tema **Akselerasi Transformasi Kesehatan Melalui Peran Humas dan**

Pustakawan. Pertemuan ini di hadiri oleh perwakilan humas Pusat dan daerah dengan jumlah peserta 105 Peserta

Pertemuan Humas Kesehatan tahun 2024 di buka oleh Sekretaris Jenderal RI, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Bapak Usman Kansong hadir memberikan sambutan, serta menghadirkan Narasumber dari Akademisi.



KOMUNIKASI INTERNAL DAN PERPUSTAKAAN

1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Komunikasi Internal

Perubahan budaya kerja secara resmi diperkenalkan pada tanggal 19 Februari 2024, ditandai dengan peluncuran Pedoman Budaya Kerja dan Pedoman Identitas Kemenkes sebagai upaya akselerasi terwujudnya Transformasi Internal di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Culture Transformation Office (CTO) Kemenkes, memfokuskan basis *core values* BerAKHLAK tersebut pada tiga tema perubahan budaya kemenkes yaitu: Eksekusi Efektif (*Effective Execution*); Cara Kerja Baru (*New Ways of Working*); dan Pelayanan Unggul (*Service Excellence*). Tiga tema perubahan budaya kerja ini menjadi visi perubahan budaya kerja Kemenkes yang diharapkan dapat dijalankan oleh seluruh insan Kemenkes sebagai pelaku transformasi.



Oleh karenanya, internalisasi kepada pegawai Kementerian Kesehatan menjadi sangat penting dilaksanakan dalam rangka membangun awareness dan dukungan terhadap program transformasi sistem kesehatan maupun program prioritas lainnya. Sebagai bentuk penyebarluasan informasi yang masif dan intensif terkait program transformasi kesehatan Kementerian Kesehatan serta pelaksanaan Transformasi Internal kepada seluruh ASN Kementerian Kesehatan, maka diperlukan adanya bimbingan teknis (Bimtek) terkait optimalisasi Diseminasi Informasi dan Komunikasi Transformasi Kesehatan sampai pada UPT Kemenkes.

Pelaksanaan Bimtek pengelolaan komunikasi internal pada 2024 menargetkan 3 Lokus (berdasarkan UPT &/ Provinsi). Metode pelaksanaan Bimtek dilakukan melalui (1) audiensi dengan Pimpinan UPT beserta para Champion, Humas, Adum, maupun pengelola komunikasi dan (2) penyelenggaraan pertemuan (*fullday meeting*) di hotel dengan mengundang perwakilan UPT yang ada di Provinsi tersebut. Sebagai bagian dari Bimtek biasanya Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik akan membuat konten *employer branding* di UPT yang di kunjungi bersama dengan humas atau pengelola komunikasi. Sebagai bentuk kolaborasi bersama, kegiatan Bimtek juga turut mengundang tim Diseminasi Informasi dan Komunikasi Internal (Diforkin) yang berasal dari Biro OSDM dan P2KASN untuk bersama-sama menyampaikan materi. Realisasi Bimtek tahun 2024 meliputi 7 UPT dan Provinsi Jatim yang melibatkan 8 UPT Kemenkes (Total 15 UPT):

Bulan	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Desember
Lokus	RSJ Marzoeki Mahdi	RS Sitanala	-RS Paru Ario Wirawan -Laboratorium Kesehatan Lingkungan	Bapelkes Semarang	Pertemuan Bimtek di Keperawatan Kampus 8 Purwokerto Poltekkes Semarang di Jatim (8 UPT) yaitu: -RS Vertikal Surabaya, -RS Radjiman Wediodiningrat Malang, -BKK Probolinggo, - Balai Besar Labkesmas Surabaya, -BPAFK Surabaya, -Poltekkes Surabaya, -Poltekkes Malang	-Prodi Keperawatan Kampus 8 Purwokerto Poltekkes Semarang -BKK Kelas I Cilacap
Metode	Audiensi dan pertemuan di UPT Terkait	Audiensi dan pertemuan di UPT Terkait	Audiensi dan pertemuan di UPT Terkait	Audiensi dan pertemuan di UPT Terkait	Penyelenggaraan <i>fullday meeting</i> di Hotel	-Audiensi dan pertemuan di UPT Terkait

- d. RS Jiwa Marzoeki Mahdi Bogor pada 27 Mei 2024 dengan narasumber berasal dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, P2KASN, Biro OSDM. Sementara peserta dari RSJMM ialah Direktur perencanaan keuangan dan layanan operasional RSJ MM, Perwakilan Tim Champion, Tim Humas. Materi yang disampaikan oleh BiBiro Komunikasi dan Pelayanan Publik, seputar peran komunikasi internal dengan kesehatan organisasi (*Organization Health Index*) selain itu juga berbagai bentuk kegiatan Diforkin yang sudah dilaksanakan. Sementara P2KASN menyampaikan Pengantar Pentingnya

Gerakan Perubahan Budaya Kerja Kemenkes dan Ringkasan 3 Tema Ritual Budaya Kerja. Selain bimtek Tim juga melakukan pengambilan konten branding institusi yang ditayangkan di kanal Instagram @lifeatkemenkes dan berkolaborasi dengan IG @pkjn_rsjmmbogor



Suasana Bimtek Bersama dengan Humas



Hasil Konten "Single Tasking vs Multi Tasking"



Hasil Konten: "Capsay Fisioterapis"

- b. RS dr. Sitanala Banten pada 7 Juni 2024, dengan Narasumber dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik. Untuk peserta dari RS Sitanala berasal dari Tim Humas. Dalam bimtek diterangkan mengenai kegiatan Diforkin sebagai bagian dari Transformasi Internal. Tim juga melakukan pengambilan konten branding institusi yang ditayangkan di kanal Instagram @lifeatkemenkes dan berkolaborasi dengan IG @rsupdrsitanalaofficial.



Hasil Konten "Capsay Terapi Wicara"



Hasil Konten "Berkurban ala RSUP Sitanala"

- c. RS Paru Ario Wirawan dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Salatiga yang diselenggarakan pada 3 Juli 2024. Bimtek di RS Paru Ario Wirawan dilakukan bersamaan dengan pertemuan Penguatan Budaya Kerja dan sosialisasi penggunaan KMS yang dilakukan oleh P2KASN. Sementara di Balai Laboratorium Kesehatan Lingkungan dilakukan dengan metode Audiensi dengan pihak Hukormas. Dalam bimtek diterangkan mengenai kegiatan Diforkin sebagai bagian dari Transformasi Internal. Tim juga melakukan pengambilan konten branding institusi yang ditayangkan di kanal Instagram @lifeatkemenkes dan berkolaborasi dengan IG @bbkl_salatiga dan @rspawssalatiga.



Bimtek Komunikasi Interndal dengan BBLKL Salatiga



Hasil Konten "Capsay kolaborasi @bbkl_salatiga dan @rspawssalatiga"

- d. Bapelkes Semarang pada 8 Agustus 2024. Kegiatan bimtek diselenggarakan di sela-sela Kunjungan Lapangan Tematik Media ke Jawa Tengah. Untuk peserta dari Bapelkes Semarang berasal dari Tim Humas. Dalam bimtek diterangkan mengenai kegiatan Diforkin sebagai bagian dari Transformasi Internal. Tim juga melakukan

pengambilan konten branding institusi yang ditayangkan di kanal Instagram @lifeatkemenkes dan berkolaborasi dengan IG @bapelkessemarang



Hasil Konten “Capsay Widyaiswara”



Proses pembuatan Konten

- e. Pertemuan Bimtek Komunikasi Internal dan Budaya Kerja bagi UPT Kemenkes Jatim yang diselenggarakan pada 19 September 2024. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Komunikasi Internal bagi UPT Jawa Timur akan dilakukan di Hotel Mercure Grand Mirama Kota Surabaya. Perwakilan UPT yang hadir berasal dari RS Radjiman Wediodiningrat Malang, BKK Surabaya, Balai Besar Labkesmas Surabaya, Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya, Poltekkes Surabaya, Poltekkes Malang. Total peserta berjumlah 40 orang terdiri dari Humas, Analis SDM, Pustakawan, dan Jabfung lainnya. Pemateri terdiri dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Perwakilan P2KASN, Praktisi Konten Kreator. Materi yang disampaikan seputar Paparan Budaya Kerja, Taktik Membuat Konten Video Singkat dan Penyusunan Konten *Plan*. Sebelumnya tim juga berkunjung ke BPAFK Surabaya untuk pembuatan konten Jabfung Elektromedis dan penjelasan mengenai kegiatan komunikasi internal dan dilanjutkan berkunjung ke Poltekkes Surabaya untuk melihat pengelolaan perpustakaan disana.
- f. Prodi Keperawatan Kampus 8 Purwokerto - Poltekkes Semarang dilaksanakan pada 23 Desember 2024. Dengan Narasumber Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dan P2KASN. Peserta dari pusat lainnya yaitu: Ditjen Nakes dan Biro OSDM. Materi yang disampaikan seputar Pelayanan Prima, Pengisian KMS dan Pengembangan Kompetensi. Untuk peserta dari Poltekkes berasal dari para dosen, lektor, humas, tenaga pendidik dan Tim Humas. Tim juga melakukan pengambilan konten *branding* institusi yang ditayangkan di kanal Instagram @lifeatkemenkes dan berkolaborasi dengan IG @instanursing_merc dan @polkessemarang.



Bimtek Komunikasi Internal dengan Prodi Keperawatan Kampus 8 Purwokerto - Poltekkes Semarang



Persiapan pembuatan konten



Hasil Konten POV Akhir Tahun Dosen vs Mahasiswa

- g.** BKK Kelas I Cilacap dilaksanakan pada 24 Desember 2024. Dengan Narasumber Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dan P2KASN. Peserta dari pusat lainnya yaitu: Ditjen Nakes dan Biro OSDM. Materi yang disampaikan seputar Pelayanan Prima, Pengisian KMS dan Pengembangan Kompetensi. Untuk peserta dari BKK Kelas I Cilacap berasal dari perwakilan Tim Humas, Champion, dan Adum. Tim juga melakukan pengambilan konten branding institusi yang ditayangkan di kanal Instagram @lifeatkemenkes dan berkolaborasi dengan IG @bkk_kelas1cilacap



Hasil Konten "Capsay Elektromedis"



Hasil Konten "Pose Foto Sesuai Generasi"

2. Diforkin Award (Festival Konten Budaya Kerja)

Dalam rangka mendorong efektivitas internalisasi dan percepatan diseminasi informasi Budaya Kerja baru, maka dilakukan berbagai upaya, salah satunya Festival Konten Budaya Kerja Kemenkes 2024 yang diselenggarakan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pemberian penghargaan pada satker/uker dalam pembuatan video terkait budaya kerja baru kemenkes yang dilaksanakan di lingkungan kerja masing-masing. Video yang dibuat adalah media yang nantinya digunakan untuk menyebarkan informasi yang memiliki banyak manfaat untuk meningkatkan kemampuan berpikir, meningkatkan pengetahuan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan dimuat dalam *Knowledge Management System* (KMS). Rentang waktu festival konten budaya kerja yaitu:

- Batas Pengumpulan Video : 25 Mei 2024
- Masa Penjurian : 26 - 27 Mei 2024
- Pengumuman Lomba : 28 Mei 2024
- Penganugerahan Pemenang : 30 Mei 2024

Dewan Juri Festival Konten Budaya Kerja terdiri dari akademisi, praktisi dan internal Kemenkes, telah melakukan seleksi terhadap video konten yang dikumpulkan sampai dengan 25 Mei 2024. Jumlah peserta yang mengumpulkan video sebanyak 93 satker/uker di lingkungan Kementerian Kesehatan, selanjutnya dilakukan seleksi administrasi hingga didapatkan 42 peserta yang memenuhi syarat dan ketentuan administrasi. Setelah dilakukan penilaian konten video berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dewan juri Festival Konten Budaya Kerja Kementerian Kesehatan 2024 menetapkan 10 (Sepuluh) terbaik Festival Konten Budaya Kerja Kementerian Kesehatan 2024 sebagai berikut:

- a. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta
- b. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar
- c. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya
- d. Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
- e. RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
- f. Inspektorat Jenderal
- g. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok
- h. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banten

- i. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Panjang
- j. Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik.

Dari hasil penjurian, terpilih 3 terbaik pilihan dewan juri yakni:

- a. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta
- b. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar
- c. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya



3. Pengelolaan Newsletter Digital (KOMINT)

Dalam mendukung Transformasi Sistem Kesehatan agar tersampaikan dan terinternalisasi di lingkungan internal Kementerian Kesehatan, telah disusun inisiatif program *Internal Transformation Office* melalui kegiatan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Internal (Diforkin). Ada 10 kegiatan di dalam Diforkin. Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik turut terlibat dalam 3 kegiatan diantaranya, yaitu melalui 1) newsletter

yang akan disebarluaskan melalui email blast, e office dan *WA blast*; 2) kegiatan dengan para pengelola komunikasi internal di masing-masing satker serta 3) mengoptimalkan pemanfaatan media yang saat ini sudah tersedia.

Pada tahun 2024, *Newsletter* Digital dikeluarkan dalam bentuk *WA Blast* sementara diseminasinya menggunakan media yang telah ada, seperti Instagram @lifeatkemenkes dan portal E Office.

a. Paid media: *WA Blast* “Sehat Negeriku”

Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik bekerja sama dengan penyedia jasa *WA Business Suite* untuk mengirimkan pesan total **12 pesan *WA Blast* dalam satu tahun kepada ASN Kemenkes**. Pesan *WA* berisikan informasi terkait transformasi internal, ucapan hari besar kesehatan/keagamaan, maupun undangan webinar.

No	Bulan	Konten	Tangkapan Layar
1	Januari	Ucapan Tahun Baru (Seluruh Pegawai - 49.939 pesan <i>delivered</i>)	

2	Februari	Launching Budaya Kerja (Seluruh Pegawai - 48.214 pesan <i>delivered</i>)	 MENYAMBUT GERAKAN PERUBAHAN BUDAYA KERJA KEMENKES Untuk mendukung implementasi 6 pilar transformasi kesehatan, dilakukan penguatan pilar ke-7 yaitu transformasi internal berbasis nilai-nilai dasar ASN BERAKHLAK, (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, & Kolaboratif). Pilar tersebut menjadi penunjuk arah pembangunan kesehatan menuju KEMENKES HEBAT, INDONESIA SEHAT. Tahun 2024, dicanangkan sebagai tahun akselerasi transformasi internal, dengan salah satu program baru yaitu peluncuran gerakan perubahan pedoman budaya kerja Kemenkes. Mempertimbangkan situasi peran Kemenkes & kondisi organisasi, maka untuk mendorong efektivitas internalisasi budaya kerja, difokuskan pada 3 tema perubahan budaya kerja: Eksklusif Efektif, Cara Kerja Baru, dan Pelayanan Unggul. Tema tersebut menjadi visi perubahan budaya kerja Kemenkes. Unduh: penjabaran lengkapnya silakan unduh Pedoman Budaya Kerja dan rebranding identitas Kemenkes disini 4:19 PM Unduh
3	April	Ucapan Selamat Lebaran (seluruh Pegawai - 35.780 pesan <i>delivered</i>)	 Selamat Idulfitri Kepada Yth. Bapak/Ibu/Kawan, Selamat Idul Fitri! Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin. Yuk, saling memaafkan! Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin. Goodbye Dhuhri! Atas nama Menteri Kesehatan @Taufikurrahmanidrus 10:46:33

		Undangan <i>Pulse Check</i> (seluruh pegawai - 32.281 pesan <i>delivered</i>)	 Ayo Lakukan Pengisian SURVEI PULSE CHECK SEMESTER I TAHUN 2024 PERIOD PENGISIAN 22 APRIL - 3 MEI 2024 di Minimalkan Survei https://www.kemkes.go.id/PulseCheck Partisipasi aktif sangat menentukan suksesnya program transformasi internal Kemenkes. Dengan mengisi survei ini, kami dapat mengetahui tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan transformasi internal Kemenkes. Link Survei: www.kemkes.go.id/PulseCheck Partisipasi Bapak, Ibu, teman-teman Kemenkes semua sangat penting untuk kami. Dengan partisipasi aktif, kami dapat mengetahui tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan transformasi internal di lingkungan Kementerian Kesehatan. https://www.instagram.com/kesdipk/kemkes https://www.facebook.com/kemkes 11.08.2024
4	Mei	Ucapan Waisyak Bagi Umat Budha (Pegawai Beragama Budha - 39 pesan <i>delivered</i>)	 Kepada Yth. Ibu Erni Selamat Hari Raya Waisak 2568 BE. <i>Semoga cahaya Dharma selalu menerangi kehidupan Anda dengan kebahagiaan dan kedamaian.</i> Salam sehat 🙏 #transformasikesehatan #KemenkesHebatIndonesiaKuat Pesan satu arah ini dikirimkan oleh Tim Diforin Kemenkes 4.31 AM

5	Juli	Promo Kemencast #84 MENJAGA INTEGRITAS DAN MORALITAS ASN KEMENKES (Seluruh Pegawai - 32.638 pesan delivered)	 ASN KEMENKES YANG BER-INTEGRITAS & BER-MORAL TINGGI Yth. Bapak/Ibu Temmy Sudah sepatutnya kita menyayangi instansi tercinta kita, Kemenkes RI, dengan menjaga integritas dan moralitas sebagai ASN. Selain itu penting juga menjaga reputasi diri, menjaga nama kita dan menjaga Kemenkes, agar menjadi organisasi yang dapat dipercaya oleh publik. 🙏 Berikut sepotong pesan dari Iwan Murti Utami pada Kemencast #84 mengenai MENJAGA INTEGRITAS DAN MORALITAS ASN KEMENKES. Masih banyak insight positif yang bermanfaat buat kita semua. Untuk itu spton selengkapnya pada: https://link.kemkes.go.id/Kemencast84 Selamat menyaksikan! 🎉 #ASHKemenkes_BerAKHLAK #sehatitangkapkorupsi Pesan kita akan ini disebarluaskan oleh Yth Ditkokes
6	Agustus	Undangan <i>Global Expert Session #1 Brazil's Primary Care System and Reforms: Lesson for Other Countries</i> (seluruh pegawai - 27.769 pesan delivered)	 Kepada Yth. Temmy Halo para ASN terkemuka! Kemendiknas Corpud bekerjasama dengan Akademi Global menyelenggarakan webinar global expert series, dengan berbagai topik menarik dan mengundang pembicara internasional yang berkompeten, sehingga acaranya pasti "saging" banget dan inspiring tentunya. 🙌 Kami mengundang Bapak/Ibu pada Webinar: Brazil's Primary Care System and Reforms: Lesson for Other Countries 📅: Kamis, 22 Agustus 2024 🕒: Pukul 09.00 - 11.00 WIB 📍: https://link.kemkes.go.id/Webinar22082024 Yuk ikuti webinarnya via Channel Youtube Kemenkes Corpud dan untuk calon sertifikat dapat mengikuti pembelajaran via EMS Course 🎓 Jangan sampai ketinggalan ya! 🙏 "Setiap ASN adalah pembelajar dan sebagai unit kerja adalah tempat belajar" -P2KASN- Pesan kita akan ini disebarluaskan oleh Yth Ditkokes

		Undangan <i>Global Expert Session #2</i> <i>"Leadership in Healthcare Quality: Driving Excellence and Patient Safety"</i> (Pegawai Ditjen Yankes - 35.022 pesan <i>delivered</i>)	 
--	--	--	--

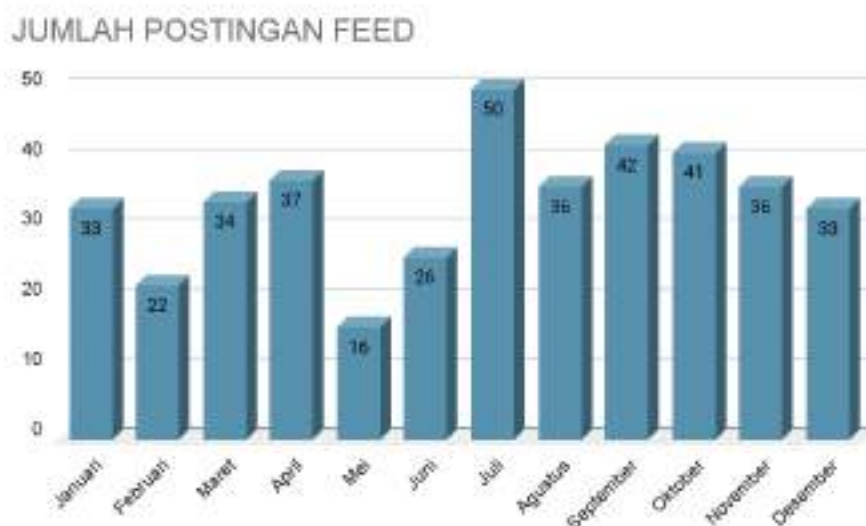
7	September	Undangan Webinar Platform Pembelajaran Digital (Seluruh Pegawai - 29.839 pesan <i>delivered</i>)	
8	Oktober	Undangan Webinar KMS (Seluruh Pegawai - 29.839 pesan <i>delivered</i>)	

9	November	Undangan Hai Fest (Karyawan Pusat - 3.177 pesan delivered) Ucapan HKN - 60 (Seluruh Pegawai - 46.306 pesan delivered)	 Sepak/tou Temmy Widayati, Insan Kemenkes. UNDANGAN HAI FEST Peringat HKH ke-60, Kemenkes akan mengadakan acara menarik Festival Inovasi Kesehatan (Hai Fest), berisi beragam inovasi lokal yang mendukung ketahanan kesehatan nasional. Kuk Hadir pada acara bertema "From Nature Nurture the Future" ini, Kamis-Sabtu, 7-9 November 2024 di Jakarta Convention Center (JCC). Ini dia kegiatannya: ✓ Pameran Inovasi Farmasi dan Alot ✓ Tampilan Kesehatan ✓ International Conference ✓ Pameran Kesehatan ✓ Pameran Penghargaan ✓ Music Performance ✓ Business Matching ✓ Immersive & Interactive Area Tersedia bus jemputan dan parkir. Kemenkes Raguma Solid ke lokasi acara.  Yth. Insan Kemenkes, Selamat Hari Kesehatan Nasional (HKH) ke-60, Sehat Mengeruk, Maju Indonesial! Tema HKH-60 "Gerak Bersama, Sehat Bersama" merupakan momentum bagi kita untuk menjaga kesehatan, membangun semangat dan optimisme untuk terus sehat, serta mengingatkan pentingnya peranannya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Mari kita bangun bersama budaya sehat, demi Indonesia Emas 2045, bahkan sampai ke generasi selanjutnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa bersama kita dan memberkati kita semua dengan kesehatan dan kebahagiaan. Semarakkan HKH ini dengan membuat IG story menggunakan frame pada link berikut: https://www.kemkes.go.id/story-hkh60 Selamat Sehat! Demikian pesan untuk ini. Atas nama Tim Eksekusi Komunikasi
---	----------	---	---

4. Diseminasi melalui Eksisting Media

Instagram merupakan media sosial ketiga yang paling banyak digunakan di Indonesia setelah YouTube dan Facebook. Instagram dipilih karena terlebih dahulu Biro OSDM telah memiliki instagram yang sudah memiliki 12 ribu *follower*. Selanjutnya akun *existing* ini disepakati untuk digunakan sebagai media sosial penyampai pesan kepada pegawai Kemenkes. Sampai dengan 06 Januari 2025 jumlah *follower* @lifeatkemenkes sebanyak 88.546 ribu *followers*.

Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik mengambil peran dalam pembuatan konsep konten, dan penyebarluasannya. Sementara untuk strategi *content pilar* dan *agenda setting* di diskusikan bersama tim Diforkin. Pada periode Januari s.d Desember 2024 (data s.d 6 Januari 2025) tim diforkin telah memposting konten (termasuk kolaborasi) dari akun lain dengan total konten sebanyak 403 konten sebagai berikut:



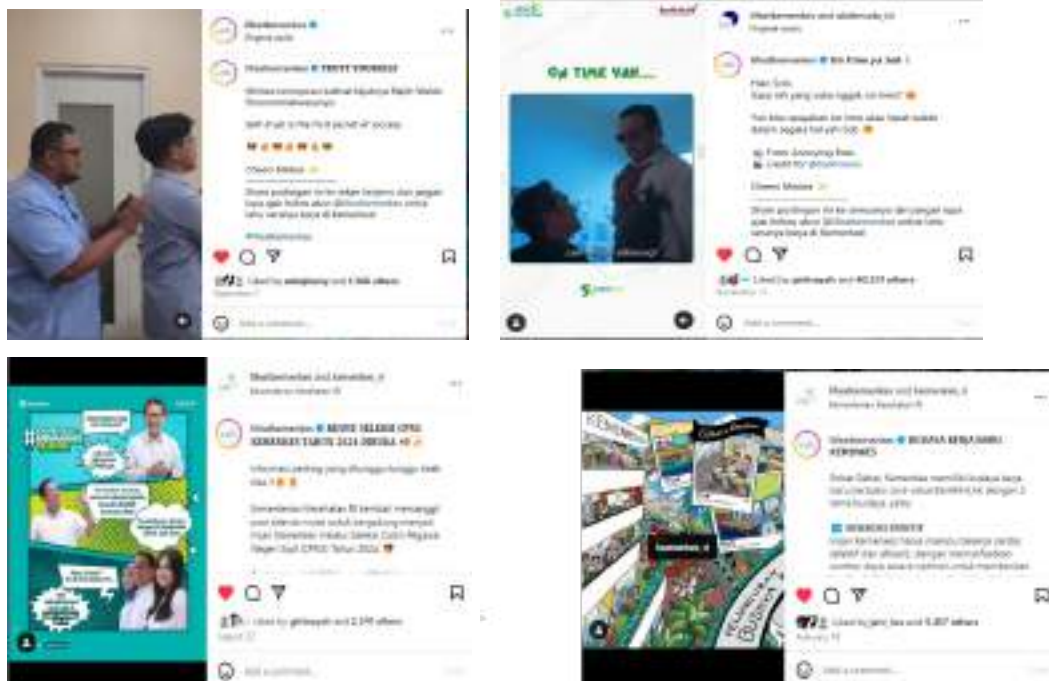
Konten pilar dalam akun @lifeatkemenkes dibuat beragam, diantaranya:

- Informasi umum kegiatan internal pegawai, ex: Townhall, Kegiatan Ramadhan, Mutasi Internal, dll;
- Informasi pengembangan kompetensi pegawai, ex: beasiswa, pelatihan, seminar, dsb;
- Informasi Kepegawaian, ex: rekrutmen pegawai;
- Monday motivation;
- Komik transformasi dan Ber-AKHLAK;
- EXIST: Hobi dan Komunitas Pegawai Kemenkes;
- CAPSAY cuap cuap santai seputar jabatan fungsional;
- konten bincang-bincang bersama pegawai Kemenkes terkait pengalaman maupun informasi bermanfaat lainnya;

i) Konten kolaborasi bersama unit lain atau UPT;

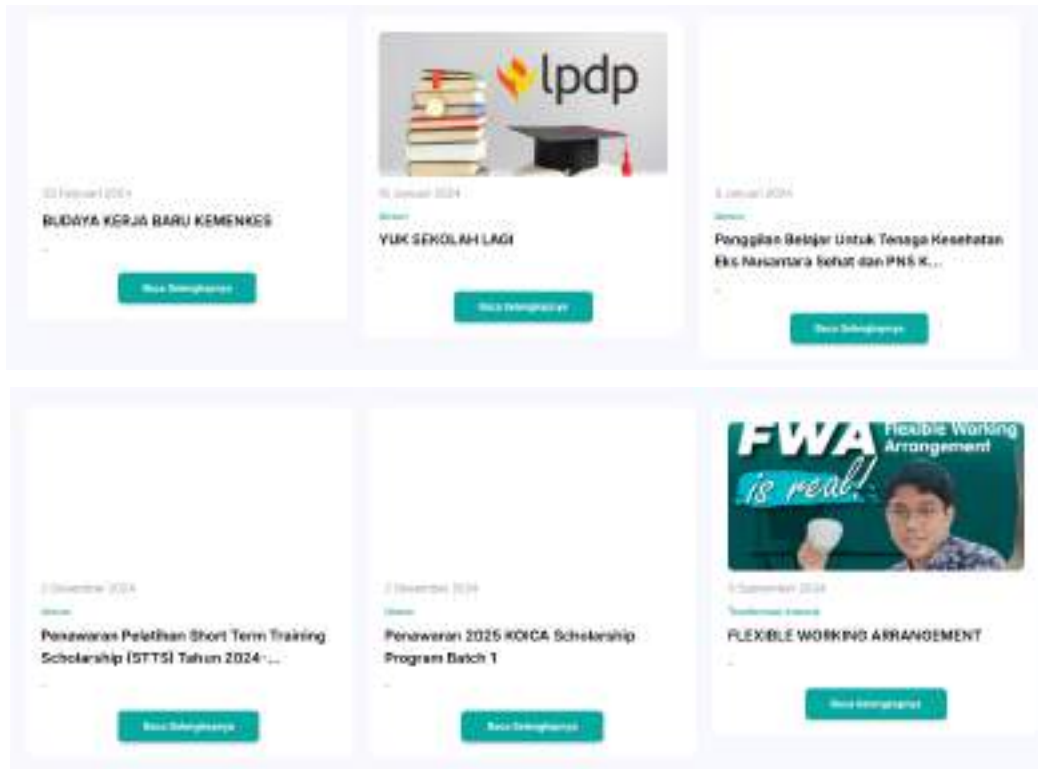


Beberapa konten yang banyak mendapatkan *reach* dan *impression* tinggi yaitu:



5. Owned Media (Portal E – Office)

Portal E Office juga menjadi kanal untuk penyebarluasan informasi transformasi kesehatan yang menyasar spesifik ASN Kemenkes. Selama semester 1 telah dikeluarkan sebanyak 6 konten informasi



6. Pengelolaan Pertemuan Komunikasi Internal (KOMINT)

Komunikasi internal dan budaya kerja merupakan hal yang saling mempengaruhi satu sama lain. Keduanya berperan penting dalam mewujudkan kesehatan organisasi. Oleh karenanya dibutuhkan kemampuan dalam membangun dan melaksanakan komunikasi yang efektif dan berdampak di internal organisasi, agar tiga tema dalam budaya kerja baru, yakni eksekusi efektif, cara kerja baru dan pelayanan unggul dapat lebih cepat diinternalisasikan dan diterapkan secara menyeluruh di lingkungan Kementerian Kesehatan. Maka dari itu diselenggarakan pertemuan Penguatan Komunikasi Internal bagi perwakilan unit utama dan unit kerja pada 4 September 2024 di Hotel Cityloog Tebet. Peserta pertemuan ialah perwakilan humas unit utama. Narasumber yang diundang ialah Fajaruddin Zakiany *Resonant Communication Designer Impactful Communication* yang mendukung Budaya Kerja Baru, Nurul Intan Permanasari PR Pertamina International EP Praktik Baik Komunikasi Internal di Korporasi.



7. Pertemuan Nasional Perpustakaan Kementerian Kesehatan

Pertemuan Nasional Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Kesehatan diselenggarakan sebagai sarana komunikasi baik bidang kehumasan dan kepustakawanan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Pertemuan ini menjadi ajang sosialisasi kebijakan, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme petugas pelayanan informasi yang mendukung Lembaga induknya (Kemenkes) dalam menjalankan kebijakan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat. Selain itu acara ini juga merupakan wadah untuk mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dan tantangan pengembangan kepustakawanan dan kehumasan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pertemuan Nasional Perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan dilaksanakan bersamaan dengan Pertemuan Nasional Humas Kemenkes yang dilaksanakan di Hotel Santika Kota Harapan Indah Bekasi, tanggal 29 sd 31 Mei 2024. Dengan mengambil tema “Akselerasi Transformasi Kesehatan Melalui Peran Humas dan Pustakawan” pertemuan dihadiri oleh 60 orang pustakawan dan pengelola perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berasal dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Setditjen Tenaga Kesehatan, Setditjen. BKPK, Poltekkes Kemenkes, RS Vertikal dan BBPK Corpu Kemenkes. Narasumber pertemuan nasional perpustakaan Kemenkes adalah Sekretaris Jenderal Kemenkes, Kepala Perpustakaan Nasional, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dan Pakar Literasi Informasi. Dalam pertemuan nasional perpustakaan Kemenkes tersebut dilaksanakan pula MOU (Nota Kesepahaman) antara Kementerian Kesehatan dan Perpustakaan Nasional dalam Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Perpustakaan.

	
Laporan panitia oleh KaBiro Komunikasi dan Pelayanan Publik	Penandatanganan MoU antara Kementerian Kesehatan dengan Perpustakaan Nasional RI diwakili oleh Karo Hukum Perpustakaan dengan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik disaksikan oleh Plt. Kepala Perpustakaan RI
	
Keynote dan sekaligus membuka acara pertemuan oleh Sekjen Kemenkes	Sambutan plt. Kepala Perpustakaan Nasional (Prof. E. Aminudin Aziz, M.A., Ph.D)
	
Peserta Pertemuan Perpustakaan Nasional 2024	

8. Pemilihan Perpustakaan Berinovasi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024

Perpustakaan memainkan peran penting dalam mendukung pelaksanaan berbagai program dalam sektor kesehatan, termasuk di dalamnya adalah transformasi sistem kesehatan yang tengah berlangsung. Dalam rangka mendukung transformasi sistem kesehatan, Perpustakaan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berperan untuk menyediakan informasi yang diperlukan oleh masyarakat, tenaga kesehatan, serta instansi terkait lainnya. Salah satu langkah penting yang diambil oleh Perpustakaan Kemenkes adalah menyelenggarakan Pemilihan Perpustakaan Berinovasi 2024 yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kompetensi, kualitas layanan, serta inovasi dalam mengelola dan menyebarkan informasi kesehatan.

Tema yang diangkat dalam pemilihan ini adalah “Peran Perpustakaan dalam Pengelolaan *Knowledge Management* dalam Mendukung Budaya Kerja Baru Kementerian Kesehatan”. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memberi penghargaan kepada perpustakaan-perpustakaan yang telah berhasil menerapkan inovasi dalam mendukung budaya kerja baru, khususnya dalam pengelolaan manajemen pengetahuan (*knowledge management*) yang bermanfaat bagi transformasi sistem kesehatan.

Proses Pemilihan dan Tahapan Kegiatan:

- Persiapan Pembuatan Draft Pedoman Lomba (Juni - Agustus 2024)
- Pengesahan Pedoman Lomba (29 Agustus 2024)
- Pengumuman Lomba dan Pengiriman Makalah (9 September 2024)
- Penjurian dan Penentuan Nominator (4 Oktober 2024)
- Wawancara (10 Oktober 2024)
- Malam Anugerah Penghargaan (29 November 2024)



Hasil Pemilihan Perpustakaan Berinovasi

Dari 18 makalah dan video yang diterima, dewan juri memilih 10 nominator terbaik untuk mengikuti tahap wawancara. Adapun perpustakaan yang berhasil lolos ke tahap wawancara adalah:

- a) Perpustakaan Bapelkes Cikarang
- b) Perpustakaan Bapelkes Batam
- c) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
- d) Perpustakaan BKPK
- e) Perpustakaan Politeknik Kesehatan Aceh
- f) Perpustakaan Politeknik Kesehatan Semarang
- g) Perpustakaan Politeknik Kesehatan Jakarta 3
- h) Perpustakaan Politeknik Kesehatan Riau
- i) Perpustakaan Politeknik Kesehatan Yogyakarta
- j) Perpustakaan Politeknik Kesehatan Surabaya

Setelah melalui tahap wawancara, dewan juri memutuskan tiga pemenang terbaik sebagai berikut:

- 1. **Perpustakaan Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang** – dengan nilai 549,7
- 2. **Perpustakaan Balai Pelatihan Kesehatan Batam** – dengan nilai 535,79
- 3. **Perpustakaan Politeknik Kesehatan Riau** – dengan nilai 519,31

9. Bimbingan Teknis Perpustakaan

Akreditasi perpustakaan merupakan rangkaian kegiatan proses pengakuan formal oleh lembaga akreditasi perpustakaan yang menyatakan bahwa lembaga perpustakaan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengelolaan perpustakaan. Adapun instrumen akreditasi tertuang dalam keputusan kepala perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 303 Tahun 2022 tentang instrumen akreditasi perpustakaan perguruan tinggi. Akreditasi bermanfaat untuk mengetahui posisi kinerja pengelolaan perpustakaan, citra perpustakaan, dan citra Lembaga.

Pengajuan akreditasi dilakukan secara *online* dan akan dilakukan penilaian pada institusi secara daring atau luring oleh asesor yang ditunjuk oleh perpusnas. Pengajuan berkas akreditasi bisa dikirim melalui <https://akreditasi.perpusnas.go.id>. Adapun beberapa pelaksanaan bimbingan teknis perpustakaan terkait pendampingan persiapan akreditasi yang sudah dilakukan selama tahun 2024 yaitu:

BIMBINGAN TEKNIS PERPUSTAKAAN TAHUN 2024

NO	LOKASI	TANGGAL
1	RSUP dr. J Leimena Ambon	26 sd 28 Maret 2024
2	RSP Dr. dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua	24 sd 26 April 2024
3	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto	24 sd 26 April 2024
4	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar	6 sd 8 Mei 2024
5	Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Makassar	6 sd 8 Mei 2024
6	Rumah Sakit Mata Makassar	6 sd 8 Mei 2024
7	Poltekkes Kemenkes Sorong	24 sd 26 Agustus 2024
8	RS Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso	29 Agustus 2024
9	RSAB Harapan Kita	30 Agustus 2024
10	RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan	9 September 2024
11	RSUP Ratatotok Buyat dan RSUP Kandou Manado	10 - 13 September 2024
12	BBPK Ciloto	19 sd 21 September 2024
13	RS Marzoeki Mahdi	26 September 2024
14	RS Jantung dan Pembuluh Darah	27 September 2024
15	RSKO Jakarta	27 September 2024
16	RSUP Persahabatan	3 Oktober 2024
17	RSPON	3 Oktober 2024
18	RSUP M. Djamil Padang dan RS Otak DR. Drs. M. Hatta Bukit Tinggi	21 sd 24 Oktober 2024
19	RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu	28 Oktober 2024





Bimbingan Teknis Akreditasi Perpustakaan di Perpustakaan UPT Kemenkes

10. Diklat Teknis Literasi Informasi Perpustakaan Kemenkes

Bimbingan literasi informasi perlu dikembangkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang merubah sumber literasi yang tadinya tercetak berubah menjadi sumber elektronik yang terbuka untuk semua masyarakat yang mengaksesnya. Akses yang terbuka mengakibatkan terjadinya kelimpahruahan informasi sehingga mempersulit pemustaka untuk mendapatkan informasi yang akurat, valid dan relevan. Untuk itu tantangan saat ini, pustakawan tidak hanya sekedar melayani pemustaka membaca dan meminjam buku tapi harus memiliki penguasaan keterampilan literasi informasi untuk diajarkan kepada pemustaka.

Keterampilan literasi informasi adalah kemampuan seorang pustakawan untuk mempelajari atau mengenali informasi yang dibutuhkan dan kemampuan untuk menemukan kembali informasi tersebut secara efektif dari mulai 1) menganalisa kebutuhan informasi, 2) strategi penelusuran, 3) pendayagunaan informasi, 4) sintesa informasi, dan 5) Etika profesi bidang informasi. Keterampilan literasi informasi dibutuhkan untuk dapat mengerjakan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan informasi secara efektif, efisien dan etis.

Keterampilan literasi informasi akan menciptakan sebuah generasi masyarakat berbasis informasi (*Information based society*) yang mampu belajar secara mandiri sepanjang hayat dan berdampak pada kualitas sosial ekonomi dan kultur suatu bangsa.

Keterampilan ini digunakan tidak hanya untuk menyelesaikan penelitian dan penulisan, namun juga dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi. Selain digunakan dalam pelayanan perpustakaan, literasi informasi juga merupakan salah satu kluster komponen uji kompetensi dalam sertifikasi pustakawan.

Perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan merupakan perpustakaan yang besar terdiri dari berbagai jenis yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada perpustakaan Kemenkes, perpustakaan unit utama, perpustakaan poltekkes, perpustakaan rumah sakit, perpustakaan bapelkes, perpustakaan balai dan loka yang memiliki pemustaka sesuai dengan jenis perpustakaannya. Begitu besar koleksi dan akses yang dimiliki perpustakaan

di lingkungan Kemenkes maka pustakawan perpustakaan perlu mendapat diklat literasi informasi guna meningkatkan kemampuan untuk memberikan bimbingan literasi informasi kepada pemustaka dan sebagai bekal untuk mengikuti Sertifikasi Literasi Informasi.



Kegiatan ini diselenggarakan secara swakelola dan kontraktual oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik (Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik), Pusat Pengembangan Kompetensi ASN (P2KSN) bekerjasama dengan lembaga diklat. Diklat dilaksanakan secara kontraktual selama 5 hari 4 malam di hotel. Peserta diklat adalah pustakawan dan pengelola perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan berjumlah 136 yang dibagi atas 4 *batch*, yaitu:

Diklat Literasi Informasi Tahun 2024

NO	KEGIATAN	JUMLAH PESERTA	LOKASI	TANGGAL
1	<i>Batch 1</i>	40 orang	Hotel Grand Tjokro Jl. Raya Daan Mogot No. 635, Jakarta Barat	5 sd 9 Maret 2024
2	<i>Batch 2</i>	39 orang	HI Hotel Senen Jl. Pasar Senen No. 3 Blok 3, Senen Jakpus	13 sd 17 Mei 2024
3	<i>Batch 3</i>	20 orang	Fashion Hotel Legian, Jl. Legian No. 121, Kuta, Bali	11 sd 15 Juni 2024
4.	<i>Batch 4</i>	37 orang	HI Hotel Senen, Jl. Pasar Senen No. 3 Blok 3, Senen Jakpus	9 sd 13 Juli 2024
Jumlah		136 orang		

11. Sertifikasi Pustakawan Kemenkes

Sertifikasi Pustakawan merupakan proses standarisasi kompetensi bagi pustakawan yang dilakukan sesuai amanah UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Oleh karena itu Sertifikasi Pustakawan dipandang perlu untuk dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi pustakawan dan kualitas layanan perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik berdasarkan Permenkes No. 58 tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Kesehatan pasal 4 dinyatakan sebagai Pembina Jabatan Fungsional Pustakawan di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Salah satu bentuk pembinaannya, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik berencana mengadakan sertifikasi kolektif pustakawan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Sertifikasi pustakawan merupakan salah satu unsur pendukung akreditasi perpustakaan dan upaya peningkatan kompetensi pustakawan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan layanan perpustakaan. Sehubungan dengan hal tersebut peserta yang mengikuti sertifikasi pustakawan adalah pustakawan yang perpustakaanannya akan melaksanakan akreditasi dan pustakawan yang akan meningkatkan kompetensinya.

Tahun 2024 ini pelaksanaan sertifikasi pustakawan dilaksanakan tanggal 5 s/d 7 Agustus 2024 di BBPK (Balai Besar Pelatihan Kesehatan) Jakarta Kampus Hang Jebat. Sertifikasi mengambil klaster :

- a. Pelaksanaan Layanan Dasar Perpustakaan;
- b. Pelaksanaan Promosi Layanan Perpustakaan;
- c. Pelaksanaan Pengatalogan Deskriptif;
- d. Pengembangan Kemampuan Literasi Informasi.

Adapun jumlah peserta yang mengikuti sertifikasi sebanyak 40 orang. Para asesi adalah PNS dan non PNS berlatar belakang Ilmu Perpustakaan dan juga sebagai pengelola perpustakaan di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Adapun setiap asesor akan menguji 4 – 5 asesi. Penguji berasal dari Perpustakaan Nasional RI dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan sebanyak 8 orang asesor dan 3 orang pendamping dari Perpustakaan Nasional. Adapun rangkaian pelaksanaan kegiatan sertifikasi Pustakawan Kemenkes 2024 sebagai berikut:

- a. Observasi Tempat Untuk Kegiatan (5 Agustus 2024)
- b. Pemukaan Sertifikasi Pustakawan Kemenkes 2024 (6 Agustus 2024)
- c. Pelaksanaan Sertifikasi Pustakawan Kemenkes 2024 (6-7 Agustus 2024)



Hasil Sertifikasi Pustakawan Kemenkes berdasarkan Berita Acara Asesmen Kompetensi Pustakawan Kementerian Kesehatan Tahun 2024 No. 139/CI/LSP.107/PUSTAKAWAN/VII.2024 sebagai berikut:

Skema Sertifikasi	Jumlah Peserta	Kompeten (K)	Belum Kompeten (BK)
Layanan Dasar Perpustakaan	26	19	7
Pelaksanaan Pengatalogan Deskriptif	3	3	-
Pelaksanaan Promosi Layanan Perpustakaan	6	6	-
Pengembangan Kemampuan Literasi Informasi	5	5	-
Jumlah	40	33	7

12. Pengelolaan Perpustakaan Kementerian Kesehatan

a) Alih Media

Alih media merupakan salah satu kegiatan yang melekat pada fungsi Perpustakaan Kementerian Kesehatan sebagai Pusat Repository Karya Tulis, Karya Cetak dan Karya Rekam yaitu wajib melaksanakan alih media seluruh konten lokal yang dimiliki Kemenkes untuk menjamin kelestarian isi koleksi. Selain itu di era teknologi, dalam

pelayanannya perpustakaan Kemenkes sudah menggunakan aplikasi berbasis otomasi. Menuju era terwujudnya perpustakaan digital, Perpustakaan Kementerian Kesehatan melaksanakan alih media koleksi buku terbitan Kemenkes untuk dijadikan format digital yang dapat terintegrasi dengan aplikasi layanan perpustakaan. Tahun 2024 buku terbitan Kemenkes yang telah dialihmediakan sebanyak 373 judul, sedangkan jumlah halaman yang dialihmediakan dan diolah serta diintegrasikan dengan sistem aplikasi otomasi Inlislite adalah sekitar 38.786 halaman. Selain pada OPAC, hasil alih media juga dapat dilihat pada *repository* Kementerian Kesehatan <https://repository.kemkes.go.id/>



OPAC dan Repository

b) Kunjungan Langsung Pemustaka Perpustakaan

Di akhir tahun 2021 Perpustakaan Kementerian Kesehatan telah ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional RI sebagai perpustakaan khusus dengan standar akreditasi A. Seiring dengan ditetapkannya Perpustakaan Kementerian Kesehatan sebagai Perpustakaan khusus dengan standar A, maka tahun 2022 Perpustakaan Kementerian Kesehatan telah melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Perpustakaan Kementerian Kesehatan mulai membuka jam operasional pada pukul 07.00 s/d 16.00 (di hari kerja Senin s/d Kamis), sedangkan 07.00 s/d 16.30 (di hari Jumat), sedangkan hari Sabtu dan Minggu serta libur nasional layanan perpustakaan ditutup untuk pemustaka.

Perpustakaan Kementerian Kesehatan juga meningkatkan kualitas layanan dengan menjadikan perpustakaan digital. Berbagai aplikasi dikembangkan untuk memberikan layanan kepada pemustaka diantaranya aplikasi inlislite, electronic library Kesehatan (E-Likes), repository koleksi perpustakaan dan revitalisasi Katalog Induk Nasional Kesehatan (KINK).

Layanan perpustakaan Kementerian Kesehatan meliputi layanan simpan pinjam koleksi perpustakaan baik melalui kunjungan langsung maupun perpustakaan digital (E-Likes). Perpustakaan Kemenkes juga menyediakan layanan anak dengan memberikan story telling kepada pengunjung anak.

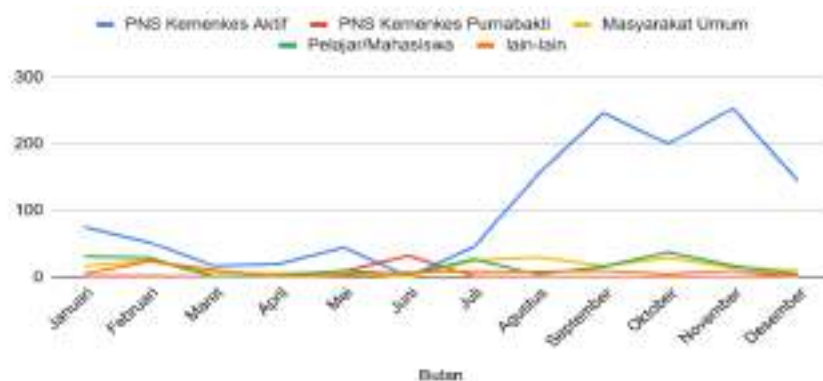
Bulan Maret sd Juni 2024 Perpustakaan Kementerian Kesehatan melaksanakan *stock opname*, yaitu melakukan proses pencocokkan data buku yang ada di rak dengan data yang ada di database. Selain *stock opname* Perpustakaan Kemenkes juga melakukan penyiangan (*weeding*) yaitu upaya pengeluaran jumlah koleksi perpustakaan yang sudah dianggap tidak relevan lagi atau *out of date*.

**Tabel Laporan Pengunjung *Offline* Perpustakaan Kemenkes
Bulan Januari - Desember Tahun 2024**

Bulan	PNS Kemenkes Aktif	PNS Kemenkes Purnabakti	Masyarakat Umum	Pelajar/ Mahasiswa	Lain- lain	Jumlah
Januari	75	1	17	31	5	129
Februari	52	1	25	29	24	131
Maret	17	0	6	0	11	37
April	20	0	5	2	0	27
Mei	44	9	7	10	3	73
Juni	1	32	0	4	7	44
Juli	45	1	25	27	9	107
Agustus	155	0	30	4	8	197
September	246	0	17	16	10	289

Oktober	200	0	29	37	4	270
November	253	0	15	17	10	285
Desember	144	3	10	4	0	161
JUMLAH						1.750

Data Pengunjung *Offline* Perpustakaan Kemenkes
Januari-Desember Tahun 2024



Peminjaman dan Pengembalian Buku Perpustakaan Kemenkes
Januari-Desember Tahun 2024



Tabel Laporan Pengunjung E-Likes Perpustakaan Kemenkes

Bulan Januari - Desember Tahun 2024

Bulan	Pendaftaran E-Likes	Pengunjung E-Likes	Pembaca E-Likes	Peminjam E-Likes	Jumlah
Januari	411	2748	604	180	3943
Februari	335	2683	196	562	3776
Maret	445	2642	572	170	3829
April	393	1806	362	103	2664
Mei	557	2470	416	107	3550
Juni	491	2273	338	88	3190
Juli	83	631	121	48	883
Agustus	383	2574	494	176	3627
September	336	2152	428	147	3063
Oktober	275	1795	394	91	2555
November	118	1375	317	161	1971
Desember	39	531	110	71	751

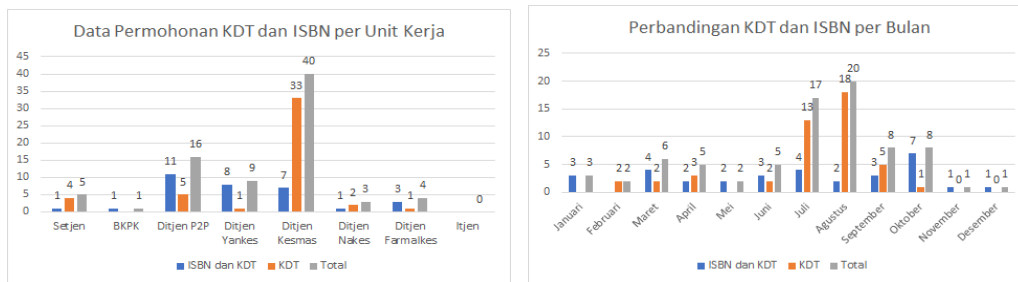
JUMLAH	33.802
--------	--------



c) Permohonan Katalog dan Terbitan (KDT) dan *International Standard Book Number* (ISBN)

Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik merupakan Penanggung Jawab dalam Pengajuan Nomor ISBN ke Perpustakaan Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 38 Tahun 2015 tentang Penerbitan dan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di lingkungan Kementerian Kesehatan. Perpustakaan Kementerian Kesehatan merupakan perpanjangan tangan Perpustakaan Nasional dalam menghimpun koleksi nasional. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pendataan Satu Pintu Hasil Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Layanan Angka Standar Buku Internasional (*International Standard Book Number*) merupakan dasar dalam Permohonan KDT dan ISBN.

Pada Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Layanan Angka Standar Buku Internasional (*International Standard Book Number*) juga mengatur persyaratan buku yang boleh mengajukan ISBN antara lain bukan laporan atau buku untuk lingkup kecil suatu institusi harus buku yang sasarannya masyarakat luas. Beberapa buku Kemenkes ada yang direkomendasikan cetak tanpa ISBN dikarenakan hanya untuk lingkup Kemenkes saja dan termasuk dalam jenis kategori terbitan yang terbit tanpa ISBN misalnya Modul.



Pengajuan permohonan KDT ISBN cukup beragam dari 6 Unit Utama, yaitu Ditjen Kesehatan Masyarakat, Ditjen P2P, Ditjen Pelayanan Kesehatan, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Sekretariat Jenderal dan BKPK. Satuan kerja paling banyak mengajukan permohonan KDT dan ISBN tahun 2024 yaitu Ditjen Kesehatan Masyarakat sebanyak 55 judul dengan rincian 18 judul untuk buku dengan pengajuan KDT ISBN dan 37 judul buku dengan pengajuan KDT saja.

Sebagai informasi semua terbitan Kementerian Kesehatan wajib mencantumkan nomor KDT sebagaimana telah diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2015 tentang penerbitan dan serah simpan karya cetak dan karya rekam di lingkungan Kementerian Kesehatan. Dengan terbitnya Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Layanan Angka Standar Buku Internasional (*International Standard Book Number*) menyebabkan tidak semua terbitan Kementerian Kesehatan memperoleh rekomendasi nomor ISBN oleh Perpustakaan Nasional, hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya kriteria buku dalam mendapatkan nomor ISBN. Salah satu syarat sebuah buku mendapat nomor ISBN yaitu sasaran buku untuk masyarakat luas (bukan untuk lingkungan internal Lembaga), bukan modul, bukan merupakan laporan, hasil penelitian hasil kajian, memiliki jumlah halaman lebih dari 49 halaman, dsb.

Berdasarkan capaian pada Semester I dan II diperoleh hasil secara keseluruhan selama tahun 2024 sebanyak 78 judul, bahwa terjadi permohonan pengajuan ISBN KDT paling banyak diajukan pada bulan Agustus dan yang paling banyak mengajukan permohonan dan satuan kerja yang paling banyak mengajukan adalah Ditjen Kesehatan Masyarakat, sebanyak 40 pengajuan yang terdiri atas 7 ISBN KDT dan 33 KDT.

13. Pathfinder, Infografis dan Literasi Informasi Perpustakaan Kemenkes

a. Pathfinder

Merupakan panduan yang disusun oleh pustakawan, yang berisikan daftar sumber informasi dalam berbagai bentuk, seperti buku, website, jurnal, jurnal online, bahkan video berdasarkan topik tertentu untuk dapat membantu pemustaka mendapatkan sumber

informasi yang tepat mengenai topik tertentu. Pada Perpustakaan Kementerian Kesehatan RI, *pathfinder* dibuat dengan berisikan informasi umum tentang topik, buku, artikel jurnal, video dan artikel berita. *Pathfinder* yang dimiliki oleh Perpustakaan Kementerian Kesehatan RI dibuat dalam format pdf dan dapat diakses pada website Perpustakaan Kementerian Kesehatan RI (<https://perpustakaan.kemkes.go.id/>) dalam tampilan *Flipbook*. *Pathfinder* milik Perpustakaan Kementerian Kesehatan mengambil topik mengenai hari-hari besar kesehatan, informasi mengenai penyakit & hal kesehatan, serta informasi umum. Dalam targetnya, *Pathfinder* ditargetkan dibuat sebanyak 100 buah pada setiap tahunnya.

b. Infografis

Merupakan sebuah representasi visual dari sebuah informasi atau data yang dibuat menjadi elemen visual. Infografis merupakan sebuah sarana untuk menyampaikan data atau infografis yang dipadukan dengan berbagai macam objek visual. Fungsi utama dari infografis yaitu membuat audiens tertarik sehingga mereka mau menyimak informasi atau sebuah yang disajikan. Pada Perpustakaan Kementerian Kesehatan RI dibuat beberapa infografis dan diunggah melalui laman Instagram milik Perpustakaan Kementerian kesehatan RI. Infografis yang diunggah biasanya membahas mengenai hari-hari besar kesehatan serta informasi-informasi kesehatan. Bahan infografis biasa didapatkan melalui koleksi Perpustakaan Kementerian Kesehatan RI dan sumber informasi digital seperti artikel jurnal dan artikel website.

c. Literasi Informasi

Literasi informasi merupakan kemampuan seorang individu untuk mengenali kapan informasi tersebut dibutuhkan serta untuk menemukan, mengevaluasi, efektif menggunakan dan mengkomunikasikan informasi dalam berbagai format. Pustakawan sebagai *The Guardian of Information* harus mengetahui informasi apa yang dibutuhkan dan dapat ditawarkan kepada pustakawan. Literasi informasi pada Perpustakaan Kementerian Kesehatan RI merupakan sebuah produk yang dibuat untuk memudahkan pemustaka mendapatkan informasi secara cepat dan sebagai sebuah referensi. Literasi Informasi di Perpustakaan Kementerian Kesehatan RI dibuat dalam bentuk sebuah paket informasi yang berisikan sebuah jawaban umum dari sebuah pembahasan topik beserta informasi mengenai topik tersebut. Adapun tahapan dalam pembuatan literasi informasi yaitu: identifikasi kebutuhan informasi, penelusuran informasi, evaluasi informasi, analisis sintesis dan diseminasi informasi.

14. Bimbingan Pemustaka Kader Posyandu Berprestasi

Bimbingan pemustaka yang dilakukan Perpustakaan Kementerian Kesehatan kepada kader Posyandu merupakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader dalam mengakses dan memanfaatkan informasi kesehatan yang bertujuan untuk peningkatan literasi informasi yaitu memberikan pemahaman pencarian dan penggunaan sumber informasi yang relevan dalam mendukung tugas di lapangan, dan penguatan kapasitas mengenai pengetahuan terkait koleksi perpustakaan terkait kesehatan masyarakat yang dapat diakses melalui laman perpustakaan yaitu repository.kemkes.go.id dan <https://kubuku.id/download/electronic-library-kemenkes> sebagai aplikasi android. Bimbingan pemustaka kader posyandu ke Kementerian Kesehatan merupakan rangkaian kegiatan kunjungan kader posyandu yang diundang ke Jakarta sebagai apresiasi pemberian penghargaan penghargaan kader posyandu berprestasi dari seluruh Indonesia. Kader posyandu memiliki tugas memastikan masyarakat sehat dengan edukasi tindakan promotif dan preventif mengajarkan cara hidup sehat dan memastikan pelaksanaan imunisasi bagi anak. berdasarkan hal tersebut, dengan bimbingan pemustaka kader posyandu diharapkan mampu mengakses informasi kesehatan yang efektif sebagai peningkatan pelayanan di posyandu dan membantu kader dalam pemberian informasi yang akurat kepada masyarakat. Pada akhir kegiatan, perpustakaan menawarkan koleksi buku tercetak yang dapat dibawa pulang sebagai sumber informasi terkait kesehatan masyarakat, ibu anak, tanaman obat dan lain sebagainya.



15. Pemeliharaan Aplikasi Perpustakaan Kementerian Kesehatan

Di era teknologi saat ini Perpustakaan Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik menggunakan aplikasi untuk melaksanakan tugas dalam memberikan pelayanan kepada pemustakanya. Untuk menjalankan layanan perpustakaan pada saat ini Biro komunikasi memiliki 1 *server Colocation* dan 3 *server Hosting* di data center milik Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemenkes. Dengan maraknya insiden *cyber* yang terjadi akhir-akhir ini maka setiap aplikasi mutlak harus rutin diperbaharui dan dilakukan proses pencadangan

secara rutin sepanjang tahun mengikuti perkembangan keamanan di bidang pemrograman. Hal ini diperlukan supaya bisa mengurangi dampak resiko insiden keamanan *cyber*. Karena banyaknya faktor dan modul yang harus diperbaharui maka supaya lebih efisien dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga sehingga tidak tumpang tindih proses. Aplikasi perpustakaan yang dikelola oleh Biro Komunikasi Publik diantaranya:

a. E-Perpustakaan

Website <https://perpustakaan.kemkes.go.id> berisi semua layanan Perpustakaan Kementerian yang dapat diakses publik



b. KINK One Search

KINK One Search merupakan aplikasi pencarian satu pintu untuk OPAC dan *repository* milik masing-masing perpustakaan di lingkungan Kemenkes. Aplikasi ini menyajikan informasi secara up-to-date dan real-time serta dirancang agar mudah diakses dengan aman melalui URL <https://kink.kemkes.go.id/> yang telah disediakan, memastikan kenyamanan dan keandalan bagi pengguna.

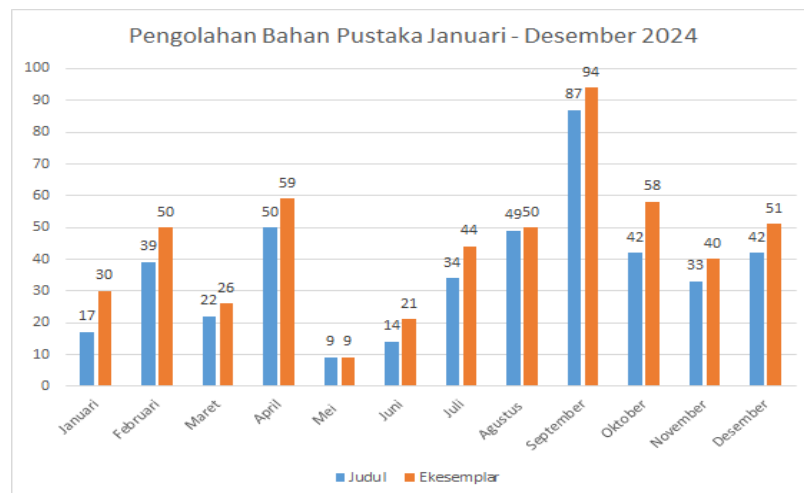
c. Aplikasi ISBN

Aplikasi ISBN merupakan aplikasi permohonan pengajuan nomor KDT (Katalog Dalam Terbitan) dan ISBN (International Standard Book Number).

16. Pengolahan Bahan Perpustakaan Kementerian Kesehatan Tahun 2024

Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah pekerjaan mengolah bahan perpustakaan secara profesional dengan sistem yang baku agar mudah ditemukan kembali. Perpustakaan Kementerian Kesehatan menggunakan klasifikasi DDC (*Dewey Decimal Classification*) untuk menentukan nomor kelas suatu bahan pustaka. Sedangkan untuk menentukan tajuk subjek menggunakan *Medical Subject Heading* (Mesh). Sistem pengolahan bahan perpustakaan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Pengolahan Bahan Perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Bahan

perpustakaan yang telah diolah menggunakan sistem yang baku selanjutnya diinput (*entry*) kedalam sistem informasi perpustakaan yang terintegrasi. Perpustakaan Kemenkes menggunakan INLIS (*Integrated Library System*) Lite. Inlislite merupakan perangkat lunak aplikasi otomasi perpustakaan yang dibangun dan dikembangkan oleh Perpustnas sejak tahun 2011. INLISLite dikembangkan sebagai perangkat lunak satu pintu bagi pengelola perpustakaan untuk menerapkan otomasi perpustakaan.



Koleksi perpustakaan Kementerian Kesehatan bersumber dari pembelian dan hibah. Namun, tahun 2024 tidak ada pembelian sehingga koleksi hanya bersumber dari hibah yaitu pemberian pimpinan atau *stakeholder* terkait dan hasil serah simpan karya cetak yang berasal dari unit kerja yang menerbitkan karya cetak. Dalam grafik diatas, pengolahan bulan Januari terdapat 17 judul dan 30 eksemplar, bulan Februari 39 judul dan 50 eksemplar, bulan Maret 22 judul, 36 eksemplar, bulan April 50 judul, 59 eksemplar, Mei 9 judul, 9 eksemplar, sedangkan Juni 14 judul dan 21 eksemplar. Pada triwulan III, pengolahan bahan perpustakaan pada bulan Juli sebanyak 34 judul, 44 eksemplar, Agustus sebanyak 49 judul, 50 eksemplar, dan pada bulan September sebanyak 87 judul, 94 eksemplar. Pada bulan awal bulan Oktober sistem integrasi perpustakaan (Inlislite) milik Kemenkes mengalami kerusakan akibat *hacker* sehingga mengalami kendala dalam penginputan data. Walaupun belum terinput dalam sistem buku sudah diberi subjek dan nomor klasifikasi. Pada bulan Oktober terdapat 42 judul, 58 eksemplar; bulan November sebanyak 33 judul, 40 eksemplar; dan bulan Desember 42 judul dan 51 eksemplar.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target kinerja

- a) SDM dan *tools* media monitoring yang mampu memantau isu di media massa dan media sosial.
- b) Kelengkapan sarana dan prasarana, termasuk Studio Siaran Radio, Studio Podcast, *Smartphone*, Laptop, PC, Kamera Video, alat rekaman, serta aplikasi berbayar seperti Freepik, Canva, dan Capcut.
- c) SDM di divisi komunikasi, terdiri dari ASN, PPNPN, dan kontrak perorangan.
- d) Dukungan pimpinan terhadap program kerja serta kualitas pelayanan publik.
- e) Tingkat koordinasi dan kolaborasi antarunit kerja dan lembaga.
- f) Program dan kebijakan terbaru dari Kementerian Kesehatan sebagai bahan publikasi.
- g) Sumber pemberitaan/narasumber dari Menteri Kesehatan, Wakil Menteri, hingga profesional kesehatan eksternal.
- h) Dukungan pustaka melalui promosi literasi, aplikasi perpustakaan (Inlislite), dan penyediaan referensi pegawai.
- i) Stabilitas produksi konten melalui tambahan SDM dari BKO dan program magang.

2. Permasalahan

- a) Beban kerja dan mobilitas tinggi dengan jumlah SDM yang terbatas
- b) Kendala operasional seperti perlengkapan yang kurang memadai (*LCD screen*, *sound system*, kursi narasumber).
- c) Efisiensi anggaran yang mengurangi cakupan kegiatan strategis (contoh: dari 6 provinsi menjadi 3 provinsi).
- d) Kurangnya koordinasi antarunit kerja dan lembaga, menghambat penyampaian informasi.
- e) Komitmen pimpinan unit pelayanan publik (UPP) dalam meningkatkan kualitas layanan publik yang masih rendah.
- f) Rendahnya budaya pelayanan prima di UPP.
- g) SDM yang tidak memadai untuk produksi konten digital, termasuk minimnya kapasitas video editing dan desain grafis.
- h) Perubahan kebijakan yang cepat memerlukan kesiapan tim selama 24/7 hari.
- i) Keterbatasan teknologi pendukung seperti perangkat lunak dan perangkat keras.
- j) Sulitnya menetapkan jadwal sosialisasi bersama DPR.
- k) Pengelolaan konten media sosial dan Instagram *lifeatkemenkes* tidak dilakukan oleh tim yang didedikasikan khusus.

3. Pemecahan masalah

- a) Menyesuaikan lokasi prioritas kegiatan dengan anggaran yang tersedia.
- b) Meningkatkan koordinasi antarunit kerja dan Kementerian/Lembaga terkait untuk penilaian IAR berikutnya.
- c) Mengintegrasikan akun media sosial di lingkungan kantor pusat Kemenkes untuk efisiensi.
- d) Melibatkan program magang dengan spesifikasi tertentu (film, *video editing*, desain komunikasi visual) untuk membantu produksi konten.
- e) Mengadakan workshop untuk meningkatkan kapasitas SDM di bidang konten media digital.
- f) Merekrut SDM tambahan untuk produksi konten dan melengkapi sarana pendukung seperti HP atau kamera.
- g) Meningkatkan komitmen pimpinan UPP untuk mendukung peningkatan layanan publik.
- h) Mengadopsi teknologi baru, pelatihan staf, dan budaya kerja yang mendukung komunikasi efektif.

4. Rencana Tindak Lanjut

- a) Melaksanakan penguatan kapasitas komunikasi risiko di 3 provinsi pada 2024.
- b) Mengadakan kegiatan media coaching sesuai arahan dan kebutuhan pimpinan.
- c) Melakukan evaluasi program AIHSP dan mengidentifikasi tantangan/capaian akhir.
- d) Meningkatkan keterlibatan dalam program di luar COVID-19 seperti penanganan KLB/outbreak berbasis one health
- e) Melakukan perekrutan SDM melalui ASN dan program magang.
- f) Mengembangkan kompetensi melalui pelatihan teknis (pengambilan gambar, editing, desain grafis).
- g) Memperbaiki infrastruktur teknologi dan logistik.
- h) Mengadakan bimtek dengan efisiensi biaya, seperti perjalanan darat.
- i) Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antarunit kerja untuk mendukung komunikasi yang lebih efektif.
- j) Melakukan advokasi pesan transformasi kepada pengelola komunikasi internal di Kemenkes.

INOVASI KINERJA

1. Integrasi Media Sosial Instagram Kementerian Kesehatan RI

Integrasi media sosial Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merupakan upaya strategis yang sejalan dengan arahan Menteri Kesehatan terkait isu ini. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan komunikasi publik melalui pengelolaan media sosial yang lebih efisien dan terfokus. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan berita dan publikasi yang dilakukan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik pada semester I tahun 2024, 98,08% dari seluruh responden yang terdiri dari masyarakat umum mengakses informasi kesehatan melalui media sosial, selain itu dari hasil *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan bersama tenaga medis/kesehatan, mereka menganggap bahwa kanal Kementerian Kesehatan merupakan sumber yang paling valid dan terpercaya. Oleh karena itu, dengan pengelolaan yang terintegrasi, Kemenkes dapat lebih mudah memantau dan mengontrol pesan yang disampaikan kepada publik sehingga memungkinkan untuk menganalisa respons masyarakat dengan lebih cepat, menjaga konsistensi informasi yang disampaikan dan memitigasi risiko informasi yang tumpang tindih. Respons cepat terhadap isu kesehatan yang berkembang serta peningkatan interaksi di media sosial merupakan hal krusial untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap instansi.

Integrasi media sosial Kementerian Kesehatan telah menunjukkan dampak yang signifikan terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terutama dalam hal pengukuran kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik. Berdasarkan laporan capaian kinerja internal, diperoleh data sebagai berikut:

Sebelum Integrasi		Sesudah integrasi (data per Desember 2024)		% Perubahan engagement
<i>Followers</i>	<i>Engagement</i>	<i>Followers</i>	<i>Engagement</i>	
2,7 M	7.838.018	3,2 M	13.101.312	+ 67,15%

Dari data di atas, dapat dilihat adanya peningkatan jumlah *followers* dari 2,7 juta menjadi 3,2 juta serta kenaikan *engagement* sebesar 67,15%. Hal ini mencerminkan bahwa upaya integrasi media sosial tidak hanya memperluas jangkauan informasi tetapi juga meningkatkan interaksi dan partisipasi publik. Dengan akses data yang terpusat, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dapat melakukan pengelolaan dan kontrol yang lebih efektif sehingga mempermudah penyusunan strategi komunikasi serta membantu mengidentifikasi dan memitigasi potensi risiko terkait. Selain itu, dengan mengacu pada

data capaian kinerja dari konten yang telah dipublikasikan, memungkinkan tim komunikasi untuk merancang konten selanjutnya yang lebih terfokus dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini tentunya dapat mendukung proses evaluasi yang berorientasi pada *outcome*, yang mana dari umpan balik yang didapatkan, Kementerian Kesehatan mampu menilai sejauh mana pesan kesehatan dapat diterima dan dipahami oleh publik sehingga kedepannya instansi dapat membangun upaya perbaikan yang berkelanjutan.



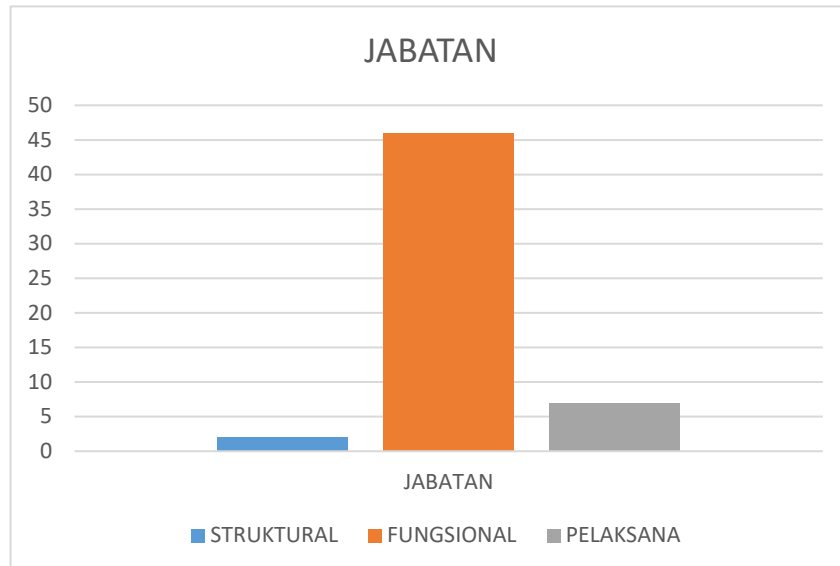
D. SUMBER DAYA/REALISASI ANGGARAN

SUMBER DAYA MANUSIA

Keadaan Pegawai Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Sekretariat Jenderal sampai dengan 31 Desember 2024 berjumlah 52 Orang Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari 47 Orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 Orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan rincian sebagai berikut :

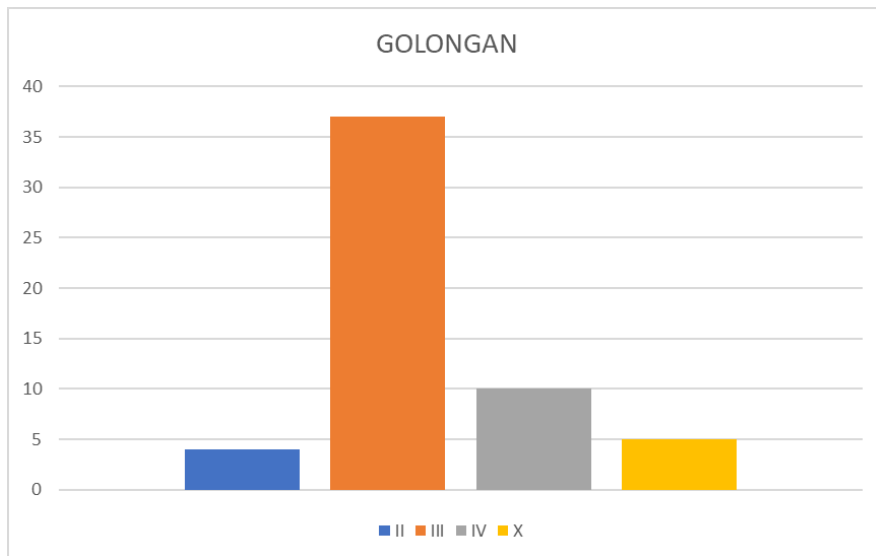
Menurut Jabatan:

- 1) Jabatan Struktural : 2 orang
- 2) Jabatan Fungsional : 43 orang
- 3) Pranata Humas : 30 orang
- 4) Pustakawan : 6 orang
- 5) Perencana : 1 orang
- 6) Pranata Komputer : 1 orang
- 7) Arsiparis : 2 orang
- 8) Keuangan : 3 orang
- 9) Jabatan Pelaksana : 7 orang



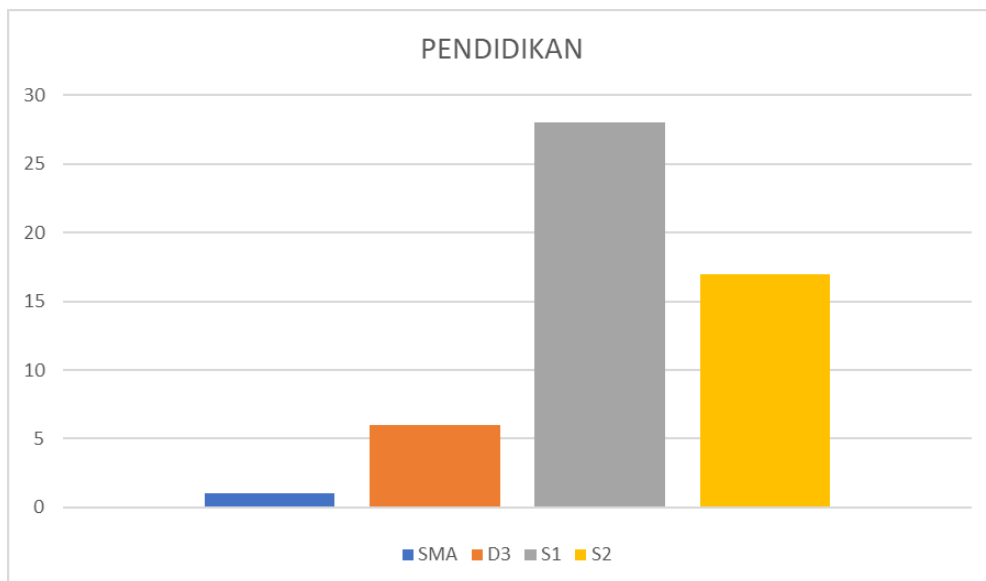
Menurut Golongan:

- 1) Golongan II : 4 orang
- 2) Golongan III : 37 orang
- 3) Golongan IV : 10 orang
- 4) Golongan IX : 5 orang



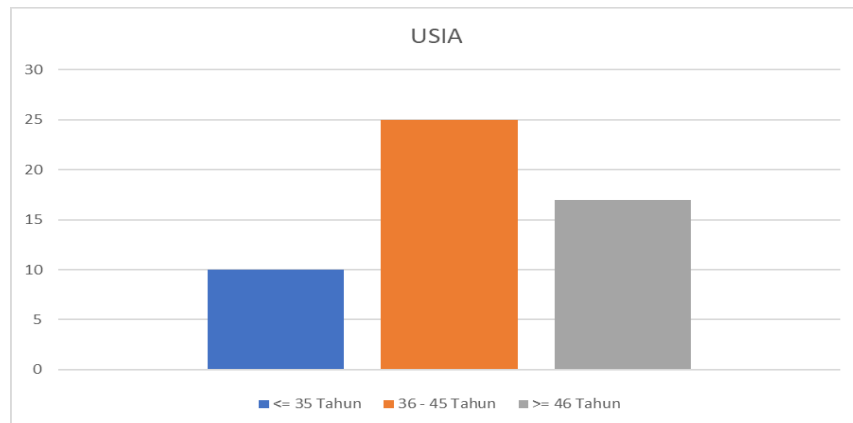
Menurut Pendidikan:

- 1) SLTA : 1 orang
- 2) D3 : 6 orang
- 3) S1 : 28 orang
- 4) S2 : 17 orang



Menurut Usia

- 1) ≤ 35 Tahun : 10 orang
- 2) 36 – 45 Tahun : 25 orang
- 3) ≥ 46 Tahun : 17 orang



Berikut beberapa daftar pelatihan yang diikuti oleh pegawai Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Tahun 2024, antara lain :

DAFTAR PELATIHAN TAHUN 2024 BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN PUBLIK

No.	Nama Peserta	Nama Pelatihan	Tanggal Pelatihan
1.	Seluruh Pustakawan di Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik	Diskusi kediklatan dan kepastakawanan dengan tema kantaka, cara mudah daftar pelatihan kepastakawanan	24 Januari 2024
2.	Inri Denna, S.Sos, MAHCM	<i>E-Learning</i> Pelatihan Anti Korupsi Dasar dan Integritas (PADI) bagi <i>Champion</i>	25 Januari 2024
3.	Mauliana Asri, S.Sos	Webinar PPPK Sesi I pengenalan organisasi dan manajemen SDM kemenkes	29 Januari s/d 3 Februari 2024
4.	Mauliana Asri, S.Sos	Webinar PPPK Sesi II dan III transformasi sistem kesehatan dan manajemen kinerja	30 Januari s/d 3 Februari 2024

5.	Kartika Indra Susilowati, S.Kom	Webinar PIC <i>Couching Mentoring</i>	6 – 7 Februari 2024
6.	Dede Lukman Hakim, S.Sos	Orientasi PPPK Tahun 2024	6 s/d 20 Februari 2024
7.	Giri Inayah Abdullah, S.Sos, MKM	<i>Workshop</i> Budaya Kerja Kemenkes	12 – 13 Februari 2024
8.	Seluruh Pustakawan di Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik	Bedah Buku Petunjuk Teknis Layanan Depresi	20 Februari 2024
9.	Tri Septi Suprihatini, SE	<i>GPR Conference</i> : Layakkah Humas Berada di Eselon 1?	22 Februari 2024
10.	Eka Purnamasari, S.Si	Webinar Pusbintalk Series #9: Perhitungan Formasi Perencana	23 Februari 2024
11.	Seluruh Pegawai di Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik	Webinar Penyampaian Hasil Survei Penilaian Integritas KPK Untuk Kemenkes Tahun 2023	29 Februari 2024
12.	Eka Purnamasari, S.Si	Strategi meningkatkan kualitas SAKIP/LAKIP	1 – 8 Maret 2024
13.	Aji Muhawarman, ST, MKM	Pelatihan <i>Public Speaking for Professional Talents</i>	8 Maret 2024

14.	Dodi Sukmana, S.I.Kom	<i>Service Quality Transformation in Smart Society Industry 5.0 Training Course</i>	9 Maret 2024
15.	Seluruh Pegawai di Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik	Webinar sosialisasi pengembangan kompetensi ASN	13 Maret 2024
16.	Seluruh Pegawai di Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik	MOOC Sosialisasi Pengembangan Kompetensi ASN, Kompetensi Manajerial, Sosialkultural dan Non Kesehatan	14 Maret s/d 30 April 2024
17.	Seluruh Pranata Humas dan Pustakawan di Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik	<i>Workshop</i> kehumasan bidang pelayanan kesehatan <i>digital marketing series 2</i>	27 Maret 2024
18.	Seluruh Pegawai di Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik	Webinar yuk kenali tren kompetensi untuk SMART ASN	28 Maret 2024
19.	Giri Inayah Abdullah, S.Sos, MKM	<i>Trainer</i> Budaya Kerja	31 Maret – 2 April 2024
20.	Seluruh Pegawai di Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik	Webinar <i>Pulse Check</i> Semester 1 Tahun 2024	22 April 2024

21.	Okto Rusdianto, ST	Sosialisasi pengawasan kearsipan internal di lingkungan kementerian kesehatan	22 – 23 April 2024
22.	Kartika Indra Susilowati, S.Kom	Webinar ASN Belajar Seri 16 “Talenta Nasional – Berdaya Saing Global”	2 Mei 2024
23.	Kartika Indra Susilowati, S.Kom	Diskusi Kelompok Terpumpun Pemantauan dan Evaluasi Pembinaan Jabatan Fungsional Pasca Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023	3 Mei 2024
24.	Kartika Indra Susilowati, S.Kom	Webinar ASN Belajar Seri 18 “Arsip di Era <i>Artificial Intelligence</i> dan Cara Mengadaptasinya”	16 Mei 2024
25.	Nani Indriana, SKM., MKM	<i>olidasi Transformasi internal terkait penguatan budaya kerja di lingkungan Setjen Kemenkes</i>	7 – 9 Mei 2024
26.	Seluruh Pegawai di Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik	Sosialisasi <i>Knowledge Management System</i> (KMS) Kemenkes : <i>Knowledge Sharing</i> Sebagai Bagian Budaya Kerja Baru Kemenkes	17 Mei 2024
27.	Johan Safari, SKM, MPH.	Pelatihan Teknis Pengelolaan Komunikasi Krisis Angkatan II Tahun Anggaran 2024	3 – 7 Juni 2024
28.	Jeni Helen Chronika Sitorus, SH	Pelatihan Literasi Informasi	11 – 15 Juni 2024
29.	Wayang Mas Jendra, S.Sn	Bimbingan Teknis Kiat Lulus Uji Kompetensi Strategi Komunikasi Kehumasan Pemerintah	12 Juni 2024

30.	Kartika Indra Susilowati, S.Kom	Webinar ASN Belajar Seri 23 “Urgensi Sertifikasi Kompetensi Untuk Peningkatan Kinerja ASN”	20 Juni 2024
31.	Mochamad Nur Prasetyo	Bimbingan Teknis Penyusunan <i>Risk Register</i> Manajemen Resiko	26 – 28 Juni 2024
32.	Kartika Indra Susilowati, S.Kom	Webinar ASN Belajar Seri 24 “ <i>Performance Based Learning</i> – Pengembangan Kompetensi ASN Berbasis Kinerja”	27 Juni 2024

SUMBER DAYA ANGGARAN

Dalam mencapai kinerjanya, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik didukung oleh Sumber Daya Anggaran yang berasal dari APBN. Sesuai DIPA Tahun Anggaran 2024 Nomor: 024.01.1.465921/2024 tanggal 25 November 2023 dengan alokasi sebagai berikut:

Pagu Awal (Rp.)	Pagu Revisi (Rp.)	Refocusing (Rp.)	Realisasi	
			Anggaran (Rp.)	%
33.432.897.000	41.716.747.000	3.497.073.000	37,630,255,096	98.46

Sejalan dengan tugas dan fungsi Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, proporsi anggaran terbesar dialokasikan tiap tahunnya untuk alokasi sasaran indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Berita dan Publikasi.

Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh anggaran DIPA Kantor Pusat Sekretariat Jenderal unit kerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Tahun 2024 dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

Uraian kegiatan	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%

Pengelolaan komunikasi dan Pelayanan Publik	46,248,877,000	43,092,908,419	93.18	38,219,674,000	37,630,255,096	98.46
---	----------------	----------------	-------	----------------	----------------	-------

Realisasi Anggaran TA 2024

Tabel Rincian Realisasi Anggaran Per Output

PROGRAM	OUTPUT	PAGU	REALISASI	%
Dukungan Manajemen, Kegiatan, Pengelolaan Komunikasi dan Pelayanan Publik	Penguatan Pengelolaan Layanan Publik	2,363,153,000	2,308,995,929	97.71
	Layanan Hubungan Masyarakat	35,856,521,000	35,321,259,167	98.51

Pagu yang bisa digunakan sebesar Rp. 38,219,674,000 dikarenakan ada *automatic adjustment* sebesar Rp.3.497.073.000

MATRIK TARGET KINERJA BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2023-2024

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	T 2023	R 2023	T 2024	R 2024
1	Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik	Meningkatnya pengelolaan komunikasi dan pelayanan publikasi	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan berita dan publikasi	83	B06: 88,2 B12: 89,36	83	B06: 89,36 B12: 90,17
			Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik	37 UPT	46 UPT	40 UPT	44 UPT

			dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan				
--	--	--	---	--	--	--	--

SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana mempunyai peranan penting dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan penyelesaian tugas dan fungsi satuan organisasi. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan komunikasi publik dan Pelayanan Publik, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik terus berupaya untuk melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor.

Berdasarkan Data pada Neraca Laporan Barang Milik Negara Tahun 2024, nilai sarana dan prasarana yang dikelompokkan dalam akun neraca dapat dijelaskan dibawah ini:

Neraca BMN Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Tahun 2024

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA - SUB SATKER
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024
TAHUN ANGGARAN 2024

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 024010199465921035KP KANTOR PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL

Tgl.Data : 08/01/25 6:30 AM
Tgl.Cetak : 08/01/25 10:38 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_subsatker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	322,173,547
132111	Peralatan dan Mesin	12,864,995,258
135121	Aset Tetap Lainnya	768,870,030
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(11,459,450,146)
162151	Software	380,417,936
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(380,417,936)
J U M L A H		2,496,588,689

Daftar Peralatan dan Mesin di Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Per 31 Desember 2024

No	Kode	Uraian	Jumlah	Nilai
1	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	370.689.100
2	3020104001	Sepeda Motor	1	14.810.000

3	3020201004	Lori Dorong	2	3.850.000
4	3030205002	Tool Kit Box	1	3.300.000
5	3030301064	Memori Programmer	5	10.878.000
6	3040104004	Lemari Penyimpanan	1	1.650.000
7	3050103007	Mesin Fotocopy Folio	1	46.411.500
8	3050104001	Lemari Besi/Metal	18	87.312.638
9	3050104002	Lemari kayu	62	328.538.300
10	3050104003	Rak Besi	2	187.437.250
11	3050104004	Rak Kayu	7	51.150.000
12	3050104007	Brandkas	1	6.600.000
13	3050104016	Roll Opek	1	40.700.000
14	3050104020	Lemari Display	1	2.201.000
15	3050105007	CCTV – Camera Control Television System	3	59.433.000
16	3050105015	Alat Penghapus Kertas	5	26.276.500
17	3050105038	Laser Pointer	2	3.162.500
18	3050105048	LCD Projector/Infocus	6	96.754.900
19	3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	11	108.570.000
20	3050201002	Meja Kerja Kayu	4	21.610.000
21	3050201003	Kursi Besi/Metal	193	395.575.695
22	3050201004	Kursi Kayu	2	15.800.000
23	3050201005	Sice	8	22.000.000
24	3050201008	Meja Rapat	35	133.951.000
25	3050201014	Meja Resepsionis	3	16.972.000
26	3050201019	Meja Makan Kayu	2	5.280.000
27	3050201021	Pot Bunga	3	5.610.000
28	3050201028	Workstation	70	585.526.000
29	3050201033	Sofa	1	24.975.000
30	3050201999	Meubelair lainnya	3	14.080.000
31	3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	2.692.800
32	3050204001	Lemari Es	5	13.370.500
33	3050204003	A.C. Windows	1	128.634.000
34	3050204004	A.C. Split	11	106.634.000
35	3050206002	Televisi	33	1.046.771.180

36	3050205004	Teko Listrik	1	161.700
37	3050206007	Loudspeaker	2	11.779.416
36	3050206008	Sound System	3	58.523.600
37	3050206012	Wireless	8	252.556.750
38	3050206014	Microphone	14	60.358.000
39	3050206019	Stabilisator	1	3.496.500
40	3050206020	Camera Video	7	191.927.000
42	3050206034	Tangga Aluminium	1	588.500
42	3050206036	Dispenser	7	18.583.400
43	3050206057	Vertikal Blind	1	17.737.500
44	3060101003	Audio Mixing Stationer	3	99.680.520
45	3060101008	Audio Monitor Active	2	14.307.500
46	3060101022	Telephone Hybrid	1	8.827.500
47	3060101036	Microphone/Wireless MIC	13	214.341.600
48	3060101056	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	1	28.700.000
49	3060101075	Digital Audio Storage System	1	21.890.000
50	3060101088	Voice Recorder	23	29.755.420
51	3060102003	Camera Electronic	8	37.280.000
52	3060102016	Video Switcher	2	35.090.000
53	3060102024	Video Processor	1	16.500.000
54	3060102034	Teleprompter	1	3.885.000
55	3060102045	Tripod Camera	10	34.577.250
56	3060102060	Camera Film	2	67.712.600
57	3060102061	Lensa Kamera	15	418.426.100
58	3060102118	Head Set	36	49.933.478
59	3060102120	Lighting Head Body	6	22.327.300
60	3060102121	Lighting Mechanic	4	44.568.700
61	3060102128	Camera Digital	17	747.787.100
62	3060102129	Tas Kamera	2	3.221.750
63	3060102130	Lampu Blitz Kamera	8	53.519.000
64	3060102158	Monopod	2	3.509.500
65	3060102164	Video Splitter	1	11.384.100
66	3060102167	Drone	1	35.000.000

67	3060102170	Gimbal Tripod	1	1.998.000
68	3060102999	Peralatan Studio Video dan Film Lainnya	3	34.268.750
69	3060199999	Alat Studio Lainnya	3	3.135.000
70	3060201001	Telephone (PABX)	3	125.954.600
71	3060201002	Intermediate Telephone/Key Telephone	1	123.527.273
71	3060201003	Pesawat Telephone	1	39.600.000
72	3060201004	Telephone Mobile	24	261.104.330
73	3060201006	Handy Talky	3	6.072.000
74	3060201010	Facsimile	3	5.425.000
75	3060201019	PDA	2	38.072.100
76	3060310999	Peralatan Antena SHF/Parabola lainnya	1	47.650.000
77	3070102032	Braket Holder	1	1.500.000
78	3070105094	Instrument Trolley, Stainless Steel	1	20.000.000
79	3080111137	Tripod	10	52.031.650
80	3080112025	Stabilizer	2	8.436.000
81	3080153053	Laboratory Air Conditioner 1.50 HP	2	26.911.500
82	3080156081	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	2	6.050.000
83	3080305002	Uninterrupted Power Supply (UPS)	2	40.805.000
84	3080715005	Lighting Equipment	5	21.851.000
85	3090403062	TEA Tile II Headset with PTT	14	5.823.224
86	3090405010	Digital Signature Pad	2	3.660.000
87	3090407009	Battery Pack Camera (Yang Bisa Diisi Ulang)	3	7.920.000
88	3100102001	P.C Unit	111	1.894.593.335
89	3100102003	Note Book	64	1.182.046.292
90	3100102009	Tablet PC	1	21.756.600
91	3100201012	Hard Disk	31	87.038.350
92	3100202001	Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	4	8.214.000
93	3100202006	CPU (Peralatan Mini Komputer)	2	12.890.000
94	3100202015	Auto Switch/Data Switch	5	14.744.400
95	3100202017	Speaker Komputer	2	3.289.000
96	3100203002	Monitor	7	30.200.000
97	3100202003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	44	225.536.630

98	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	39.058.800
99	3100203017	External/Portable Hardis	3	25.549.000
100	3100204001	Server	14	1.423.492.677
101	3100204006	Repeater dan Transciever	1	93.500.000
102	3100204009	Card Punch	1	7.425.000
103	3100204024	Switch	1	57.673.000
104	3100204029	Mobile Modem GSM/CDMA	2	27.775.000
105	3100204038	Wireless IP Camera	2	54.000.000
106	3100299999	Peralatan Komputer Lainnya	2	4.125.000
107	3110201009	Decocer/DE 200	3	90.489.300
108	3150405006	Air Conditioning (AC)	9	156.873.200
109	3160101999	Alat Peraga Pelatihan Lainnya	6	26.620.400
110	3170122014	Microwave Heater	1	1.498.500
111	3170124001	Rolling Machine	1	6.875.000
112	6010101001	Monografi	2396	537.650.080
113	6010101999	Buku Lainnya	4	9.435.000
114	6010201001	Kaset	588	151.883.700
115	6010201003	CD/VCD/DVD/LD	805	36.901.250
116	6010301999	Bahan Kartografi lainnya	1	33.000.000
117	8010101001	Software Komputer	3	380.417.936
Total			4.913	14.094.459.824

Daftar Inventaris Kendaraan Dinas dan Operasional Roda 4

Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik

Per Desember 2024

No	No.Kendaraan	Tahun	Jenis / Merk	Keterangan
1	B 1307 FQ	2006	Toyota Innova	Kendaraan Operasional
2	B 1107 SQP	2013	Toyota Veloz	Kendaraan Operasional

Daftar Inventaris Kendaraan Operasional Roda 2
Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
Per Desember 2024

No	No.Kendaraan	Tahun	Jenis / Merk	Keterangan
1	B 6110 SQP	2008	Honda Supra X 125	Operasional Subbag Adum

Dalam hal pengelolaan BMN selama Tahun 2024, Unit Kerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

Pengadaan BMN

KEMENTERIAN KESEHATAN
 SEKRETARIAT JENDERAL
 SAKTIER KONSOLIDASI KEMENTERIAN KESEHATAN

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUBSUB KELOMPOK
 TAHUN ANGGARAN 2024

KELOMPOK BARANG : 824.01.9199.400021.000 / Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
 JENIS TRANSAKSI : 802 - Internal Transfer Masuk

Tanggal : 2024.02.19.09.02
 Halaman : 10 dari 18
 Rincian Lap : DTBGGGGKT

ASSET NEGARA / SUBSUB KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10111	Peralatan dan Mesin		8	166.469.000	8	166.469.000	8	0
3.20.21.20.019	Aktif Penghantaran Kertas	Buah	3	22.800.000	3	22.800.000	3	0
3.95.92.01.005	Sofa	sat	1	24.975.000	1	24.975.000	1	0
3.95.92.04.004	A.C. Split	Buah	2	22.000.000	2	22.000.000	2	0
3.10.21.02.002	Lap Tipi	Buah	2	98.694.000	2	98.694.000	2	0
TOTAL				166.469.000		166.469.000		0

Dilihat dari gambar di atas pengadaan BMN pada Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik di lakukan Transfer Masuk online oleh Biro Umum dengan memakai aplikasi SAKTI. Mutasi penambahan BMN Tahun 2024 dengan total Rp. 166.469.000 (seratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan jumlah unit barang 8 (delapan) unit. Semua pengadaan tertuang di Berita Acara Serah Terima Barang.

Penghapusan/Lelang BMN

Tahun 2024 Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik telah berproses untuk Penghapusan, Pemusnahan dan/atau Penjualan Aset Barang Milik Negara baik berupa Peralatan Mesin ataupun Aset Tak Berwujud (ATB). Total Aset yang telah dihapus, dimusnahkan dan/atau dilelang sebanyak :

- Peralatan dan Mesin sebanyak 271 Unit
- Hak Cipta sebanyak 143 dummy

- Software sebanyak 5 dummy

Untuk Peralatan dan Mesin di tahun 2024 ini telah dilakukan penghapusan dengan cara dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II dengan total Nilai Perolehan sebanyak 2.095.379.371 (dua milyar sembilan puluh lima tiga ratus tujuh puluh sembilan tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).

E. ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024 dan mempertimbangkan kondisi geopolitik global, maka dipandang perlu untuk melanjutkan kebijakan *Automatic Adjustment* dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2024.

Automatic Adjustment Belanja Kementerian Kesehatan di distribusikan ke semua Unit Utama. Tahun 2024 pagu alokasi Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Pelayanan Publik sebesar Rp41.716.747.000. Kebijakan distribusi pemenuhan *Automatic Adjustment* Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Pelayanan Publik di tetapkan sebesar Rp3.000.000.000 dan pemblokiran perjalanan dinas sebesar Rp497.073.000. Adanya kebijakan tersebut mengharuskan Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik membuat prioritas terkait kebutuhan kegiatan prioritas dan mendesak serta pengendalian belanja.

Dengan alokasi anggaran yang telah di tetapkan, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik perlu mendukung kebijakan Kementerian Kesehatan terkait dukungan komunikasi publik dalam kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) Tahun 2024. Pelaksanaan Rakerkesnas Tahun 2024 mengundang Presiden, Pimpinan K/L lain, Dinkes Prov, Satker Kantor pusat dan UPT Kemenkes, Dinkes Kab/Kota, RSUD dan Bappeda. Dengan pembahasan beberapa topik-topik Kesehatan seperti SIHREN, SOPHI, InPULS (SiSoln), RIBK, STR, SIP, SKP, proses registrasi dan dan perizinan bidang Kesehatan. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Biro Komunikasi mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000.00, sehingga Pagu Alokasi Anggaran Biro Komunikasi bertambah menjadi Rp. 46.716.747.000.

Dengan adanya *Automatic Adjustment* diatas dan penambahan anggaran untuk mendukung kegiatan publikasi, maka pagu efektif yang di gunakan untuk kegiatan pengelolaan komunikasi dan Pelayanan Publik sebesar Rp 38.219.674.000. pada tahun 2024, realisasi anggaran Pelayanan Publik TA 2024 sebesar Rp. 37.630.255.096 atau sebesar 98,46%.

Selama Tahun 2024, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik telah mengalami beberapa revisi, baik itu revisi diantaranya revisi DJA, revisi Kanwil dan revisi POK. Revisi dilakukan

dikarenakan adanya kebijakan baik itu bersifat Automatic Adjustment, penambahan anggaran, maupun pergeseran anggaran dalam rangka pemenuhan kegiatan pengelolaan Komunikasi dan Pelayanan Publik.

Rincian revisi anggaran yang dilakukan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan publik Tahun 2024 yaitu :

- a) Revisi DJA tanggal 16 Januari 2024, mengenai Distribusi pemenuhan *Automatic Adjustment* Kementerian Kesehatan sesuai dengan Sekretaris Jenderal No. PR.04.02/A/52/2024 tanggal 9 Januari 2024 hal Automatic Adjustment di Lingkungan Sekretariat Jenderal TA 2024. Automatic Adjustment sebesar Rp. 3.000.000.000,00 sehingga pagu anggaran tetap sebesar Rp.33.432.897.000,00
- b) Revisi Kanwil ke-3 tanggal 28 Februari 2024 mengenai revisi Optimalisasi belanja barang dan jasa, pergeseran anggaran untuk pemenuhan kegiatan pengelolaan komunikasi dan pelayanan publik, dan Pemutakhiran RPD Hal III DIPA, sehingga pagu anggaran tetap sebesar Rp.33.432.897.000,00
- c) Revisi DJA ke-4 tanggal 22 Maret 2024 mengenai revisi Buka Blokir Kegiatan pengelolaan siaran Radio dan TV Kesehatan berbasis Internet (Radio Streaming dan TV Streaming) Pengelolaan Komunikasi dan Pelayanan Publik sehingga pagu anggaran tetap sebesar Rp.33.432.897.000,00
- d) Revisi Kanwil ke-5 tanggal 16 April 2024 mengenai revisi Optimalisasi belanja barang dan jasa, pergeseran anggaran untuk pemenuhan pelaksanaan Rakerkesnas kegiatan pengelolaan komunikasi dan pelayanan publik, Refocusing penambahan anggaran Rp. 5.000.000.000,00 , sehingga pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 38.432.897.000,00
- e) Revisi POK ke-9 tanggal 04 Juni 2025 revisi Optimalisasi belanja barang dan jasa, pergeseran anggaran untuk pemenuhan pelaksanaan kegiatan pengelolaan komunikasi dan pelayanan publik, sehingga pagu anggaran tetap sebesar Rp. 38.432.897.000,00
- f) Revisi Kanwil ke-13 tanggal 26 Juli 2024 mengenai penambahan anggaran publikasi untuk mendukung serta berpartisipasi dalam pelaksanaan Germas BBI/PDN dan BBWI 2024 dimana Kementerian Kesehatan mendapatkan tugas sebagai campaign manager kegiatan BBI dan BBWI Tahun 2024 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 dari pagu anggaran sebelumnya Rp. 38.432.897.000,00 sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 39.932.897.000,00
- g) Revisi Kanwil ke-19 tanggal 28 Oktober 2024 mengenai penambahan anggaran untuk kegiatan anugrah penghargaan Kemenkes sebesar Rp. 905.850.000,00 dari pagu

anggaran sebelumnya Rp. 39.932.897.000,00 sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 40.838.747.000,00

- h) Revisi DJA ke-20 tanggal 8 November 2024 untuk mendukung kegiatan publikasi kebijakan program kesehatan melalui Advetorial dan Reportase berita Liputan informasi berita kesehatan penambahan anggaran sebesar Rp.628.000.000,00, dari pagu anggaran sebelumnya sebesar Rp. 40.838.747.000,00 sehingga pagu menjadi Rp. 41.466.747.000,00
- i) Revisi Kanwil ke 21 tanggal 18 November 2024, adanya kebijakan Pemerintah dalam rangka penghematan anggaran belanja perjalanan dinas Kementerian/Lembaga. Terkait hal tersebut Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik melakukan penghematan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp. 497.073.000,00 sehingga anggaran tersebut terblokir mandiri dan tidak dapat di gunakan, pagu anggaran tetap sebesar Rp. 41.466.747.000,00
- j) Revisi POK tanggal 20 November 2024, optimalisasi belanja barang jasa dan pergeseran anggaran untuk pemenuhan kegiatan pengelolaan komunikasi dan Pelayanan Publik, pagu anggaran tetap sebesar Rp. 41.466.747.000,00
- k) Revisi Kanwil ke 22 tanggal 2 Desember 2024, adanya kebutuhan penambahan anggaran untuk belanja jasa terkait pembuatan kalender 2025 dan publikasi pembuatan Video HKN, Nataru serta Program Kebijakan Kesehatan lainnya sebesar Rp. 250.000.000,00 dari pagu anggaran sebelumnya sebesar Rp.41.466.747.000,00 sehingga pagu menjadi sebesar Rp. 41.716.747.000,00

Pagu anggaran Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 41.716.747.000,00 dengan blokir *Automatic Adjustment* sebesar Rp 3.000.000.000,00 dan Blokir Perjalanan dinas sebesar Rp. 497.073.000,00 sehingga pagu efektif sebesar Rp. 38.219.674.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 37,630,255.096,00 sebesar 98,46 %

Rincian Realisasi Anggaran Menurut Jenis Kegiatan TA 2024

PROGRAM	OUTPUT	PAGU EFEKTIF	REALISASI	%
Pengelolaan Komunikasi dan	Penguatan Pengelolaan Layanan Publik	2.363.153.000	2.308.995.929	97,71

Pelayanan Publik	Layanan Hubungan Masyarakat	35.856.521.000	35.321.259.167	98,51
		38.219.674.000	37.630.255.096	98,46

Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Efisiensi merupakan suatu perbandingan antara sumber daya yang digunakan dalam suatu proses melakukan pekerjaan dengan hasil yang dicapai. Semakin sedikit sumber daya yang digunakan seperti tenaga, waktu dan biaya tapi tetap dapat menghasilkan output sesuai dengan rencana atau target yang ingin dicapai, maka akan dinilai efisiensi.

Dalam mendukung dan melaksanakan Program Dukungan Manajemen Unit Organisasi Sekretariat Jenderal, berikut Analisa efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Tahun 2024 terurai dalam tabel dibawah ini :

Efisiensi Sumber Daya Anggaran untuk setiap capaian Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dapat dihitung sebagai berikut:

Rumus Efisiensi :
$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK) \times CNI) - (RAN)}{\sum_{i=1}^n (PAK \times CNI)} \times 100\%$$

Target Output	Capaian Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Anggaran	Efisiensi Anggaran
100	109,32%	Rp. 38.219.674.000	Rp. 37.630.255.096	98,46%	9,94%

Analisis atas penggunaan anggaran terhadap capaian output kegiatan

Dalam mendukung dan melaksanakan Program Dukungan Manajemen Unit Organisasi Sekretariat Jenderal, berikut analisa efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian target rincian output Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik tahun 2024 terurai dalam tabel dibawah ini :

Kegiatan		Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sept	Oktr	Nov	Dikl
1. Manajemen	Manajemen Organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Manajemen Organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Manajemen	Manajemen Organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Manajemen Organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3. Manajemen	Manajemen Organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Manajemen Organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4. Manajemen	Manajemen Organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Manajemen Organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Matriks Sandingan antara Capaian IKK dengan Realisasi Anggaran

RPJMN (Sumber PerPres No.18 Tahun 2020_Matriks Pembangunan Jangka Menengah)															
INDIKATOR	TARGET	Q1			Q2			Q3			Q4			PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%		
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN PUBLIK															
IKK Setelah Revisi Renstra															
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pengelolaan berita dan publikasi	83	0	0	0	83	0	0	83	89,36	107,66	83	90,17	108,638554	-(Telah tercapai)	-(Telah tercapai)
Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan	40	0	0	0	40	0	0	40	33	82,50	40	44	110,0%	Survei masih berjalan hingga akhir November 2024	Mempercepat pelaksanaan survei

RKAKL			
INDIKATOR	Q4		
	Anggaran	Realisasi	%
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pengelolaan berita dan publikasi	36.729.011.000	36.157.309.016	98,44%
Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan	1.490.663.000	1.472.946.080	98,81%

Capaian indikator kinerja kunci (IKK) I sebesar 108,64% dengan realisasi anggaran 98,44% dan IKK II sebesar 110% dengan realisasi anggaran 98,81% menunjukkan efisiensi anggaran yang signifikan. Unit kerja mampu memanfaatkan pagu efektif secara optimal,

sehingga capaian kinerja melebihi target tanpa melebihi anggaran yang direncanakan. Persentase realisasi anggaran yang tidak jauh dari perencanaan mengindikasikan bahwa perencanaan anggaran telah dilakukan dengan baik, mendukung tercapainya output yang maksimal dengan sumber daya yang tersedia.

Efisiensi ini juga tercermin dari nilai persentase RVRO pada keluaran dari RO "Pelayanan Publik Lainnya" dan "Layanan Dukungan Manajerial Internal". Meskipun terdapat beberapa kegiatan yang memerlukan penyesuaian timeline, yang memengaruhi capaian triwulanan, secara keseluruhan unit kerja berhasil menjaga keselarasan antara realisasi anggaran dan target capaian kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dalam pelaksanaan kegiatan, perencanaan yang matang dan pengelolaan anggaran yang cermat tetap menghasilkan kinerja yang efisien dan efektif.

BAB IV

KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Kesimpulan

Laporan akuntabilitas kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik kepada pimpinan (Sekretaris Jenderal) dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam mendukung pembangunan kesehatan dan khususnya kegiatan pengelolaan komunikasi publik dan pelayanan Publik. Terkait dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Unit Kerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, terdapat perubahan yang disebabkan adanya revisi rencana strategis TA 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik bulan April Tahun 2022 telah melakukan Revisi Renstra. Sesuai dengan Rencana Strategis yang telah di revisi, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik memiliki target dan realisasi sebagai berikut:

- a) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) I: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Berita dan Publikasi dengan target 83 dan realisasi 90,17
- b) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) II: Jumlah UPT Kemenkes dengan Kategori Baik dalam pelaksanaan dengan target 40 UPT dan realisasi 44 UPT
- c) Silver Winner (PR Indonesia Award 2024) kategori Media Sosial Instagram
- d) Bronze Winner (PR Indonesia Award 2024) kategori Media Sosial Youtube
- e) Penghargaan berupa predikat Badan Publik berkategori “Informatif” dari Komisi Informasi Pusat RI

Keberhasilan yang telah dicapai merupakan langkah awal untuk melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicanangkan pada periode berikutnya dan sekaligus menjadi barometer agar kegiatan-kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan segala kekurangan dan hal-hal yang menghambat tercapainya target dan rencana kegiatan diharapkan dapat dicari solusi serta diselesaikan dengan mengedepankan profesionalisme dan kekeluargaan di lingkungan Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik.

Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil Laporan Kinerja di atas, rencana tindak lanjut Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

- a) Mengatur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi survei IKM Pengelolaan Berita dan Publikasi Kesehatan tahun berikutnya secara optimal dengan mempertimbangkan waktu, SDM, anggaran, dan sarana prasarana.
- b) Mengoptimalkan pembinaan terhadap UPT melalui program kerja sama dengan masing-masing unit eselon I terkait;
- c) Melakukan pemetaan dan koordinasi dengan unit eselon I agar UPT dapat melakukan *self-assessment* berdasarkan indikator yang ditetapkan
- d) Mengupayakan pelaksanaan survei kepatuhan interaksi pelayanan publik setelah lokus mempersiapkan diri dengan perbaikan layanannya;
- e) Melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan standar pelayanan publik kepada unit layanan publik yang menjadi sampel penilaian Praktek Baik Pelayanan melalui Program Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP mandiri institusional).

